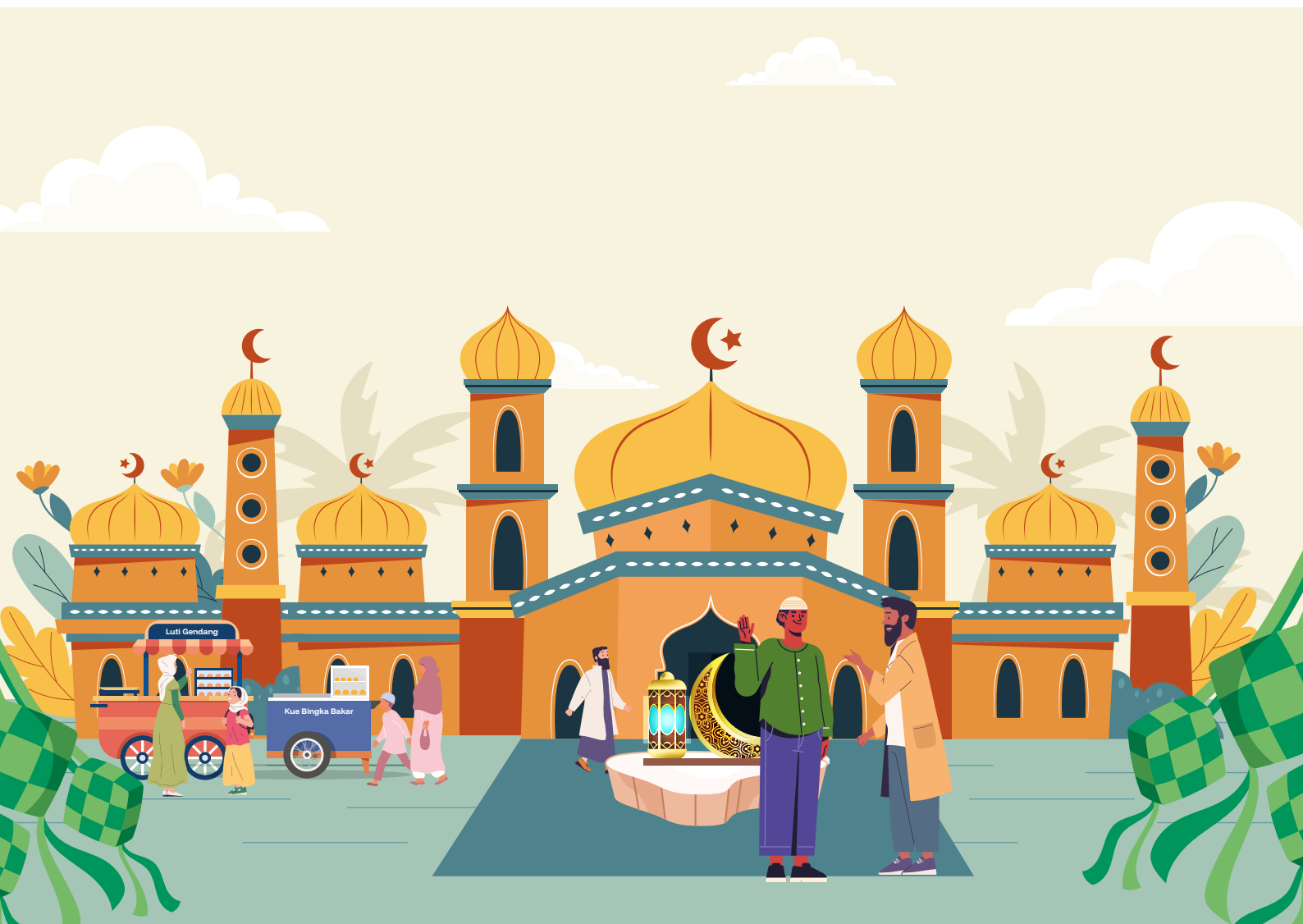


Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

FEBRUARI 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Februari 2026

TRIWULANAN
Oktober 2025 – Desember 2025
(Terbit Februari 2026)
Triwulan IV 2025

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Februari 2026

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

Tim Penulis

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam – Indonesia

Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode Februari 2026 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dan Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Keuangan atas kerja sama dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini. Harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

Batam, Februari 2026
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

TTD

Rony Widijarto P.
Direktur

Daftar Isi

Tim Perumusan KEKDA Provinsi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Lampiran	67



Bab I	
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN	3
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2 Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB	5
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor	5
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	6
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	7
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi	8
1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	8
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	8
BOKS 1	9
Tangguh dan Mandiri:	
Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan	

Bab II	
Perkembangan Keuangan Daerah	13
2.1 REALISASI PENDAPATAN	15
2.2 REALISASI BELANJA	16
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI	18

Bab III	
Perkembangan Inflasi	21
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	24
3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN	25
3.2.1 Inflasi Kota Batam	25
3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang	25
3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun	26
3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	26
3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	27
BOKS 2	29
Laporan <i>Liaison</i> Triwulan IV 2025 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	

Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	33
4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI	35
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan	35
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	36
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	36
4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	38
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	38
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	38
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	38
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	40



Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	41
5.1.1	Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	43
5.1.2	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	43
5.1.3	Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	44
5.2	TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	44
5.2.1	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	44
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	44
5.2.3	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	45
5.2.4	Perkembangan QRIS	45
5.2.5	Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	46
5.2.6	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	47
5.2.7	Bantuan Sosial Nontunai	47
5.3	TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR	47
5.3.1	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	48
5.3.2	Perkembangan Transaksi PJP LR	48
5.3.3	Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau	48

BOKS 3

Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri

51

Bab VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan 55

6.1	KETENAGAKERJAAN	57
6.1.1	Ketenagakerjaan	57
6.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	58
6.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	58
6.2.2	Kemiskinan	59
6.2.3	Gini Ratio (GR)	59
6.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60

Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah 61

7.1	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI	63
7.2	PROSPEK INFLASI	64
7.3	Rekomendasi	65

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	7
Tabel B1.1	Penerima Gurindam Award 2025	10
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025	16
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025	17
Tabel 2.3	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	19
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri	20
Tabel 3.1	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)	23
Tabel 3.2	Penyumbang Inflasi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025	23
Tabel 3.3	Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025	23
Tabel 3.4	Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025	23
Tabel 3.5	Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025	24
Tabel 3.6	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)	24
Tabel 3.7	Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)	26
Tabel B3.1	<i>Likert Scale</i> Tahun TW I 2023 s.d TW IV 2025 di Kepri	29
Tabel 4.1	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	35
Tabel 4.2	Penyaluran Kredit (Spasial)	38
Tabel 4.3	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	40
Tabel 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	57
Tabel 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	57
Tabel 6.3	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	58
Tabel 6.4	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	58
Tabel 6.5	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	59
Tabel 6.6	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	59
Tabel 6.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	60
Tabel 6.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	60
Tabel 7.1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025	64
Tabel 7.2	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025	65

Daftar Gambar

Gambar B3.1	Rangkaian Kegiatan <i>Kick Off</i> SERAMBI 2026 di KPw BI Provinsi Kepulauan Riau	52
Gambar B3.2	Sambutan Kepala Perwakilan Acara <i>Kick Off</i> SERAMBI 2026	52
Gambar B3.3	Pelepasan Mobil Kas Keliling BI, BNI, BRI, BTN, Mandiri, BRK Syariah, BSI, Maybank, CIMB NIAGA dan Bank BJB	53

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	3
Grafik 1.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3
Grafik 1.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	4
Grafik 1.5	Konsumsi Listrik Rumah Tangga	4
Grafik 1.6	Realisasi Belanja APBD	4
Grafik 1.7	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri	5
Grafik 1.8	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5
Grafik 1.9	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	5
Grafik 1.10	Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri	5
Grafik 1.11	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	5
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin, dan Produk Kapal	6
Grafik 1.13	<i>Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Electronic, & Optical Products</i>	6
Grafik 1.14	Perkembangan Impor	6
Grafik 1.15	Perkembangan Impor Nonmigas - BEC	6
Grafik 1.16	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	7
Grafik 1.17	Konsumsi Listrik Industri	7
Grafik 1.18	Perkembangan Impor Bahan Baku	8
Grafik 1.19	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	8
Grafik 1.20	Kredit Sektor Perdagangan	8
Grafik 1.21	SBT Perdagangan	8
Grafik 1.22	Perkembangan Ekspor Migas	8
Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025	15
Grafik 2.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025	15
Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	16
Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2025	17
Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2025	17
Grafik 2.6	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	18
Grafik 3.1	Inflasi Triwulan IV 2025 Regional Sumatera (% yoy)	24
Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan IV 2025 (% yoy)	24
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)	25
Grafik B3.1	Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik	30
Grafik B3.2	LS Kapasitas Utilisasi & Persediaan	30
Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	36
Grafik 4.2	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	36
Grafik 4.3	Perkembangan DPK Perbankan	36
Grafik 4.4	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	36
Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Perbankan	36
Grafik 4.6	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	36
Grafik 4.7	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	37
Grafik 4.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit	37
Grafik 4.9	Kredit Sektor Industri Pengolahan	37
Grafik 4.10	Kredit Konstruksi	37
Grafik 4.11	Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri	38
Grafik 4.12	Perkembangan Kredit Korporasi	38
Grafik 4.13	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	38
Grafik 4.14	Survei Ekspektasi Konsumen	39
Grafik 4.15	Survei Indeks Penghasilan Konsumen	39
Grafik 4.16	Kredit Rumah Tangga	39
Grafik 4.17	Kredit Konsumsi	39
Grafik 4.18	DPK Perseorangan	39
Grafik 4.19	Pangsa DPK Perseorangan	39
Grafik 4.20	Perkembangan Kredit UMKM	40
Grafik 5.1	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Kepri	43
Grafik 5.2	Perkembangan Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	43
Grafik 5.3	Perkembangan Pemusnahan UTLE	44
Grafik 5.4	Perkembangan Temuan Uang Palsu	44

Daftar Grafik

Grafik 5.5	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	44
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	44
Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	45
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	45
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	45
Grafik 5.10	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kab/ Kota di Provinsi Kepri triwulan IV 2025	46
Grafik 5.11	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kelompok Usaha triwulan IV 2025	46
Grafik 5.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	46
Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	46
Grafik 5.14	Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.15	Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.16	Penyaluran Program Sembako Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.17	Perkembangan Transaksi KUPVA	48
Grafik 5.18	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	48
Grafik 5.19	Perkembangan Transaksi Pada PJP LR	48
Grafik 5.20	Jumlah Pengaduan Pelindungan Konsumen Sepanjang Tahun 2025	49
Grafik 6.1	Perkembangan NTP	58
Grafik 6.2	NTP Berdasarkan Subsektor	58
Grafik 6.3	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Provinsi Kepri	60
Grafik 6.4	<i>Gini Ratio</i> Provinsi di Wilayah Sumatera	60
Grafik 6.5	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	60
Grafik 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	63
Grafik 7.2	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	63
Grafik 7.3	<i>Likert Scale</i> Perkiraan Penjualan Domestik	64
Grafik 7.4	<i>Likert Scale</i> Perkiraan Investasi	64

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh 7,89% (yoy), lebih tinggi triwulan sebelumnya yakni 7,48% (yoy).

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,89% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,54% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional. Adapun secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94% (ctc).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh Net Ekspor, PMTB, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi LU, pertumbuhan ekonomi didukung oleh LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai triwulan IV 2025 tercatat melandai dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan IV 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2024 yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Modal dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemda yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Hibah, serta Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.

Tekanan Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan IV 2025 masih berada dalam target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan IV 2025 terjaga dan tumbuh positif dibanding triwulan sebelumnya

Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2025 tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut tercermin dari laju penyaluran kredit dan aset yang meningkat dan disertai dengan risiko kredit yang membaik.

Ringkasan Eksekutif

Sejalan dengan perningkatan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Selain itu, transaksi pembayaran non-tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.

Prospek perekonomian global diperkirakan cenderung stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini diperkirakan didorong oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik. Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, serta membaiknya ekspektasi masyarakat. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh melambat didorong oleh normalisasi pasca realisasi yang tinggi pada 2025 (*base effect*).

Inflasi Kepri pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Transaksi pembayaran tunai di Provinsi Kepri tumbuh positif dan terakselerasi pada triwulan IV 2025. Selain itu, transaksi non-tunai juga tercatat mengalami peningkatan

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan

Perekonomian global diperkirakan cenderung stagnan. Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga

Tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terjaga yang didukung oleh normalisasi harga pangan, perbaikan rantai pasokan, dan sinergi TPID dan GPIPS

BAB I

Perkembangan Ekonomi Prov. Kepulauan Riau

Pertumbuhan Ekonomi



7,89%

Tw IV 2025

7,48%

Tw III 2025

Konsumsi RT



4,17%

Tw IV 2025

4,12%

Tw III 2025

Investasi



6,24%

Tw IV 2025

9,05%

Tw III 2025

Net Ekspor



27,02%

Tw IV 2025

16,74%

Tw III 2025

Konsumsi Pemerintah



3,72%

Tw IV 2025

-2,34%

Tw III 2025

Industri Pengolahan



8,89%

Tw IV 2025

6,82%

Tw III 2025

Perdagangan



7,57%

Tw IV 2025

5,54%

Tw III 2025

Pertambangan



18,67%

Tw IV 2025

19,83%

Tw III 2025

Konstruksi



4,11%

Tw IV 2025

5,71%

Tw III 2025

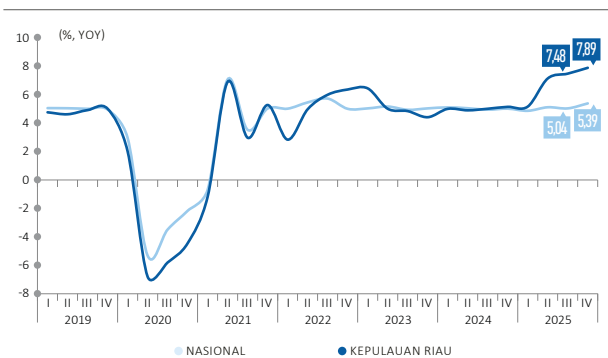
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,89% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,54% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional. Secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94% (ctc).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.



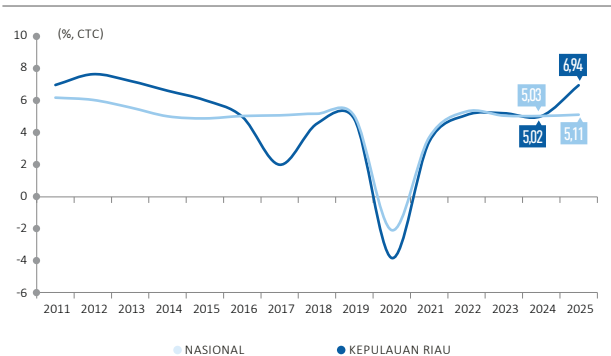
Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp59.767,12 miliar atau tumbuh 7,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,48% (yoy). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh kuatnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tumbuh 4,54% (yoy) maupun capaian nasional yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di regional Sumatera dicapai oleh Kepri, Sumatera Selatan, dan Lampung masing-masing sebesar 7,89% (yoy), 5,54% (yoy), dan 5,54% (yoy). Adapun pangsa PDRB Kepri triwulan IV 2025 terhadap regional Sumatera tercatat sebesar 7,57%, atau terbesar kelima setelah Sumatera Utara (23,52%), Riau (22,79%), Sumatera Selatan (13,61%) dan Lampung (9,78%).



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)



Sumber : BPS (data diolah) kumulatif s.d Tw III

Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)

1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Distribusi perekonomian Kepri pada triwulan IV 2025 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 43,99%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 39,82% dari total PDRB. Tingginya pangsa komponen investasi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha khususnya pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan barang modal serta investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga relatif besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan tetap tumbuh positif sejalan dengan aktivitas pariwisata pada periode HBKN Nataru di triwulan IV.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 8,37%, sejalan dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Adapun konsumsi pemerintah menempati pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 6,39%, didukung oleh berlanjutnya realisasi belanja pemerintah untuk program-program strategis.

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (% , qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (% , qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (% , ctc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (% , ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	4,46	▼ -1,61	1,71	▼ -0,05	4,62	▼ 2,97	4,92
2	Sumatera Utara	4,55	▼ 4,23	2,11	▼ 0,13	4,63	▼ 4,53	23,52
3	Sumatera Barat	3,36	▼ 1,69	-0,10	▼ 0,39	3,94	▲ 3,37	6,62
4	Riau	4,98	▼ 4,94	3,54	▼ 0,12	4,74	▼ 4,79	22,79
5	Jambi	4,77	▲ 5,24	2,17	▼ 1,30	4,78	▲ 4,93	6,73
6	Sumatera Selatan	5,20	▲ 5,54	2,25	▼ -1,53	5,28	▲ 5,35	13,61
7	Bengkulu	4,56	▲ 4,79	-2,97	▼ 3,34	4,80	▲ 4,80	2,16
8	Lampung	5,04	▲ 5,54	0,69	▼ -3,05	5,19	▲ 5,28	9,78
9	Kep. Bangka Belitung	3,21	▲ 4,54	-1,70	▲ 4,87	3,95	▲ 4,09	2,30
10	Kepulauan Riau	7,48	▲ 7,89	0,85	▲ 7,35	6,60	▼ 6,94	7,57
SUMATERA		4,90	▼ 4,54	1,81	▼ 0,36	4,90	▼ 4,81	100,00

▲ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

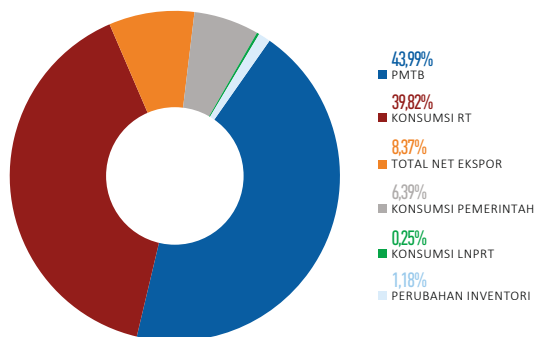
Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2023					2024					2025					Total	ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Konsumsi RT	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,10	3,06	4,53	3,15	3,90	4,12	4,17	3,84	▲	
2. Konsumsi LNPRT	0,65	5,40	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	2,03	9,02	-0,99	7,49	3,51	9,46	4,82	▲	
3. Konsumsi Pemerintah	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	34,37	18,49	7,51	-6,16	8,36	4,30	-22,07	-2,34	3,72	-4,28	▲	
4. PMTB (Investasi)	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	3,27	8,70	9,05	6,24	6,81	▼	
5. Perubahan Inventori	212,70	718,19	42,78	61,52	0,12	-213,45	-198,09	-273,92	-46,36	-37,43	-5,87	-6,09	55,46	-11,15	-36,93	▼	
6. Total Net Ekspor	4,81	8,80	-3,49	-19,01	-1,82	1,23	-23,18	16,84	29,58	3,42	14,53	25,35	16,74	27,02	20,52	▲	
a. Total Ekspor	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-0,44	4,92	2,17	18,48	6,22	18,79	20,62	11,47	8,42	14,52	▼	
b. Total Impor	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-0,64	8,36	0,89	17,60	6,50	19,30	20,21	10,94	6,80	13,94	▼	
PERTUMBUHAN PDRB	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	5,16	7,14	7,48	7,89	6,94	▲	

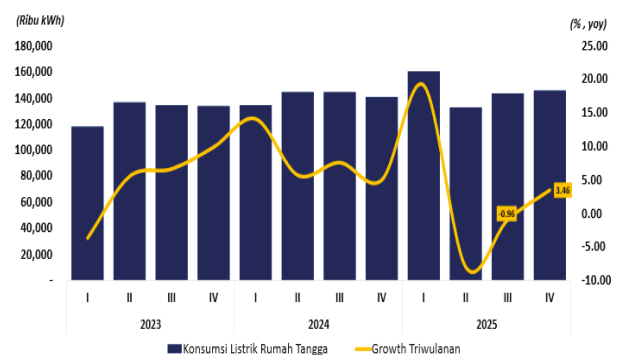
▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran

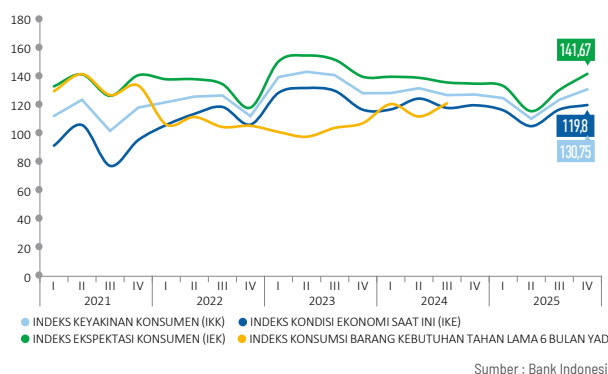


Sumber : PLN Persero (data diolah)

Grafik 1.5 Konsumsi Listrik Rumah Tangga

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,12% (yoy). Akselerasi konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dari 123,50 pada triwulan III 2025 menjadi 130,75 pada triwulan IV 2025. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat yang semakin kuat terhadap kondisi perekonomian saat ini. Selain itu, peningkatan konsumsi RT juga terindikasi dari membaiknya konsumsi listrik RT, dari sebelumnya terkontraksi 0,96% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 3,46% (yoy). Lebih lanjut, akselerasi konsumsi RT pada triwulan IV 2025 juga didukung oleh momen libur HBKN Nataru dan aktivitas pariwisata yang mendorong belanja masyarakat.



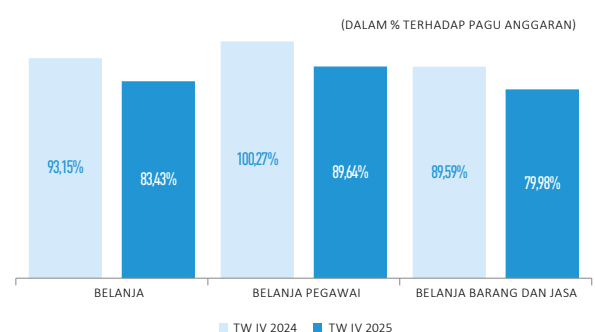
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

1.1.2 Konsumsi Pemerintah

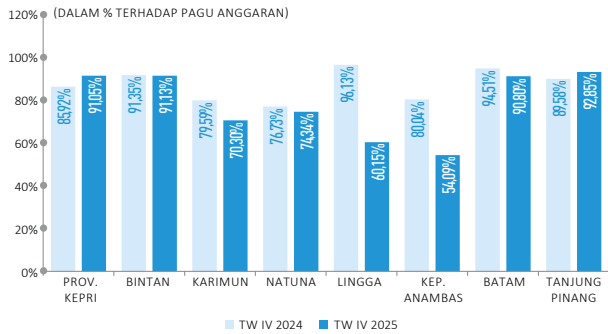
Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 3,72% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,34% (yoy). Perbaikan tersebut sejalan dengan realisasi belanja modal di akhir tahun sebelum periode tutup tahun anggaran. Peningkatan realisasi belanja terjadi pada APBD Provinsi Kepri dan APBD Kota Tanjungpinang, yang masing-masing mencatatkan realisasi APBD hingga Desember 2025 sebesar 91,05% dan 92,85% dari pagu belanja.

Di sisi lain, realisasi belanja seluruh Pemda di Kepri pada tahun 2025 menurun secara agregat menjadi sebesar 83,43% dari tahun 2024 yang realisasi belanja sebesar 93,15% dari pagu



Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

Grafik 1.6 Realisasi Belanja APBD



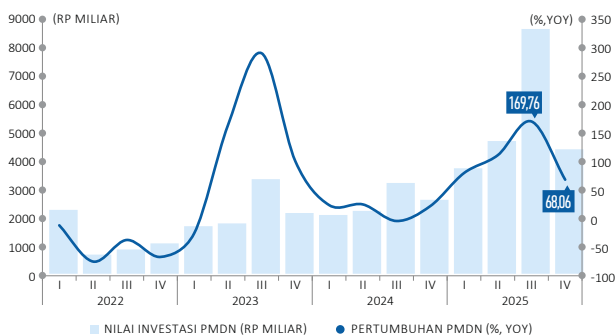
Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

Grafik 1.7 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri

anggaran. Secara spasial, sebagian Pemda Kepri mencatat penurunan realisasi belanja pada triwulan IV 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya, diantaranya terjadi di Kabupaten Bintan yang menurun dari 91,35% menjadi 91,13%, Kabupaten Karimun yang menurun dari 79,59% menjadi 70,30%, Kabupaten Natuna dari 76,73% menjadi 74,34%, Kabupaten Lingga dari 96,13% menjadi 60,15%, Kabupaten Kepulauan Anambas dari 80,04% menjadi 54,09%, serta Kota Batam dari 94,51% menjadi 90,80%.

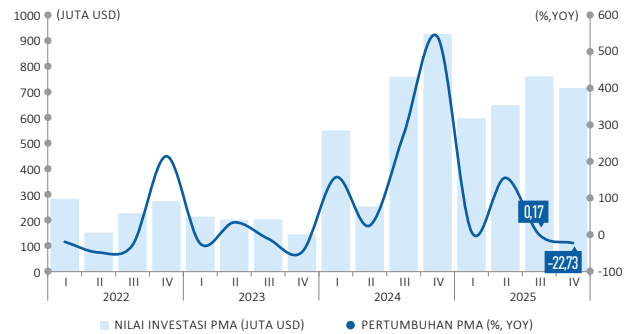
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 6,24% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,05% (yoy). Deselerasi tersebut sejalan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh sebesar 68,06% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 169,76% (yoy). Penanaman Modal Asing (PMA) juga melambat dari yang sebelumnya tumbuh sebesar 0,17% (yoy), menjadi terkontraksi sebesar 22,73% (yoy). Meskipun terjadi pelambatan, keberlanjutan perkembangan PMDN dan PMA menunjukkan bahwa Kepri tetap menjadi salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia.



Sumber: BKPM (data diolah)

Grafik 1.8 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

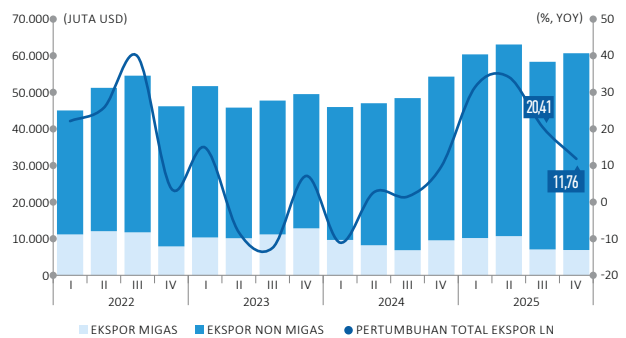


Sumber: BKPM (data diolah)

Grafik 1.9 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

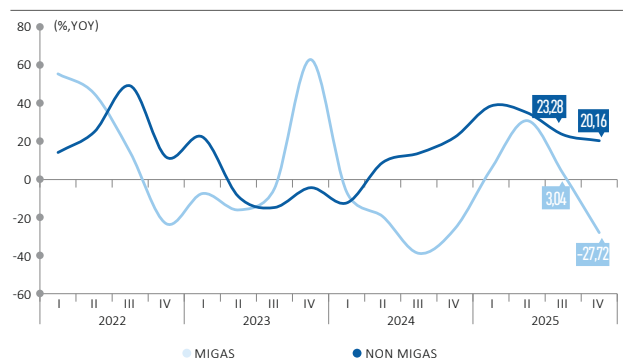
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor

Komponen net ekspor Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 27,02% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,74% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Ekspor tumbuh sebesar 8,42% (yoy), atau terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,47% (yoy). Sementara itu, impor juga tumbuh sebesar 6,80% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 10,94% (yoy). Ekspor yang terdeselerasi sejalan dengan nilai total ekspor (migas dan nonmigas) pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 11,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,41% (yoy).



Sumber: BPS (data diolah)

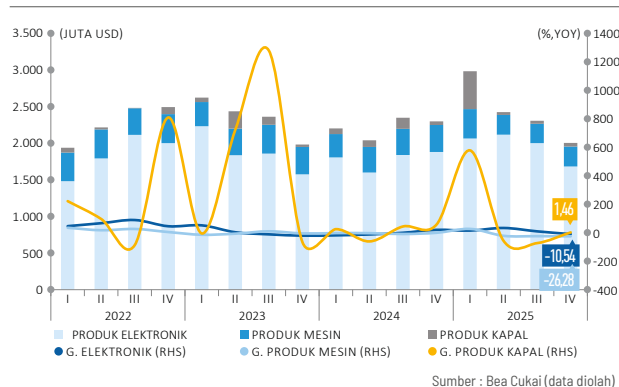
Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri



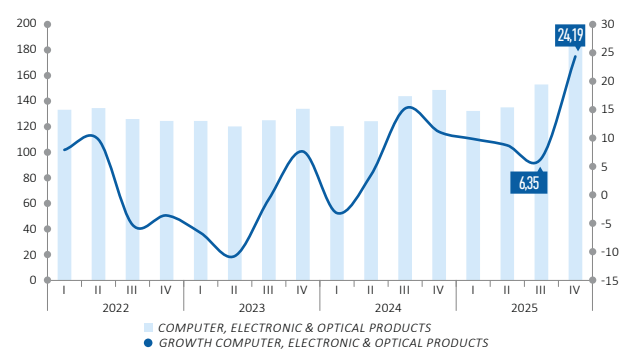
Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.11 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terdeselerasi sejalan dengan melambatnya ekspor migas dan normalisasi ekspor produk elektronik. Secara nominal, ekspor migas pada triwulan IV 2025 berkontraksi 27,72% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,04% (yoy). Nominal ekspor produk elektronik juga menurun, dari 8,72% (yoy) menjadi berkontraksi 10,54% (yoy), sejalan dengan normalisasi pasca fenomena *frontloading* di triwulan sebelumnya akibat dinamika tarif resiprokal. Lebih lanjut, kinerja ekspor produk mesin turut mengalami perlambatan. Nominal ekspor produk mesin pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 26,28% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 25,25% (yoy). Namun demikian, nominal ekspor produk kapal mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 1,46% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 73,59% (yoy). *Index of Industrial Production (IIP)* Singapura untuk *Computer, Electronic, & Optical Products* mengalami perbaikan pada triwulan IV, dari yang sebelumnya tumbuh 6,35% (yoy) menjadi 24,19% (yoy). Hal ini mengkonfirmasi kinerja net ekspor Kepri yang membaik didukung oleh permintaan yang tetap terjaga dari negara importir utama, yaitu Singapura.

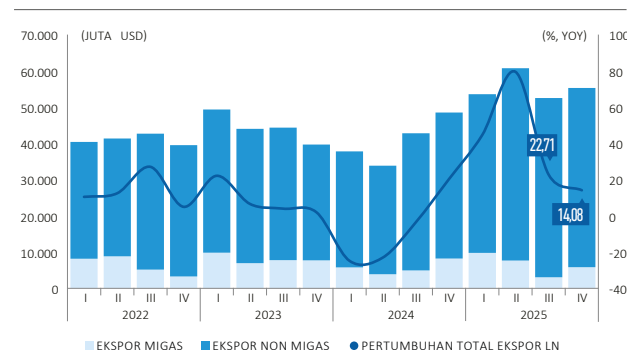


Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin, dan Produk Kapal

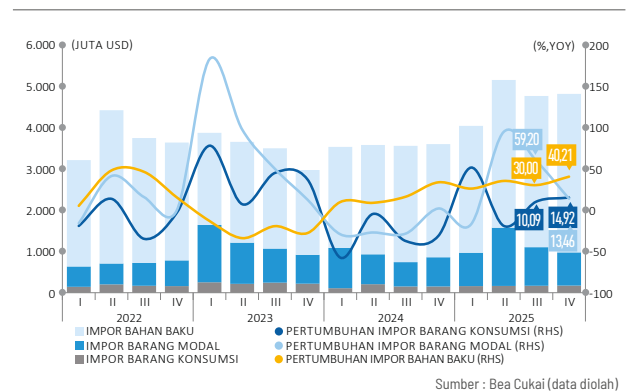


Grafik 1.13 *Index of Industrial Production (IIP)* Singapura untuk *Computer, Electronic, & Optical Products*

Sejalan dengan arah pertumbuhan ekspor yang melambat, PDRB impor turut mengalami deselerasi. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 14,08% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,71% (yoy). Melambatnya impor terutama disebabkan oleh penurunan impor barang modal. Nilai impor barang modal pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,46% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 59,20% (yoy). Di sisi lain, impor bahan baku tumbuh sebesar 40,21% (yoy), mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 30,00% (yoy). Lebih lanjut, Impor barang konsumsi turut tumbuh sebesar 14,92% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,09% (yoy).



Grafik 1.14 Perkembangan Impor

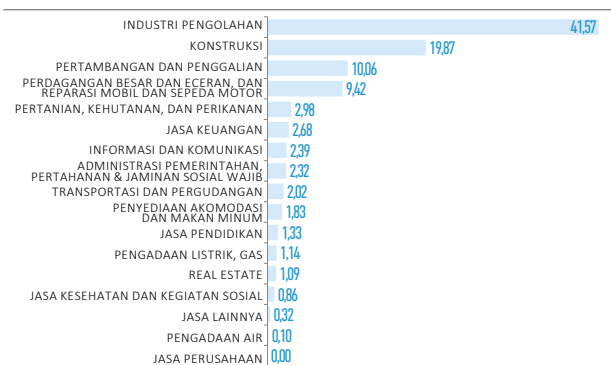


Grafik 1.15 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja sektor industri dan perdagangan yang tetap kuat serta terakselerasi pada triwulan IV 2025 mampu mendorong kinerja PDRB secara keseluruhan. Kinerja positif ekonomi Kepri utamanya ditopang oleh tumbuhnya LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan.

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 41,57%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 19,87%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 10,06% dan 9,42%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap baik sejalan dengan masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik. LU Konstruksi juga masih tumbuh sejalan dengan masih berlanjutnya sejumlah pembangunan infrastruktur. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian juga tumbuh positif sejalan dengan beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepri. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat.

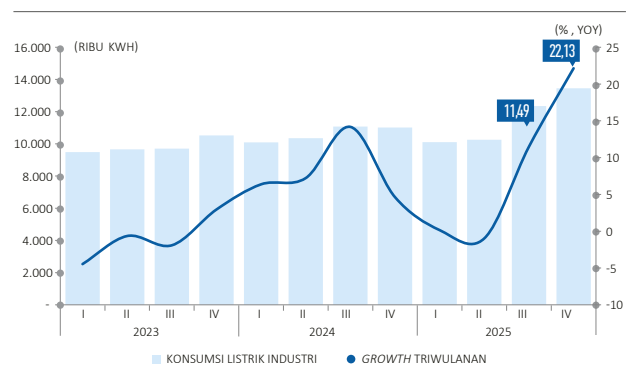


Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.16 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)

1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 8,89% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,82% (yoy) dan memberikan andil 3,71% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang meningkat tercermin dari peningkatan impor bahan baku yang tumbuh sebesar 40,21% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 30,00% (yoy). Selanjutnya, kuatnya kinerja industri pengolahan tercermin dari tingginya konsumsi listrik industri yang tumbuh 22,13% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,49% (yoy).



Sumber : PLN Persero (data diolah)

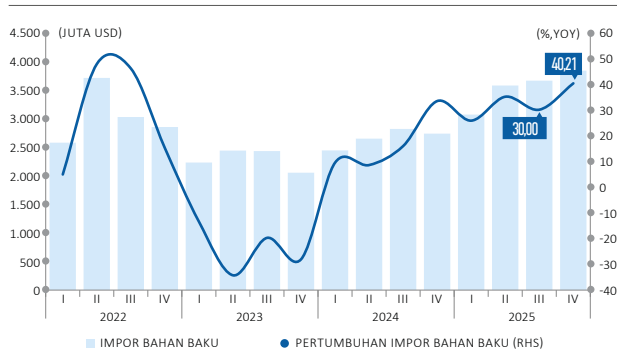
Grafik 1.17 Konsumsi Listrik Industri

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

PDRB Sisi Lapangan Usaha	2023					2024					2025				Total	ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	-2,32	-5,92	6,96	1,53	5,05	3,31	-3,76	-2,08	0,57	-2,75	13,40	19,80	-13,42	3,49	▼
Pertambangan dan Penggalian	-15,04	-0,51	3,69	2,61	-2,65	-4,69	-25,84	-5,01	7,43	-7,83	0,99	24,21	19,83	18,67	16,01	▼
Industri Pengolahan	7,71	-0,27	0,62	1,83	2,46	3,86	13,35	7,76	6,64	7,77	7,30	6,96	6,82	8,89	7,52	▲
Pengadaan Listrik, Gas	12,08	11,03	7,05	2,67	8,03	5,13	7,74	6,85	9,01	7,20	2,70	9,71	15,63	12,99	10,37	▼
Pengadaan Air	11,53	-3,28	0,07	10,42	4,45	8,55	7,89	-5,50	-1,65	1,98	7,33	16,89	14,56	8,51	11,70	▼
Konstruksi	6,74	10,31	13,74	10,94	10,49	13,89	7,58	2,06	1,02	5,75	3,84	7,75	5,71	4,11	5,30	▼
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,49	2,28	10,03	6,03	5,87	4,79	2,24	4,84	10,66	5,59	10,29	6,96	5,54	7,57	7,55	▲
Transportasi dan Pergudangan	33,07	21,77	9,94	-0,22	14,92	0,86	2,49	0,79	5,94	2,51	3,57	6,27	12,94	6,04	7,18	▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,70	44,71	13,28	-4,58	27,31	-5,98	2,74	13,16	8,31	4,21	2,47	-0,63	5,35	4,41	2,87	▼
Informasi dan Komunikasi	24,53	51,60	13,91	0,43	19,96	2,30	4,18	1,68	-8,54	-0,06	-5,98	-8,96	-4,52	10,59	-2,65	▲
Jasa Keuangan	4,94	12,83	7,99	9,10	8,65	8,24	10,22	9,83	1,70	7,41	5,05	0,15	-0,65	12,16	4,11	▲
Real Estate	11,35	7,51	2,63	0,12	5,25	2,85	4,50	8,53	6,58	5,59	-0,13	11,38	6,23	5,28	5,71	▼
Jasa Perusahaan	35,59	28,90	11,80	2,81	18,32	-4,29	-1,39	6,90	18,80	5,05	26,89	25,03	12,58	5,34	16,70	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,03	3,39	-3,21	12,20	5,13	25,50	15,75	32,83	3,93	17,86	8,10	-15,16	-0,15	6,15	-1,46	▲
Jasa Pendidikan	8,82	7,44	-0,54	0,15	3,87	-1,74	-3,46	2,98	18,16	3,94	9,01	6,07	6,68	1,03	5,48	▼
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	-7,37	-23,87	7,06	-4,82	7,07	30,72	31,53	13,87	19,60	9,04	-0,07	4,74	-2,12	2,67	▼
Jasa lainnya	37,38	8,79	27,56	21,09	21,51	9,99	1,80	26,93	26,89	15,95	16,41	-3,27	-5,98	4,28	1,96	▲
PERTUMBUHAN PDRB	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	5,16	7,14	7,48	7,89	6,94	▲

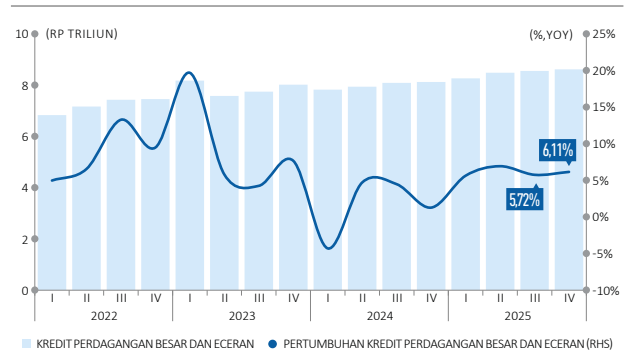
▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.18 Perkembangan Impor Bahan Baku

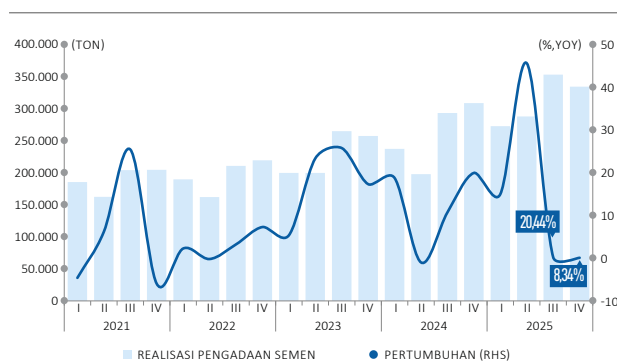


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.20 Kredit Sektor Perdagangan

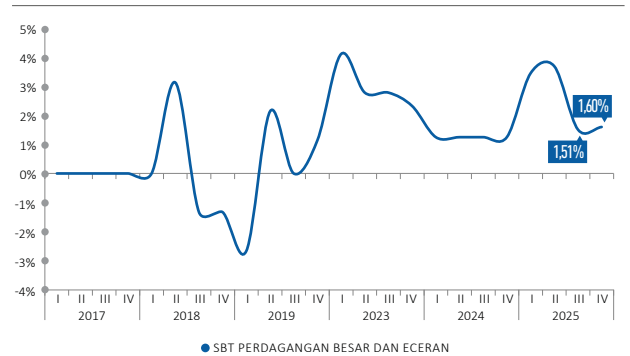
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,11% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,71% (yoy). Melambatnya kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari melambatnya penjualan semen di triwulan IV yang tercatat tumbuh 8,34% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,44%. Meskipun demikian, kinerja LU Konstruksi yang tetap positif didukung oleh pembangunan sejumlah ruas jalan serta Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang masih terus berlanjut.



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (data diolah)

Grafik 1.19 Perkembangan Pengadaan/ Penjualan Semen

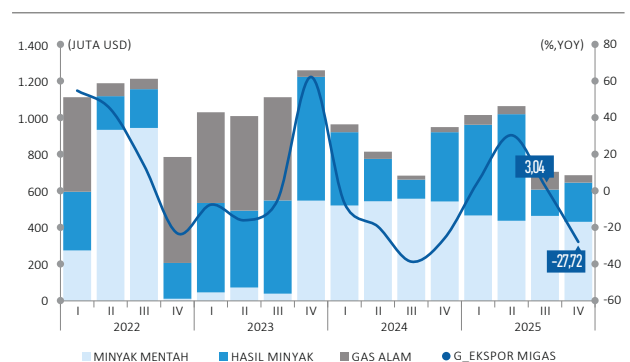


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.21 SBT Perdagangan

1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan

Pada triwulan IV 2025 kinerja LU Pertambangan dan Penggalan tumbuh sebesar 18,67% (yoy), atau mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 19,83% (yoy). LU Pertambangan yang tumbuh melambat ditunjukkan oleh ekspor migas yang juga tumbuh melambat dan berkontraksi sebesar 27,72% (yoy), terutama akibat ekspor hasil minyak yang turun dari sebelumnya tumbuh 37,23% (yoy) menjadi berkontraksi sebesar 43,36% (yoy). Ekspor minyak mentah dan ekspor gas alam juga mengalami perlambatan dari yang sebelumnya tumbuh masing-masing sebesar -16,69% (yoy) dan 333,22% (yoy) menjadi -20,51% (yoy) dan 45,49% (yoy) pada triwulan IV 2025.



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.22 Perkembangan Ekspor Migas

1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit sektor perdagangan yang meningkat dari 5,72% (yoy) menjadi 6,11% (yoy). Lebih lanjut, peningkatan pada LU perdagangan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menghasilkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor perdagangan sebesar 1,60%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,51%. Penguatan kinerja lapangan usaha perdagangan utamanya didorong oleh masifnya aktivitas dan mobilisasi masyarakat pada periode HBKN Nataru.

BOKS 1

Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan

Arah kebijakan: Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 diselenggarakan pada 28 November 2025 dengan tema **“Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”**. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap mewaspadai ketidakpastian global yang tinggi.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9–5,7% dan 5,1–5,9% didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat, serta ekspor yang cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Inflasi akan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, eratnya sinergi pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat. Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diwaspadai, yakni berlanjutnya kebijakan tarif AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan *stablecoins* pihak swasta.

Sinergi merupakan prasyarat dalam memperkuat transformasi ekonomi nasional agar pertumbuhan dapat lebih tinggi dan berdaya tahan. Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, yang meliputi lima area penting, yakni: (i) memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan; (ii) mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan; (iii) meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan; (iv) mengakselerasi digitalisasi ekonomi-keuangan nasional; serta (v) memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

KALEIDOSKOP 2025 DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN KEPRI 2026

Pada 2025, Akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berlanjut. **Ekonomi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,89% (yoy)**, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy) serta tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,54% (yoy). Secara kumulatif, ekonomi Kepri pada tahun 2025 tumbuh sebesar 6,94% (ctc). Capaian ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera yang tercatat sebesar 4,81% (ctc) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025 terutama didorong oleh empat Lapangan Usaha (LU) yakni Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, serta Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing tumbuh sebesar 7,52% (ctc), 5,30% (ctc), 16,01% (ctc), dan 7,55% (ctc). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi didukung oleh kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor, dan Konsumsi RT yang tumbuh sebesar 6,81% (ctc), 20,52% (ctc), dan 3,84% (ctc).

Di tengah kinerja ekonomi yang tetap solid, inflasi Kepri masih terjaga stabil dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$. Pada 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 3,47% (yoy). Terkendalnya inflasi mencerminkan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kepri yang dijalankan secara konsisten melalui strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, dan Komunikasi Efektif.

Pertumbuhan ekonomi yang positif disertai dengan terjaganya inflasi tersebut turut didukung oleh kinerja perbankan di Kepri. Peran intermediasi yang dijalankan perbankan untuk mendukung perekonomian tercermin dari perkembangan kredit, aset, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap tumbuh di tengah rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang rendah, sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di Kepri.

Sistem pembayaran dan ekosistem digitalisasi keuangan juga terus diperkuat. Selain mendukung memastikan ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) ke seluruh wilayah Kepri, Bank Indonesia juga mendorong perluasan digitalisasi melalui penyediaan infrastruktur QRIS, BI-Fast, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), serta uang elektronik. Pertumbuhan jumlah pengguna, *merchant*, volume, dan nominal transaksi QRIS mencerminkan akselerasi digitalisasi masyarakat Kepri. Lebih lanjut, Bank Indonesia Kepri secara aktif mempromosikan QRIS *cross-border* untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi lintas negara, khususnya guna mendukung peningkatan transaksi di sektor pariwisata mengingat lokasi strategis yang dimiliki oleh Kepri yang langsung berbatasan dengan sejumlah negara tetangga.

Sinergi dan kolaborasi lintas instansi, OPD, dan lembaga terus diperkuat sepanjang tahun 2025. Bank Indonesia hadir di daerah sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), menjaga stabilitas inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta memperluas digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Sinergi dan kolaborasi tersebut juga telah diwujudkan melalui sejumlah *event* strategis. Dukungan terhadap ekonomi syariah dilakukan melalui Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) yang menghasilkan total penjualan sebesar Rp2,98 Milyar dan melibatkan 98 UMKM syariah. Pengembangan UMKM dioptimalkan dengan terselenggaranya Gebyar Melayu Pesisir (GMP) dengan realisasi penjualan mencapai Rp13,70 Milyar dan komitmen *business matching* pembiayaan sebesar Rp3,25 Milyar. Adapun perluasan digitalisasi didukung dengan kegiatan *Creative & Innovative Riau Islands Carnival* (CERNIVAL) dengan transaksi QRIS mencapai sebanyak 126.353 kali transaksi.

Ke depan, prospek perekonomian Nasional dan Kepri masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari ketidakpastian global yang belum mereda dan dinamika kebijakan perdagangan internasional. Oleh karena itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus dipererat untuk memperkuat daya tahan perekonomian serta memperkuat transformasi ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas inflasi, yang dapat dicapai antara lain melalui langkah-langkah sebagai berikut: (a) Memperkuat iklim investasi melalui optimalisasi Kawasan Industri, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri sebagai magnet bagi investor, sekaligus memperluas diversifikasi pasar ekspor untuk meningkatkan daya saing global; (b) Mendukung potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah antara lain pada sektor maritim dan pariwisata; serta (c) Memastikan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi

Pangan (GNPIP) berjalan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau memprakirakan perekonomian Kepri berada pada rentang 6,38 s.d 7,18% (yoy) di tahun 2026. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kepri tetap kuat pada tahun mendatang. Sementara itu, tingkat inflasi juga diprakirakan berada di dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy) pada tahun 2026.

Lebih lanjut, Gubernur Kepri yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kepri menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri yang tetap tinggi dan berkelanjutan, disertai inflasi yang terjaga. Selain itu, diharapkan digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan stabilitas keuangan semakin berkembang, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, termasuk upaya pengembangan UMKM yang terus didorong. Seluruh capaian tersebut diyakini dapat terwujud melalui sinergi yang erat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia menganugerahkan Gurindam Award 2025 kepada delapan mitra strategis yang terdiri dari instansi, perbankan, korporasi, dan UMKM sebagai apresiasi atas kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sepanjang tahun 2025. Penghargaan ini mencerminkan sinergi yang terjalin antara Bank Indonesia dan para mitra strategis dalam memperkuat ketahanan serta mendorong kebangkitan ekonomi di Provinsi Kepri.

Tabel B1.1 Penerima Gurindam Award 2025

No.	Kategori Gurindam Award	Penerima Award
1	Stakeholder Pendukung Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Wilayah 3T Kepulauan Riau	Komando Daerah Angkatan Laut IV (Kodamral IV) Batam
2	Stakeholder Pendukung Elektronifikasi Sektor Transportasi	UPT Trans Batam Dinas Perhubungan Kota Batam
3	Klaster Unggulan Produktivitas	Kelompok Petani Muda Natuna
4	UMKM Pencapaian Ekspor Terbaik	Kenara
5	Perguruan Tinggi Mitra Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia	Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
6	Mitra Strategis Terbaik dalam Pengembangan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau	PT Sat Nusapersada Tbk
7	Stakeholder Kontributor Terbaik dalam Sinergi Kajian Perekonomian Provinsi Kepri	Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
8	Stakeholder Pendukung Penyusunan Asesmen Daerah Terkooperatif	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau





BAB II

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw IV
2025

85,19%
Rp12,65 T

Tw IV
2024

94,66%
Rp14,01 T

Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw IV
2025

83,43%
Rp12,81 T

Tw IV
2024

93,15%
Rp14,36 T

Realisasi Belanja APBN



Tw IV
2025

92,74%
Rp15,21 T

Tw IV
2024

96,16%
Rp17,92 T

Realisasi Belanja Infrastruktur APBN



Tw IV
2025

75,28%
Rp823,19 M

Tw IV
2024

96,28%
Rp1,76 T



Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan IV 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2024 yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Modal dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemda yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Hibah, serta Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.



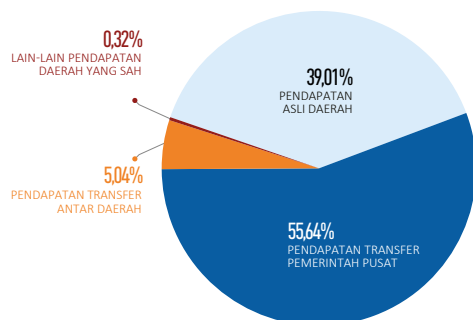
Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar 85,19%, sementara realisasi belanja mencapai 83,43% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 94,66%, sedangkan realisasi juga belanja lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 93,15%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, realisasi pos Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami kenaikan dibandingkan triwulan IV tahun 2024. Di sisi lain, penurunan realisasi belanja utamanya disebabkan oleh penurunan pada pos Belanja Modal dan Belanja Transfer, namun penurunan lebih dalam tertahan oleh kenaikan realisasi Belanja Tidak Terduga yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di Kepri pada triwulan IV 2025 mencapai 85,19% dari pagu anggaran atau sebesar Rp12,65 triliun.

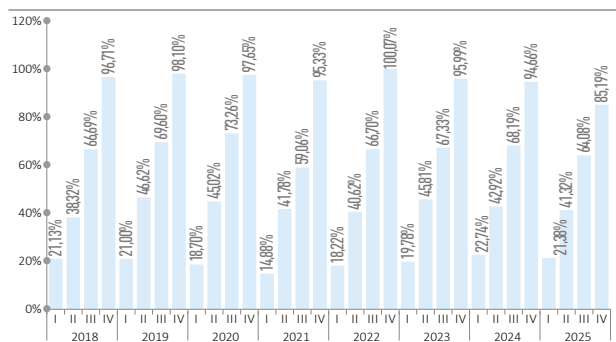
Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 94,66% dari pagu anggaran atau sebesar Rp14,01 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari melemahnya realisasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan PAD. Meskipun demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan dengan meningkatnya persentase pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan IV 2025 mencapai Rp7,01 triliun atau sebesar 81,89% dari pagu anggaran. Komponen ini memiliki pangsa anggaran pendapatan dengan porsi terbesar yakni sebesar 56,09% dari pagu anggaran dengan capaian realisasi terbesar yaitu mencapai 55,45% dari total realisasi. Secara persentase, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 93,98% dari pagu. Penurunan terjadi pada semua pos sub anggaran pendapatan yaitu pos Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Dari sisi nominal, realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara



Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025



Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025

keseluruhan mengalami penurunan dari Rp8,39 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp7,01 triliun pada triwulan IV 2025.

Realisasi PAD pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar 87,47%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tercatat 96,51% dari pagu anggaran. Secara nominal, realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,85 triliun menjadi sebesar Rp4,94 triliun pada triwulan IV 2025. Peningkatan nominal realisasi terutama disebabkan oleh peningkatan pos anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi pos Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan naik dari Rp29,89 miliar dari pagu sebesar Rp76,29 miliar pada triwulan IV 2024 menjadi Rp34,52 miliar dari pagu sebesar Rp37,94 miliar pada triwulan IV 2025. Lebih lanjut, realisasi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah meningkat menjadi Rp396,94 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp342,27 miliar pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang terealisasi 57,07% atau Rp329,64 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp577,59 miliar.

Peningkatan capaian PAD yang lebih tinggi tertahan akibat penurunan realisasi pos Pajak Daerah yang tercatat 86,42%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 101,46% dan pos Retribusi Daerah yang tercatat 83,87%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 112,67%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pada pos Pajak Daerah di triwulan IV 2025 meningkat menjadi sebesar Rp3,98 triliun dari pagu anggaran Rp4,60 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang terealisasi sebesar Rp3,93 triliun dari pagu anggaran Rp3,87 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ekspektasi pendapatan daerah, bukan penurunan kinerja di tengah kebijakan realokasi anggaran.

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan IV 2025 dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp4,14 triliun atau 96,86% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 32,76% dari total realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepri sehingga persentase realisasi Kota Batam mempengaruhi persentase

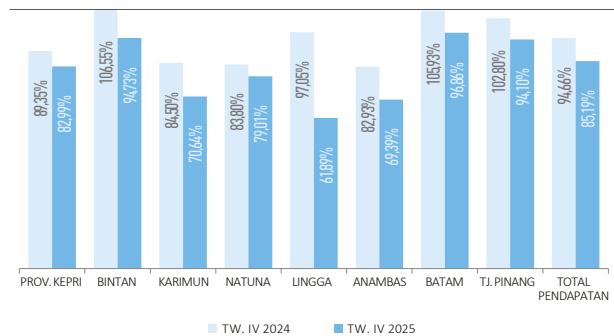
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	Porsi (%)
Pendapatan Asli Daerah	5.642,30	37,99%	4.935,45	87,47%	39,01%
Pajak Daerah	4.606,58	31,02%	3.981,21	86,42%	
Retribusi Daerah	655,51	4,41%	549,78	83,87%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	37,94	0,26%	34,52	90,99%	
Lain-lain PAD yang Sah	342,27	2,30%	369,94	108,08%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.565,89	56,09%	7.014,42	81,89%	55,45%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	599,54	4,40%	663,87	110,73%	5,25%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	42,43	0,29%	36,82	86,77%	0,29%
Hibah	1,32	0,01%	1,69	127,63%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	41,11	0,28%	35,13	85,45%	
TOTAL PENDAPATAN	14.850,16	100,00%	12.650,56	85,19%	

sumber: SIKD Kemenkeu dan BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau

* Pada tahun 2023, merupakan Dana Insentif Daerah yang pada tahun 2024 berganti menjadi Dana Insentif Fiskal

**Bantuan Keuangan pada tahun 2024 tidak dianggarkan



Sumber: SIKD Kemenkeu dan BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

realisasi pendapatan untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Bintan yang mencapai Rp1,24 triliun atau 94,73% dari pagu anggaran. Selanjutnya, capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kota Tanjungpinang sebesar Rp961 miliar atau 94,10% dari pagu anggaran tahun ini. Total Realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau mencapai 85,19% dari pagu anggaran.

2.2 REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Pemda Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan IV 2025 mencapai 83,43% dari pagu anggaran atau sebesar Rp12,81 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat 93,15% dari pagu anggaran atau sebesar Rp14,36 triliun. Pencapaian realisasi belanja yang menurun secara persentase terutama terjadi pada pos Belanja Operasi, pos Belanja Modal, dan pos Belanja Transfer. Sementara itu, realisasi pada pos Belanja Tidak Terduga tercatat mengalami peningkatan dari 7,76% pada triwulan

IV 2024 menjadi 9,22% triwulan IV 2025. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Transfer dengan porsi 87,30%, diikuti Belanja Operasi sebesar 85,34%, Belanja Modal sebesar 72,63%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 9,22%. Secara nominal, total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp15,36 triliun, lebih rendah dibandingkan total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp15,42 triliun. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025.

Realisasi Belanja Operasi tercatat 85,34% dari pagu anggaran atausebesar Rp10,12 triliun. Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah baik secara nominal maupun persentase dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 94,65% atau Rp11,16 triliun. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Operasi didominasi pos Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang terbesar dengan porsi 45,62% dari pagu anggaran, mencapai realisasi 89,64% atau sebesar Rp5,84 triliun. Realisasi pada pos Belanja Pegawai secara nominal meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp5,67triliun namun secara persentase menurun yang tercatat mencapai 100,27% pada triwulan IV 2024. Penurunan realisasi pos Belanja Operasi juga didorong oleh penurunan realisasi pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Bunga, pos Belanja Subsidi, pos Belanja Hibah, dan pos Belanja Bantuan Sosial. Hal ini mengindikasikan penggunaan biaya untuk belanja barang dan jasa lebih efisien, sejalan dengan arahan presiden untuk realokasi belanja daerah.

Persentase realisasi Belanja Modal pada triwulan IV 2025 tercatat 72,63% dari pagu anggaran, tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 86,61%. Secara nominal pagu pada pos Belanja Modal mengalami sedikit penurunan menjadi Rp2,13 triliun pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp2,14 triliun. Pangsa Pos Belanja Modal sebesar 12,08% terhadap

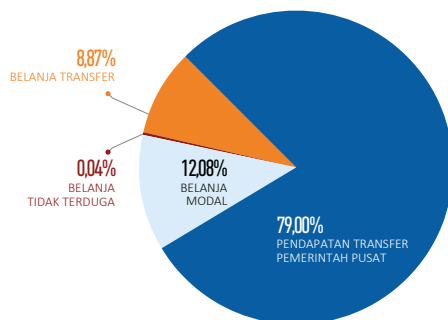
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	11.867,14	77,24%	10.127,36	85,34%	79,00%
Belanja Pegawai	6.523,23	42,46%	5.847,48	89,64%	
Belanja Barang dan Jasa	4.743,50	30,87%	3.793,90	79,98%	
Belanja Bunga	0,00	0,00%	0,33	0,00%	
Belanja Subsidi	13,16	0,09%	6,97	52,96%	
Belanja Hibah	553,25	3,60%	458,68	82,91%	
Belanja Bantuan Sosial	34,00	0,22%	20,00	58,82%	
Belanja Modal	2.132,94	13,88%	1.549,16	72,63%	12,08%
Belanja Tidak Terduga	61,92	0,40%	5,71	9,22%	0,04%
Belanja Transfer	1.302,30	8,48%	1.136,95	87,30%	8,87%
Belanja Bagi Hasil	758,44	4,94%	677,93	89,38%	
Belanja Bantuan Keuangan	543,86	3,54%	459,02	84,40%	
TOTAL BELANJA	15.364,30	100,00%	12.819,18	83,43%	
SURPLUS/DEFISIT	-514,14		-168,62		
Pembiayaan Neto	513,64		351,34	68,40%	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	521,14		358,09	68,71%	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,50		6,75	90,00%	
SILPA TAHUN BERKENAAN	-0,50		182,72		

Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

seluruh pos anggaran belanja, atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 12,92%. Realisasi pos Belanja Modal pada triwulan IV 2025 secara nominal tercatat melandai yakni sebesar Rp1,54 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp1,85 triliun. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

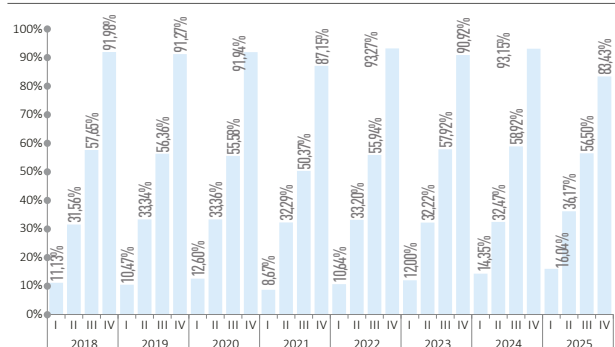
Pagu pos Belanja Transfer pada triwulan IV 2025 tercatat Rp1,30 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu pada triwulan IV 2024 yang tercatat Rp1,41 triliun. Realisasi Belanja Transfer pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp1,13 triliun atau 87,30% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,33 triliun atau 94,23% dari pagu anggaran.



Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

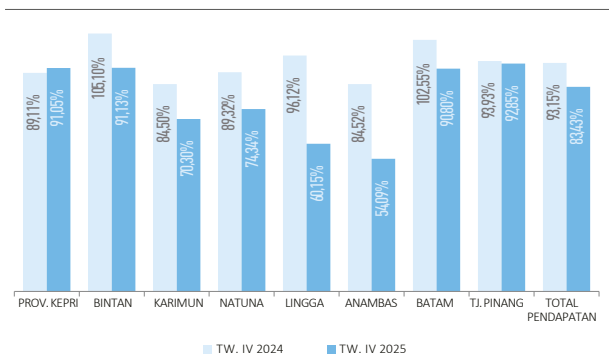
Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2025

Hal ini dipengaruhi oleh penurunan dengan realisasi pada pos Belanja Bagi Hasil yang tercatat 89,38% atau sebesar Rp677,93 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 92,45% atau Rp790,51 miliar, serta penurunan realisasi pada pos Belanja Bantuan Keuangan yang tercatat 84,40% atau sebesar Rp459,02 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 96,92% atau Rp546,76 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melakukan pengetatan atau efisiensi anggaran pada pos yang sifatnya transfer ke pihak lain sebagai respon dari kebijakan pemerintah pusat dalam realokasi anggaran sehingga terjadi pergeseran prioritas belanja untuk lebih fokus ke program strategis.



Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2025



Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi belanja pada triwulan IV 2025 pemerintah daerah se-Provinsi Kepri mencapai 83,43% dari pagu anggaran. Secara persentase, pencapaian realisasi Belanja pemerintah daerah se-Provinsi Kepri tertinggi dicapai oleh Kota Tanjungpinang, diikuti persentase realisasi belanja Kabupaten Bintan dan persentase realisasi belanja Provinsi Kepri. Capaian realisasi Kota Tanjungpinang tercatat 92,85% dari pagu anggaran atau sebesar Rp961,97 miliar. Lebih lanjut, capaian realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bintan tercatat sebesar Rp1,24 triliun atau 91,13% dari pagu anggaran dan capaian realisasi belanja Provinsi Kepri tercatat sebesar Rp3,58 triliun atau sebesar 91,05% dari pagu anggaran. Meski demikian, Kota Batam memiliki pangsa realisasi belanja terbesar untuk seluruh pemerintah daerah di Kepri dengan pangsa sebesar 31,26%.

2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

Secara keseluruhan pada 2025, target pendapatan APBN di Kepri meningkat, namun target belanja APBN tercatat menurun dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan kebijakan realokasi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Pada tahun 2025, target Pendapatan APBN mengalami peningkatan tercatat sebesar Rp18,05 triliun dari Rp14,92 triliun pada tahun 2024. Sementara, target Belanja APBN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp16,40 triliun dari Rp18,64 triliun pada tahun 2024. Peningkatan target anggaran Pendapatan terutama terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dengan target menjadi Rp15,38 triliun. Sementara itu, penurunan anggaran Belanja terutama terjadi pada pos anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp8,35 triliun pada triwulan IV 2025 dari Rp10,45 triliun pada triwulan IV 2024.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat 78,92%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 93,26% dari pagu anggaran. Persentase realisasi yang menurun ini terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dan pos PNBPN sejalan dengan target pendapatan yang meningkat. Persentase realisasi pada pos Penerimaan Perpajakan tercatat 73,37% dari pagu, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024

yang mencapai 86,96% dari pagu. Selanjutnya, pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan persentase realisasi 110,84% pada triwulan IV 2025, lebih rendah dari 121,73% pada triwulan IV 2024. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pendapatan APBN tercatat sebesar 14,25 triliun pada triwulan IV 2025, meningkat dari triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp13,91 triliun sejalan dengan peningkatan target pendapatan APBN. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah terhadap ekspansi ekonomi yang diharapkan terdapat peningkatan realisasi pendapatan.

Dengan target penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2025, secara umum pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 6,24% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan realisasi pada pos Pajak Dalam Negeri yang tercatat Rp10,37 triliun, pos Pajak Penghasilan yang tercatat Rp9,01 triliun, pos Pajak Pertambahan Nilai yang tercatat sebesar Rp1 triliun, pos Pajak Perdagangan Internasional yang tercatat sebesar Rp908,87 miliar, tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Di sisi lain, persentase realisasi pendapatan APBN pada pos PNBPN triwulan IV 2025 tercatat mengalami kontraksi 10% (yoy) atau sebesar Rp2,96 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2024 yang tercatat 121,73% dari target atau sebesar Rp3,29 triliun. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Pendapatan BLU yang berkontraksi, tercatat Rp2,15 triliun pada triwulan IV 2025, lebih rendah dari triwulan IV 2024 yang tercatat Rp2,48 triliun, sejalan dengan penurunan target dari pos Pendapatan BLU. Sementara itu, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi pada PNBPN Lainnya yang secara nominal tercatat Rp811,44 miliar atau 155,28% dari target, tumbuh 0,47% (yoy).

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai 92,74% dari pagu atau sebesar Rp15,21 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 96,16% dari pagu atau sebesar Rp17,92 triliun. Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 berkontraksi 15,11% (yoy) yang disebabkan oleh efisiensi belanja pada satuan kerja. Penurunan realisasi terjadi pada pos Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing hanya mencapai 87,84% dan 97,81% dari target, lebih rendah dari triwulan IV 2024 yang masing-masing tercapai 94,54% dan 98,23% dari target. Penurunan komponen Belanja Pemerintah Pusat terutama terjadi pada Belanja Modal yang berkontraksi 67,35% (yoy), disusul Belanja Barang yang berkontraksi 15,20% (yoy) dan Belanja Lainnya yang berkontraksi 2,44% (yoy). Di samping itu, komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 2,01% (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan pada DAK Fisik yang berkontraksi 56,21% (yoy), Dana Desa yang berkontraksi 7,62% (yoy), dan Dana Bagi Hasil yang berkontraksi sebesar 4,46% (yoy). Meski demikian, terjadi peningkatan realisasi Dana Insentif Fiskal, DAK Non Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berturut-turut sebesar 29,18% (yoy), 15,13% (yoy), dan 0,74% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh relaksasi kebijakan efisiensi TKD dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran mendukung program strategis daerah dan nasional.

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

Uraian		2024 (Miliar Rp)			2025 (Miliar Rp)			Pertumbuhan %
		Pagu	Realisasi Triwulan IV 2024	% Realisasi	Target	Realisasi Triwulan IV 2025	% Realisasi	
A. Pendapatan Negara		14.923,24	13.918,04	93,26%	18.057,64	14.250,80	78,92%	2,39%
I	Penerimaan Perpajakan	12.216,15	10.622,62	86,96%	15.381,79	11.285,00	73,37%	6,24%
1	Pajak Dalam Negeri	11.656,95	10.002,41	85,81%	14.945,52	10.376,13	69,43%	3,74%
a.	Pajak Penghasilan	10.301,22	8.791,77	85,35%	10.927,67	9.019,49	82,54%	2,59%
b.	Pajak Pertambahan Nilai	1.205,55	1.050,51	87,14%	3.960,47	1.002,76	25,32%	-4,54%
c.	Pajak Bumi dan Bangunan	29,39	32,48	110,49%	13,41	12,11	90,29%	-62,72%
d.	Cukai	37,40	39,53	105,71%	33,30	74,72	224,36%	89,00%
e.	Pajak Lainnya	83,39	88,12	105,67%	10,66	267,06	2504,73%	203,06%
2	Pajak Perdagangan Internasional	559,20	620,21	110,91%	436,28	908,87	208,32%	46,54%
II	PNBP	2.707,09	3.295,42	121,73%	2.675,85	2.965,80	110,84%	-10,00%
1	Pendapatan Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Pendapatan BLU	2.311,07	2.487,77	107,65%	2.153,28	2.154,36	100,05%	-13,40%
4	PNBP Lainnya	396,02	807,65	203,94%	522,57	811,44	155,28%	0,47%
III	Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B. Belanja Negara		18.635,93	17.920,22	96,16%	16.403,89	15.212,57	92,74%	-15,11%
I.	Belanja Pemerintah Pusat	10.454,64	9.883,69	94,54%	8.352,73	7.337,37	87,84%	-25,76%
1	Belanja Pegawai	2.263,90	2.281,13	100,76%	2.442,23	2.406,84	98,55%	5,51%
2	Belanja Barang	4.780,26	4.381,02	91,65%	4.252,55	3.714,99	87,36%	-15,20%
3	Belanja Modal	3.147,76	2.974,98	94,51%	1.399,95	971,46	69,39%	-67,35%
4	Belanja Bansos	7,82	7,70	98,43%	11,15	11,02	98,88%	43,23%
5	Belanja Lainnya	254,91	238,86	93,70%	246,86	233,04	94,40%	-2,44%
II.	Transfer ke Daerah (TKD)	8.181,29	8.036,53	98,23%	8.051,16	7.875,20	97,81%	-2,01%
1	DAU	1.149,18	1.149,09	99,99%	1.172,77	1.097,83	93,61%	-4,46%
2	Dana Bagi Hasil	4.817,40	4.748,06	98,56%	4.840,15	4.783,13	98,82%	0,74%
3	DAK Fisik	648,36	602,83	92,98%	274,91	264,01	96,03%	-56,21%
4	DAK Non Fisik	1.245,31	1.219,10	97,89%	1.427,80	1.403,51	98,30%	15,13%
5	Dana Insentif Fiskal	227,05	226,46	99,74%	218,00	209,20	95,96%	-7,62%
6	Dana Desa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Transfer Hibah	93,99	90,98	96,80%	117,53	117,53	100,00%	29,18%
C. SURPLUS/(DEFISIT)		-3.712,69	-4.002,18	107,80%	1.653,75	-961,76	-58,16%	-75,97%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri telah terserap 75,28% atau Rp823,19 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 96,28% atau sebesar Rp1,76 triliun. Postur APBN pendukung proyek infrastruktur Kepri utamanya ditopang oleh realisasi proyek program konektivitas laut yang tercatat mencapai 98,29% dari pagu anggaran atau sebesar Rp200,54 miliar. Pengembangan konektivitas laut tersebut meningkat sejalan dengan lanjutan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan pelabuhan, pengembangan pelabuhan bongkar muat Batu Ampar, pembangunan pelabuhan kapal ikan, dan peningkatan

Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercapai 86,57%. Realisasi terbesar kedua adalah realisasi proyek Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan realisasi sebesar 98,28%, proyek Konektivitas Udara sebesar 83,97%, dan proyek Konektivitas Darat sebesar 61,00%.

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri

No	Jenis Proyek	Triwulan IV 2024			Triwulan IV 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	64,06	58,54	91,38%	20,19	16,96	83,97%
2	Konektivitas Laut	412,68	344,04	86,57%	204,03	200,54	98,29%
3	Konektivitas Darat	1.149,88	1.141,70	99,29%	667,14	406,96	61,00%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	221,08	219,92	99,48%	202,21	198,74	98,28%
Total		1.847,70	1.764,22	96,28%	1.093,57	823,19	75,28%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

BAB III

Perkembangan Inflasi

Provinsi Kepri (yoy)



Tw IV
2025

3,47%



Tw III
2025

2,70%

Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw IV
2025

2,75%



Tw III
2025

1,82%

Kota Batam (yoy)



Tw IV
2025

3,67%



Tw III
2025

2,82%

Kab. Karimun (yoy)



Tw IV
2025

2,72%



Tw III
2025

2,91%



Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan IV 2025 masih berada dalam target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).



Inflasi Kepri Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh andil Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,49% (yoy), Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil 1,06% (yoy), Kelompok Transportasi yang memberikan andil 0,29% (yoy), Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan andil 0,26% (yoy), serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil 0,16% (yoy). Secara spasial, inflasi meningkat pada dua kota cakupan IHK sedangkan 1 kabupaten IHK di Kepri mengalami penurunan inflasi. Di Kota Batam inflasi tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni dari 2,82% (yoy) menjadi 3,67% (yoy). Di Kota Tanjungpinang inflasi tercatat 2,75% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,82% (yoy). Sementara itu, inflasi di Kabupaten Karimun tercatat sebesar 2,72% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 2,91% (yoy). Pada periode yang sama, inflasi Nasional meningkat dari 2,65% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi sebesar 2,92% (yoy) pada Triwulan IV 2025.

Secara bulanan, IHK Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,14% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,64% (mtm). Inflasi bulanan pada triwulan IV 2025 terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 2,91% (mtm) dengan andil 0,85% (mtm). Kenaikan pada kelompok ini didorong oleh meningkatnya harga cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bayam, kangkung, buncis, bawang merah, dan telur ayam ras. Peningkatan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah sentra produksi. Sementara itu, kenaikan harga sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi hijau didorong oleh pasokan yang terbatas seiring mulai memasuki musim hujan yang meningkatkan kelembapan dan mengakibatkan sayuran lebih cepat rusak. Selain itu, kenaikan harga daging ayam ras sejalan dengan naiknya konsumsi menjelang HBKN Nataru, serta adanya kenaikan biaya produksi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan.

Penyebab inflasi juga berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat inflasi sebesar 1,63% (mtm) dengan andil 0,12% (mtm), sejalan dengan kenaikan harga emas perhiasan yang mengikuti tren harga emas global di tengah dinamika ketidakpastian global, termasuk ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Kelompok Transportasi turut mencatatkan inflasi sebesar 1,13% (mtm) dengan andil 0,16% (mtm), terutama dipengaruhi oleh peningkatan tarif angkutan udara seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata pada periode libur Nataru.

Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)

Kelompok	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflasi Nasional	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92
Inflasi Kepri	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32	2,70	3,47
Inflasi Tanjungpinang	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	1,53	0,07	0,07	1,82	2,75
Inflasi Batam	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	2,24	2,53	1,68	2,82	3,67
Inflasi Karimun					2,57	2,79	2,04	1,57	0,15	-0,15	2,91	2,72

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (% , mtm)
1	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,21
2	Angkutan Udara	Transportasi	0,16
3	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,13
4	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,13
5	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,07
6	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06
7	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,05
8	Buncis	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
9	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
10	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,03

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.3 Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% , mtm)
1	Angkutan Laut	Transportasi	-0,02
2	Ikan Selar/ Ikan Tude	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
3	Sabun Mandi Cair	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,01
4	Kentang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,005
5	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,004
6	Jeruk	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
7	Mie Kering Instant	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
8	Susu Bubuk Untuk Balita	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
9	Santan Segar	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
10	Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,003

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.4 Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% , yoy)
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	1,01
2	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,48
3	Angkutan Udara	Transportasi	0,23
4	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,21
5	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,20
6	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,14
7	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,11
8	Akademi/Perguruan Tinggi	Pendidikan	0,08
9	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran	0,06
10	Daging Sapi	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06

Sumber: BPS (data diolah)

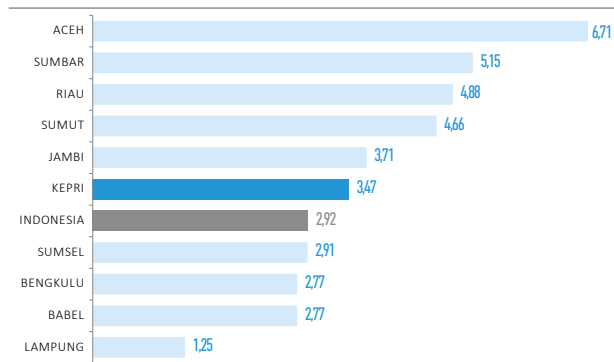
Tabel 3.5 Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% mtm)
1	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,14
2	Tomat	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,06
3	Bawang Putih	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,04
4	Angkutan Laut	Transportasi	-0,02
5	Sabun Mandi Cair	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,02
6	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
7	Sawi Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
8	Susu Bubuk Untuk Balita	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
9	Ikan Kembung/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
10	Ayam Hidup	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01

Sumber: BPS (data diolah)

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, peningkatan tekanan inflasi Kepri pada Triwulan IV 2025 terutama didorong oleh Kelompok kelompok Makanan, Minuman, dan

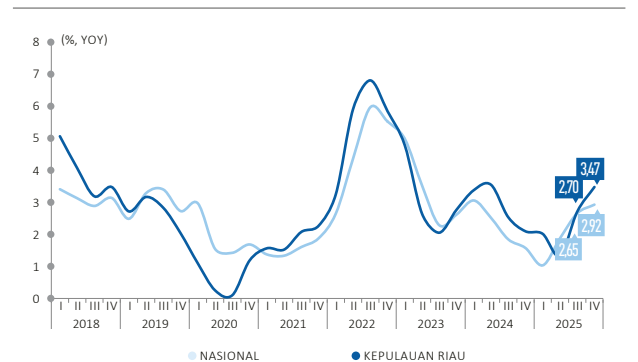


Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 3.1 Inflasi Triwulan IV 2025 Regional Sumatera (% yoy)

Tembakau yang tercatat inflasi 5,07% (yoy) dengan andil 1,49% (yoy). Kelompok Perawatan dan Jasa Pribadi Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 16,68% (yoy) dengan andil 1,06% (yoy). Selain itu, Kelompok Transportasi juga mengalami inflasi 2,11% (yoy) dengan andil 0,29% (yoy).

Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,49% (yoy) disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah sebesar 0,48% (yoy), cabai rawit 0,21% (yoy), daging ayam ras 0,20% (yoy), sigaret kretek mesin (SKM) 0,11% (yoy), dan daging sapi 0,06% (yoy). Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh kenaikan harga perhiasan sejalan dengan tren meningkatnya harga emas global yang ditengah ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik serta ketidakpastian kebijakan perdagangan, termasuk penetapan tarif resiprokal. Sementara itu, inflasi pada kelompok transportasi disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara dengan andil 0,23% (yoy) sejalan dengan meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Nataru.



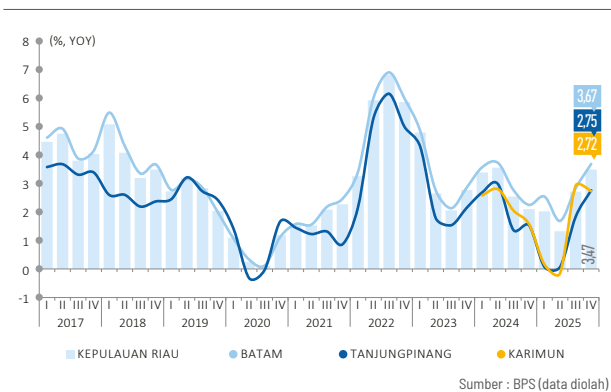
Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan IV 2025 (% yoy)

Tabel 3.6 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

No	Kelompok	2024								2025							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,87	6,38	1,87	6,48	1,00	3,46	0,72	2,46	0,69	2,31	-0,14	-0,48	1,42	4,86	1,49	5,07
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,16	3,35	0,15	3,26	0,12	2,51	0,10	2,11	0,06	1,19	0,02	0,41	0,05	1,12	0,06	1,21
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,16	0,98	0,14	0,90	0,39	2,42	0,42	2,65	0,25	1,61	0,45	2,84	0,17	1,04	0,16	0,99
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,01	0,23	-0,02	-0,41	0,00	0,10	-0,01	-0,22	-0,01	-0,25	0,00	-0,03	-0,01	-0,18	0,01	0,21
5	Kesehatan	0,09	3,53	0,09	3,45	0,09	3,62	0,10	4,24	0,01	0,52	0,03	1,07	0,04	1,66	0,04	1,79
6	Transportasi	0,60	4,33	0,56	4,04	0,47	3,39	0,30	2,13	0,24	1,71	0,17	1,25	-0,09	-0,66	0,29	2,11
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,04	-0,01	-0,10	-0,01	-0,10	-0,01	-0,12	-0,01	-0,09	0,00	-0,01
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,01	-0,35	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,01	0,38	0,01	0,73	0,01	0,54	0,01	0,53	0,01	0,33
9	Pendidikan	0,17	2,49	0,17	2,49	-0,13	-1,92	-0,13	-1,84	-0,13	-1,87	-0,13	-1,84	0,09	1,40	0,09	1,37
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,10	1,03	0,18	1,86	0,14	1,51	0,13	1,42	0,29	3,07	0,23	2,45	0,25	2,57	0,26	2,79
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,26	4,34	0,40	6,66	0,45	7,50	0,46	7,53	0,61	10,03	0,69	11,06	0,78	12,40	1,06	16,68
Umum		3,37		3,54		2,53		2,09		2,01		1,32		2,70		3,47	

Sumber: BPS (data diolah)



Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)

3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN

Secara spasial, ketiga Kota/Kabupaten IHK di Kepri yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun pada Triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 3,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,82% (yoy). Tekanan inflasi juga terjadi di Kota Tanjungpinang dengan inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Karimun mencatatkan inflasi sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, inflasi Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy).

3.2.1 Inflasi Kota Batam

Secara tahunan, Kota Batam pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 3,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Tekanan Inflasi tersebut disebabkan oleh meningkatnya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 5,17% (yoy) dengan andil 1,49% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 4,94% (yoy) dengan andil 1,41% (yoy). Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat sebesar 18,03% (yoy) dengan andil 1,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang mencatatkan inflasi 13,62% (yoy) dengan andil 0,84% (yoy). Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga mengalami inflasi sebesar 3,38% (yoy) dengan andil 0,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,96% (yoy) dengan andil 0,27% (yoy).

Secara bulanan, Kota Batam pada Desember 2025 tercatat inflasi sebesar 1,14% (mtm), lebih tinggi dibandingkan September 2025 sebesar 0,62% (mtm) terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Transportasi, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami inflasi 2,88% (mtm) dengan

andil 0,83% (mtm), didorong oleh kenaikan harga cabai rawit yang memberikan andil 0,19% (mtm), daging ayam ras sebesar 0,15% (mtm); cabai merah sebesar 0,08% (mtm), bayam sebesar 0,06% (mtm), dan kangkung sebesar 0,06% (mtm). Tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi sebesar 1,41% (mtm) dengan andil 0,19% (mtm) sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan masyarakat pada periode HBKN Nataru. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 1,63% (mtm) dengan andil 0,12% (mtm) sejalan dengan kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil 0,13% (mtm) di tengah berlanjutnya ketidakpastian global. Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada Kelompok Kesehatan serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang masing - masing tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm) dan 0,06% (mtm).

3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Tekanan inflasi tersebut didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat inflasi 4,97% (yoy) dengan andil 1,42% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga komoditas pokok seperti cabai merah, cabai rawit, ikan selar/tude, dan daging ayam ras. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat inflasi sebesar 15,82% (yoy) dengan andil 0,99% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 10,53% (yoy) dengan andil 0,66% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian global, terutama dinamika geopolitik. Kelompok Transportasi turut menjadi pendorong inflasi dengan nilai sebesar 3,36% (yoy) dan andil 0,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,50% (yoy) dengan andil 0,22% (yoy). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara pada periode HBKN Nataru.

Secara bulanan, inflasi Kota Tanjungpinang pada Desember 2025 meningkat menjadi 1,28% (mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,54% (mtm). Kenaikan ini didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,78% (mtm) dengan andil 1,07% (mtm), Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,10% (mtm) dengan andil 0,15% (mtm), serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,69% (mtm) dengan andil 0,03% (mtm). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas seperti cabai rawit dengan andil 0,20% (mtm), bawang merah dengan andil 0,14% (mtm), emas perhiasan dengan andil 0,13% (mtm), daging ayam ras dengan andil 0,12% (mtm), wortel dengan andil 0,07% (mtm), dan gula pasir dengan andil 0,06% (mtm). Sementara itu, tekanan inflasi lebih tinggi tertahan dengan penurunan beberapa komoditas antara lain santan segar, angkutan laut, udang basah, ikan tamban, susu cair kemasan, dan ikan tongkol.

Tabel 3.7 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)

Periode	III-2024			IV-2024			I-2025			II-2025			III-2025			IV-2025		
Kelompok Komoditas	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,97	0,77	1,59	0,64	1,01	1,09	0,77	0,47	0,31	-0,04	-0,33	-0,53	1,40	1,17	1,88	1,48	1,42	1,68
Pakaian dan Alas Kaki	0,16	-0,16	0,12	0,15	-0,25	0,10	0,12	-0,39	0,07	0,09	-0,49	0,07	0,12	-0,47	0,15	0,11	-0,38	0,17
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,51	-0,01	-0,14	0,55	0,01	-0,12	0,55	-0,90	-0,73	0,56	0,09	-0,11	0,19	0,09	0,03	0,18	0,10	0,02
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	0,04	-0,02	0,00	0,04	-0,12	-0,01	0,00	-0,05	0,01	-0,03	-0,08	0,00	-0,03	-0,07	0,01	-0,01	0,00
Kesehatan	0,07	0,15	0,19	0,09	0,16	0,18	0,01	0,04	0,02	0,02	0,05	0,01	0,05	0,05	0,01	0,05	0,03	0,00
Transportasi	0,57	0,16	0,04	0,33	0,15	0,19	0,22	0,38	0,21	0,16	0,26	-0,11	-0,17	0,22	0,17	0,29	0,49	0,04
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,03
Pendidikan	-0,11	-0,14	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34	-0,11	-0,11	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34	0,09	0,13	0,06	0,10	0,08	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,11	0,16	0,41	0,11	0,12	0,42	0,31	0,12	0,33	0,24	0,04	0,42	0,27	0,02	0,28	0,31	0,02	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,49	0,37	0,19	0,50	0,38	0,19	0,66	0,46	0,35	0,74	0,56	0,34	0,84	0,66	0,47	1,12	0,99	0,62
Umum	2,76	1,36	2,04	2,24	1,53	1,57	2,53	0,07	0,15	1,68	0,07	-0,15	2,82	1,82	2,91	3,67	2,75	2,72

Sumber: BPS (data diolah)

3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy). Kondisi tersebut terutama didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat sebesar 4,42% (yoy) dengan andil 1,69% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah dengan andil 0,74% (yoy), cabai rawit dengan andil 0,35% (yoy), ikan mata besar dengan andil 0,12% (yoy), sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil 0,10% (yoy), dan telur ayam ras dengan andil 0,09% (yoy). Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami peningkatan inflasi menjadi 7,87% (yoy) dengan andil 0,62% (yoy) dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas global di tengah dinamika geopolitik yang masih berlanjut. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat inflasi sebesar 2,58% (yoy) dengan andil 0,18% (yoy), terutama disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk dengan andil inflasi 0,08% (yoy). Lebih lanjut, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga tercatat inflasi 2,79% (yoy) dengan andil 0,17% (yoy).

Tekanan inflasi pada Kabupaten Karimun secara bulanan tercatat sebesar 0,92% (mtm) terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat inflasi sebesar 2,13% (mtm) dengan andil 0,81% (mtm). Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai rawit dengan andil 0,36% (mtm), bawang merah dengan andil 0,18% (mtm), telur ayam ras dengan andil 0,07% (mtm), daging ayam ras dengan andil 0,05% (mtm), dan sawi hijau dengan andil 0,04% (mtm). Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 1,01% (mtm) dengan andil 0,08% (mtm) utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas. Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah

Tangga, Kelompok Kesehatan, Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, serta Kelompok Transportasi.

3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Kepri pada Triwulan I 2026 diperkirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi 2025 yakni 2,5±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada Triwulan I 2026 diperkirakan berada di titik tengah sasaran inflasi nasional dipengaruhi oleh normalisasi pasokan pangan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah sentra produksi serta diskon tarif angkutan udara dan laut pada periode HBKN. Di sisi lain, perlu diwaspadai risiko tekanan inflasi pada peningkatan harga emas perhiasan seiring peningkatan harga emas global di tengah tensi perang dagang yang masih berlanjut.

Berdasarkan realisasi inflasi hingga bulan Januari 2026, Kepri mengalami deflasi sebesar 0,09% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,14% (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 2,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,47% (yoy). Deflasi pada Januari 2026 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi 1,31% (mtm) dengan andil sebesar -0,40% (mtm) sejalan dengan pulihnya pasokan komoditas pangan pasca bencana di sejumlah wilayah sentra produksi serta normalisasi permintaan pasca HBKN Nataru. Lebih lanjut, Kelompok Transportasi turut mengalami deflasi 0,43% (mtm) dengan andil 0,06% (mtm) dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara seiring berakhirnya lonjakan permintaan dan masih berlakunya diskon tarif periode Nataru hingga Januari 2026. Di sisi lain, deflasi bulanan yang lebih dalam tertahan oleh Inflasi pada komoditas emas perhiasan, beras, sewa rumah, daging ayam ras, dan ketimun.

Peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas global di tengah eskalasi ketegangan geopolitik. Sementara itu harga beras mengalami kenaikan didorong oleh kenaikan harga dari sentra produksi. Harga sewa rumah mengalami kenaikan seiring dengan penyesuaian tarif awal tahun dan peningkatan biaya termasuk penyesuaian upah. Sementara itu, harga daging ayam ras meningkat didorong oleh kenaikan biaya pakan ternak ditengah permintaan yang tetap terjaga. Adapun kenaikan harga ketimun didorong oleh terbatasnya pasokan.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh *base effect* realisasi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2025. Sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2026 yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (i) Potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan sebagai dampak berlanjutnya ketegangan geopolitik seperti kenaikan harga beras dan pupuk; (ii) Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan pasokan domestik agar tidak menimbulkan tekanan harga; (iii) Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan ketidakpastian global; (iv) Risiko cuaca ekstrem atau anomali iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas pangan; (v) Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat namun berpotensi memberikan tekanan dari sisi permintaan (*demand pull*) apabila ketersediaan pasokan tidak seimbang. Di sisi lain, faktor yang dapat menahan peningkatan inflasi antara lain: (i) Tekanan inflasi kelompok *administered price* yang diperkirakan terkendali sejalan dengan diskon tarif tiket angkutan udara pada periode-periode HBKN serta normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi penerbangan; (ii) Ekspektasi inflasi tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan; (iii) Berlanjutnya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi daerah tahun 2025, berbagai upaya dilakukan termasuk melalui strategi implementasi kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV 2025 antara lain:

A. Keterjangkauan Harga

1. Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar di berbagai wilayah Provinsi Kepri hingga Desember 2025.

2. Pengendalian ekspektasi melalui sidak pasar rutin untuk stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
3. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan dalam rangka HBKN Nataru.
4. Koordinasi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Sembako Bersubsidi.

B. Ketersediaan Pasokan

1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) eksisting baik antar maupun intra provinsi. Terdapat penambahan 9 (sembilan) KAD baru dengan skema *Business-to-Business* untuk komoditas bawang merah, beras, dan cabai
2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Capacity Building* KAD dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara.
3. Penguatan peran Asosiasi Distributor TPID Batam dalam penyediaan pasokan.
4. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendukung produktivitas pangan untuk ketahanan pangan di daerah.

C. Kelancaran Distribusi

1. Penyaluran SPHP secara rutin di berbagai Kabupaten/Kota oleh BULOG.
2. Bazar Murah Rutin Kedai Pangan TPID Kab. Karimun.
3. Pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan dalam rangka Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kepulauan Anambas, Tanjungpinang, dan Bintan.

D. Komunikasi Efektif

1. *High Level Meeting* TPID dan TP2DD, serta *High Level Meeting* Forkopimda Se-Provinsi Kepri.
2. Rapat Koordinasi *Dashboard* Pengendalian Inflasi Kabupaten Karimun.
3. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2025.
5. *Launching* Kedai Pangan TPID Kabupaten Karimun.
6. *Capacity Building* TPID Se-Provinsi Kepri, termasuk *Capacity Building* dengan TPID Jawa Tengah.
7. Bincang Media dalam rangka pengendalian ekspektasi inflasi di masyarakat.
8. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2025 Kota Batam.
9. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Idul Adha 2025.
10. Koordinasi pelaksanaan *Capacity Building* TPID dan KAD dengan daerah penghasil.

11. Penyediaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
12. Telah dilaksanakan program komunikasi rutin dan insidentil. Berbagai program tersebut diantaranya siaran pers inflasi, *talkshow* radio, sidak, iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat.
13. Pelatihan hilirisasi olahan cabai kepada Klaster/UMKM Binaan Bank Indonesia.
14. *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi Triwulan IV 2025.
15. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Nataru 2025.
16. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Nataru 2025.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merancang dan melaksanakan sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan inflasi ke depan, khususnya pada sektor pangan. Upaya pengendalian inflasi pangan tersebut ditempuh melalui implementasi 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan komoditas pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar murah, digitalisasi data dan informasi, serta penguatan koordinasi

dan komunikasi. Upaya ini diarahkan diantaranya melalui penguatan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani. Program tersebut mencakup pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya hidroponik, integrasi data pertanian untuk mendukung akurasi informasi produksi dan distribusi, serta penyelenggaraan kelas digital atau *smart agriculture* guna memperluas akses edukasi bagi petani terkait praktik budidaya pangan yang lebih produktif dan efisien.

Di sisi lain, penguatan pasokan dilakukan melalui pembentukan *command center* Kerja Sama Antar Daerah (KAD). *Command center* KAD berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi kebijakan dalam menjembatani kebutuhan antara daerah surplus dan defisit pangan. Melalui penguatan *command center* tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antarwilayah akan dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur, responsif, dan tepat sasaran.

Selain itu, strategi ini juga didukung dengan penguatan infrastruktur dan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang dan jasa dapat berlangsung lebih lancar dan merata. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat regional maupun nasional dapat terjaga, sekaligus memperkuat daya saing perekonomian di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan.

BOKS 2

Laporan *Liaison* Triwulan IV 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan wawancara kegiatan dunia usaha atau *liaison* kepada sejumlah responden dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Kepri. Sektor ekonomi yang menjadi fokus *liaison* pada triwulan IV tahun 2025 mencakup 14 kontak perusahaan. Adapun sebaran kontak yaitu pada industri pengolahan (42,86%), penyediaan akomodasi dan makan minum (21,43%), jasa lainnya (7,14%), perdagangan besar dan eceran (21,43%), serta pertambangan dan penggalian (7,14%). Ruang lingkup analisis laporan *liaison* mencakup permintaan domestik dan ekspor, kapasitas utilitas, persediaan, investasi, biaya, harga jual dan *margin*, tenaga kerja, pembiayaan serta prakiraan kondisi bisnis di masa yang akan datang dengan ringkasan nilai *likert* sebagaimana terlihat pada Tabel B3.1.

Berdasarkan hasil *liaison*, produksi/penjualan domestik Kepri pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dan dipengaruhi oleh meningkatnya *demand* dalam negeri. Secara umum, kinerja produksi/penjualan domestik di wilayah Kepri menguat pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan. Penjualan/produksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian meningkat disebabkan oleh normalisasi produksi pasca terhenti saat pembaruan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, peningkatan ditopang oleh meningkatnya okupansi dan tingkat kunjungan wisatawan serta peningkatan dari sisi MICE oleh pemerintah setelah sebelumnya mengalami penurunan pada triwulan I sampai dengan triwulan III karena kebijakan efisiensi. Pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, peningkatan penjualan didorong oleh penambahan jumlah outlet serta penyelenggaraan *big event* berskala nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak awal tahun

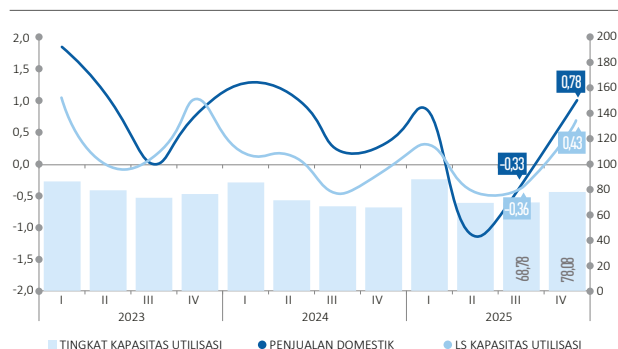
Tabel B3.1 *Likert Scale Tahun TW I 2023 s.d TW IV 2025 di Kepri*

Indikator	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
KONDISI SAAT INI												
Penjualan Domestik	1,78	1,00	0,00	0,80	1,22	1,10	0,20	0,29	0,78	-1,11	-0,33	0,78
Penjualan Ekspor	0,38	-0,30	0,20	1,00	-0,57	0,11	-0,60	0,45	-0,40	-0,50	-0,44	0,08
LS Kapasitas Utilisasi	1,00	0,00	0,08	1,00	0,17	0,08	-0,45	-0,17	0,27	-0,45	-0,36	0,43
Persediaan	0,33	-0,08	0,42	0,33	0,33	-0,09	-0,33	-0,40	0,18	0,00	-0,50	0,17
Investasi	1,00	1,00	1,08	0,17	0,75	0,67	0,58	0,67	0,82	0,73	0,58	0,57
Biaya Bahan Baku	0,67	-0,15	0,70	0,88	0,92	0,18	0,46	0,38	0,36	0,18	0,33	0,54
Biaya Energi	0,50	0,38	0,00	1,00	0,08	0,08	0,15	0,09	0,27	0,45	0,58	0,21
Biaya Tenaga Kerja	1,08	1,23	2,00	1,25	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2
Harga Jual	0,67	0,62	0,83	0,25	0,33	0,33	0,31	0,50	1,00	0,27	0,33	0,36
Margin Per Unit Output	0,50	0,54	0,17	0,08	0,00	0,50	-0,58	-0,08	0,27	-0,18	0,17	0,07
Jumlah Tenaga Kerja	0,83	0,23	0,17	0,58	0,17	0,00	0,23	0,33	-0,09	-0,18	-0,58	0,00
PERKIRAAN KE DEPAN												
Perkiraan Penjualan ke Depan	0,67	0,54	0,75	0,25	0,08	1,00	1,08	0,92	0,36	0,55	0,17	0,71
Perkiraan Tingkat Upah	1,00	0,92	2,00	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,71
Perkiraan Harga Jual	0,58	0,15	0,42	0,58	0,42	0,58	0,50	0,18	0,45	0,00	0,25	0,43
Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja	0,92	0,38	0,42	0,00	0,33	0,42	0,46	0,33	0,36	0,27	0,25	0,71
Perkiraan Investasi	0,50	0,69	0,25	0,67	0,58	0,58	0,82	0,83	0,82	0,64	0,75	0,64
Tingkat Kapasitas Utilisasi	86,21	79,23	72,75	76,36	85,17	70,58	66,11	65,25	87,09	68,64	68,78	78,08

yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pada nilai transaksi (*basket size*). Sementara itu kenaikan pada sektor Industri Pengolahan didorong oleh industri fabrikasi *offshore* mulai memperoleh proyek dari dalam negeri.

Sejalan dengan permintaan domestik, permintaan ekspor turut mengalami peningkatan. Peningkatan minta ekspor dipengaruhi oleh kinerja sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, dan Penyedia Akomodasi dan Makan Minum. Peningkatan penjualan ekspor sektor Industri Pengolahan didorong oleh naiknya permintaan kapasitor untuk kebutuhan video, audio, navigasi, serta otomotif, sehingga perusahaan memilih untuk berfokus pada produksi kapasitor berkelas *high grade* yang berdampak pada peningkatan penjualan ekspor khususnya pada industri elektronik. Sementara itu, kenaikan ekspor pada sektor Pertambangan dan Penggalian terjadi sejalan dengan membaiknya kondisi operasional perusahaan pasca pembaruan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga *demand* dari Singapura dapat lebih banyak dipenuhi. Pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, tingkat okupansi akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring dengan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Momentum tersebut memberikan *spillover effect* yang tercermin pada tingkat hunian hotel yang mencapai level *full occupancy* setiap akhir pekan.

Rata-rata tingkat kapasitas utilisasi dari perusahaan yang menjadi kontak pada periode laporan tercatat sebesar 78,08%, meningkat dari periode sebelumnya tercermin dari *likert scale* kapasitas utilisasi yang terakselerasi sebesar 0,43, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,36 (Grafik B3.1). Peningkatan kapasitas utilisasi terjadi pada beberapa perusahaan khususnya di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Industri Pengolahan, serta Pertambangan dan Penggalian. Meningkatnya tingkat kapasitas utilisasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah tamu yang berkunjung dan menginap sehingga meningkatkan jumlah okupansi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara itu, di sektor Industri Pengolahan, peningkatan kapasitas utilisasi dipengaruhi oleh penambahan pesanan proyek dan bertambahnya kapasitas terpasang akibat relokasi 251 mesin baru dari perusahaan



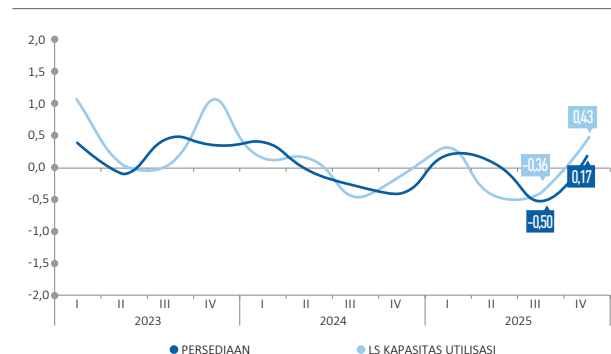
Grafik B3.1 Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik

induk yang dilakukan secara bertahap sejak 2024. Pada sektor pertambangan dan penggalian, peningkatan drastis terjadi karena normalisasi produksi pasca pembaruan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini terlihat dari penggunaan bahan bakar dan alat berat oleh perusahaan yang mencapai 100% akibat dari peningkatan tingkat produksi perusahaan.

Terlihat pada Grafik B3.2, peningkatan kapasitas utilisasi pada triwulan IV 2025 juga berpengaruh kepada peningkatan persediaan yang tercermin dari *likert scale* persediaan sebesar 0,17 pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berada di level -0,50. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan kapasitas utilisasi perusahaan, yang mengindikasikan tingginya volume produksi, berimplikasi pada bertambahnya tingkat persediaan.

Adapun level persediaan yang meningkat tersebut turut terjadi seiring dengan penguatan kinerja penjualan domestik dan ekspor serta peningkatan kebutuhan bahan baku untuk pengerjaan proyek khususnya pada sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Penyediaan Real Estate.

Secara umum, investasi pada periode ini mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan sebelumnya yang tercermin dari *likert scale* investasi 0,57 pada triwulan IV 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 0,58. Hal ini terkonfirmasi dari pertumbuhan PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang turut menurun dari 9,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 6,24% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan investasi terutama dipengaruhi oleh renovasi besar yang baru dilakukan di tahun sebelumnya oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sehingga pada tahun ini perusahaan hanya melakukan *maintenance* rutin. Beberapa perusahaan pada sektor Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian tidak melakukan investasi pada triwulan ini dan hanya melakukan pemeliharaan (*maintenance*) rutin tanpa ekspansi signifikan. Secara agregat, kondisi ini mengindikasikan bahwa dunia usaha masih cenderung berhati-hati dalam menambah kapasitas produksi dan melakukan pembelian alat atau mesin.



Grafik B3.2 LS Kapasitas Utilisasi & Persediaan

Harga jual pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari *likert scale* sebesar 0,36, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,33. Peningkatan harga jual/tarif terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertambangan dan Penggalian, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Peningkatan harga jual tersebut terjadi karena mempertimbangkan kondisi pasar, biaya bahan baku, biaya operasional, dan kenaikan biaya tenaga kerja yang terus meningkat dari triwulan sebelumnya. Meski demikian, *margin* perusahaan justru **mengalami penurunan** dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari *likert scale margin* pada triwulan IV 2025 sebesar 0,07, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,17. Penurunan *margin* terutama terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Penurunan pada sektor Industri Pengolahan terkonfirmasi pada saldo bersih tertimbang survei SKDU khususnya pada sektor Industri Pengolahan yang turut mengalami pelemahan. Pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, penurunan terjadi karena *cost renovasi* yang masih terbilang tinggi pasca rebranding sehingga harga jual masih belum dapat menutupi *loss*. Sementara itu, penurunan *margin* pada sektor Jasa Lainnya hingga menyentuh defisit secara netto dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan tingginya biaya operasional dan masih mencari *Break Even Point* (BEP) untuk peralihan dari kepemilikan lama ke kepemilikan baru.

Seiring dengan kondisi kinerja penjualan, jumlah tenaga kerja **mengalami peningkatan** pada triwulan IV 2025 khususnya pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Jasa Lainnya yang tercermin dari nilai *likert scale* sebesar 0,00, **lebih tinggi** dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,58 serta terkonfirmasi oleh *likert scale* biaya tenaga kerja yang turut meningkat. Selain itu, kenaikan tingkat upah yang cukup signifikan sekitar 6,5% pada tahun 2025 juga turut berkontribusi dalam peningkatan biaya tenaga kerja di triwulan ini khususnya beberapa perusahaan yang melakukan penambahan tenaga kerja dengan jumlah cukup banyak. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan tingkat okupansi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja tambahan khususnya pada momen HBKN nataru.



BAB IV

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Asset* (yoy)



Tw IV
2025

12,92%
Rp118,94 T



Tw III
2025

12,87%
Rp117,07 T

Kredit* (yoy)



Tw IV
2025

15,46%
Rp61,32 T



Tw III
2025

15,12%
Rp59,82 T

Kredit** (yoy)



Tw IV
2025

25,92%
Rp99,89 T



Tw III
2025

20,61%
Rp89,65 T

Dana* (yoy)



Tw IV
2025

13,22%
Rp103,11 T



Tw III
2025

14,06%
Rp101,67 T

LDR*



Tw IV
2025

96,87%



Tw III
2025

88,18%

NPL*



Tw IV
2025

2,39%



Tw III
2025

2,80%

Kredit UMKM



Tw IV
2025

13,21%
Rp16,79 T



Tw III
2025

12,96%
Rp16,15 T

* dari bank yang berlokasi di Kepri.

** kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari akselerasi pertumbuhan kredit dan aset yang disertai dengan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang lebih rendah. Adapun perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan pergeseran penempatan dana di perbankan dari simpanan ke konsumsi.



Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan rasio NPL yang lebih rendah. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 15,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 15,12% (yoy). Sementara itu, jumlah kredit yang disalurkan kepada proyek yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 25,92% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,61% (yoy). Total aset perbankan di Kepri tercatat tumbuh sebesar 12,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,87% (yoy). Di sisi penghimpunan dana, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,06% (yoy).

Kinerja intermediasi perbankan di Kepri tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan. Berdasarkan proyek yang berlokasi di Kepri, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Kepri tercatat sebesar 96,87%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 88,18%. Penyaluran kredit yang tumbuh positif turut didukung oleh membaiknya kualitas kredit, tercermin dari *NPL gross* yang tercatat sebesar 2,39%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,80%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM juga meningkat dengan risiko kredit yang menurun. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,21% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,96% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke LU Perantara Keuangan, yang pada triwulan sebelumnya tumbuh negatif sebesar 2,72% (yoy), menjadi tumbuh 55,00% (yoy) pada triwulan IV 2025. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh sektor Konstruksi yang tercatat tumbuh sebesar 21,44% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,11% (yoy).

4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 25,92% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 20,61% (yoy). Akselerasi ini terutama disebabkan oleh penyaluran kredit pada LU Konstruksi serta LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan laju penyaluran kredit sejalan dengan akselerasi kredit modal kerja dan kredit investasi.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 12,92% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,87% (yoy). Di sisi lain, DPK tumbuh sebesar 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,06% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada tabungan dan deposito, sementara giro tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit tetap terjaga, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (*rasio NPL gross*) yang tercatat sebesar 2,39%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,80% serta tetap di bawah ambang batas 5%.

4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

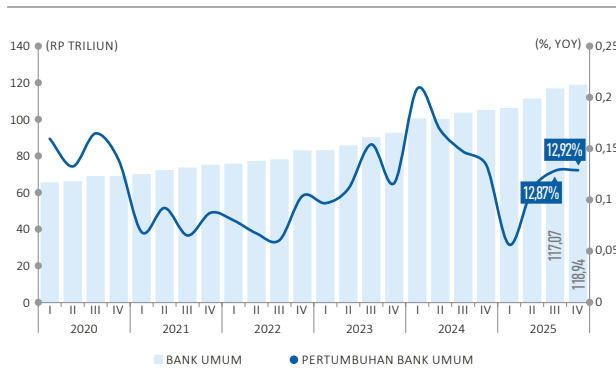
Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 berjumlah Rp118,94 triliun atau tumbuh 12,92% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 12,87% (yoy). Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok Bank Swasta dan BPD yang tumbuh masing-masing sebesar 16,40% (yoy) dan 6,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,32% (yoy) dan 4,44% (yoy). Di sisi lain, aset kelompok Bank Persero mengalami deselerasi dengan tumbuh sebesar 10,65% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,64% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 48,85%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (45,53%), dan BPD (5,62%).

Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

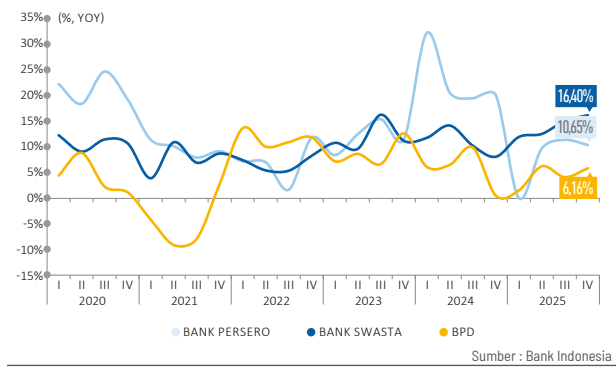
	2024 (Rp Triliun)				2025 (Rp Triliun)				Pertumbuhan (%, YoY)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025
Total Aset*	100,68	100,45	103,72	105,34	106,38	111,55	117,07	118,94	5,66%	11,06%	12,87%	12,92%
Total Dana*	82,20	86,84	89,14	91,07	91,15	95,75	101,67	103,11	10,89%	10,25%	14,06%	13,22%
Total Kredit*	48,61	51,19	51,96	53,11	55,38	57,30	59,82	61,32	13,94%	11,95%	15,12%	15,46%
Total Kredit**	71,72	73,69	74,34	79,32	84,56	85,91	89,65	99,89	17,91%	16,59%	20,61%	25,92%
NPL*	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%	2,80%	2,39%	-	-	-	-
LDR*	87,25%	84,85%	83,39%	87,10%	92,78%	89,72%	88,18%	96,87%	-	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia

*) dari bank yang berlokasi di Kepri,
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri



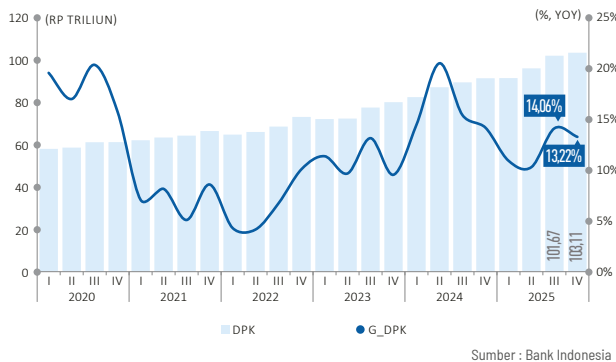
Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



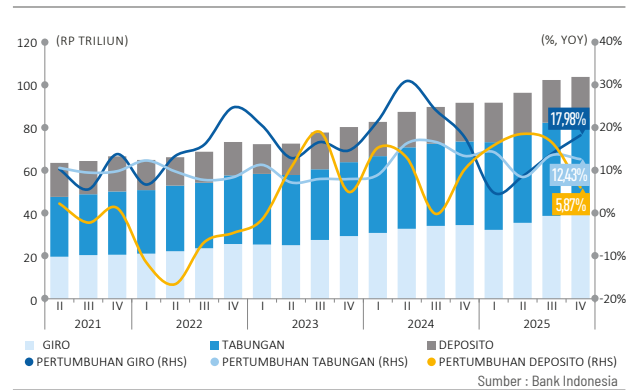
Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan IV 2025, total DPK di Kepri tercatat sebesar Rp103,11 triliun atau tumbuh 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,06% (yoy). Perlambatan tersebut bersumber dari tabungan dan deposito yang masing-masing tumbuh sebesar 12,43% (yoy) dan 5,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 13,36% (yoy) dan 16,40% (yoy). Sementara itu, giro terakselerasi dengan tumbuh sebesar 17,98% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 13,66% (yoy). Struktur DPK pada triwulan IV 2025 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,37%, diikuti giro 39,20% dan deposito 18,43%. Pangsa instrumen giro yang relatif tinggi mengindikasikan preferensi masyarakat atau pelaku usaha untuk menjaga likuiditas yang optimal guna mendukung kelancaran transaksi operasional harian.



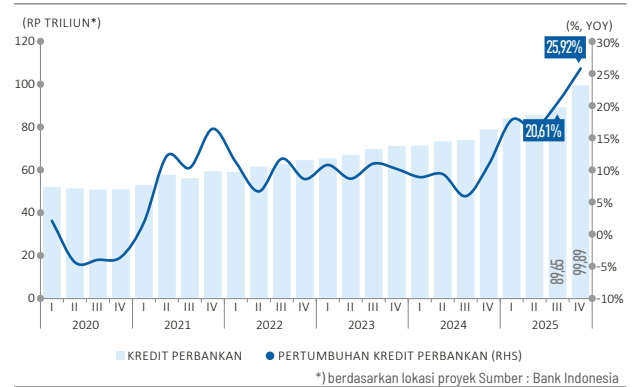
Grafik 4.3 Perkembangan DPK Perbankan



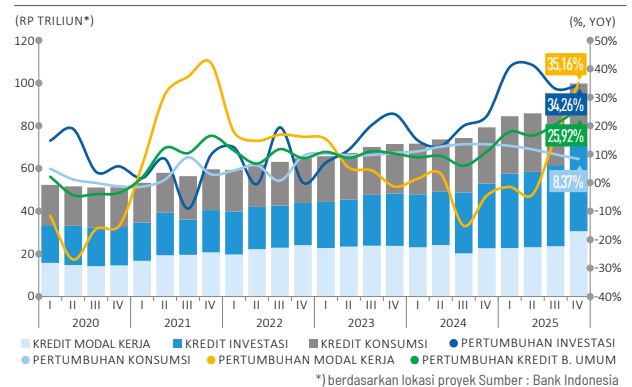
Grafik 4.4 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan

4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di wilayah Kepri pada triwulan IV 2025 sebesar Rp99,89 triliun atau tumbuh 25,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 20,61% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh akselerasi kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 35,16% (yoy) dan 34,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,47% (yoy) dan 33,04% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumsi mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 8,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,96% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan IV 2025 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 40,73%, diikuti oleh kredit modal kerja 30,70% dan kredit konsumsi sebesar 28,57%.



Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan



Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

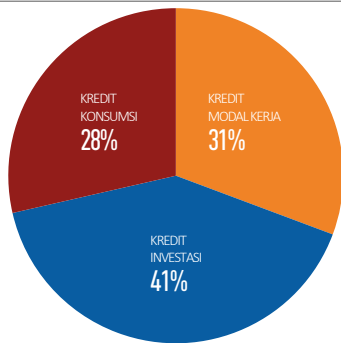
Pada triwulan IV 2025, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,34%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,44%. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing tercatat sebesar 8,03% dan 7,59%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,07% dan 7,76%. Di sisi lain, suku bunga kredit konsumsi mengalami peningkatan menjadi 9,75%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 9,67% pada triwulan III 2025. Di samping itu, suku bunga simpanan (DPK) juga cenderung menurun. Suku bunga giro pada triwulan laporan sebesar 1,87%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,92%, sejalan dengan suku bunga deposito yang turun menjadi 3,90% dari triwulan sebelumnya yang tercatat 4,24%. Adapun suku bunga tabungan turut mengalami penurunan menjadi 0,60%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 0,71% pada triwulan III 2025.

Secara sektoral, peningkatan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek terutama didorong oleh kredit LU Konstruksi yang tumbuh 349,43% (yoy), mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,05% (yoy). LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi juga mengalami akselerasi dari 31,55% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 43,84% (yoy) pada triwulan IV 2025. LU Pertambangan dan Penggalian juga menunjukkan perbaikan, meskipun masih mengalami kontraksi sebesar 18,51% (yoy), membaik dibanding triwulan III 2025 yang terkontraksi 26,95% (yoy). Lebih lanjut, LU Real

Estate, Sewa dan Jasa PT serta LU Perdagangan Besar dan Eceran juga mengalami akselerasi dengan masing-masing tumbuh 58,77% (yoy) dan 6,11% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 55,84% (yoy) dan 5,72% (yoy).

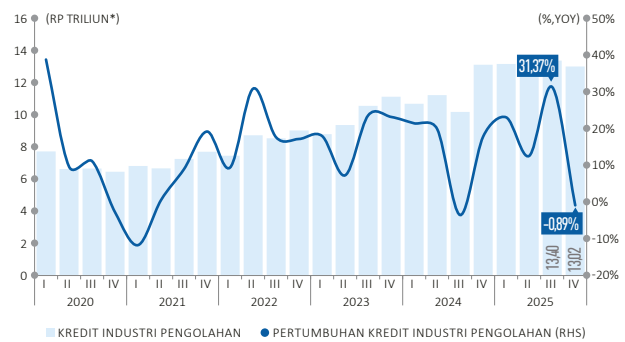
Peningkatan yang lebih tinggi pada triwulan IV 2025 tertahan oleh perlambatan kredit di beberapa sektor di antaranya LU Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,37% (yoy). Selain itu, LU Listrik, Gas, dan Air juga mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 57,19% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 62,03% (yoy).

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan IV 2025 sebesar Rp79,63 triliun atau setara dengan pangsa 79,72% dari total kredit diKepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 7,84% dari total kredit atau sebesar Rp7,83 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 4,71% dari total kredit atau sebesar Rp4,70 triliun dan Kabupaten Bintan dengan pangsa 4,67% dari total kredit atau sebesar Rp4,67 triliun.



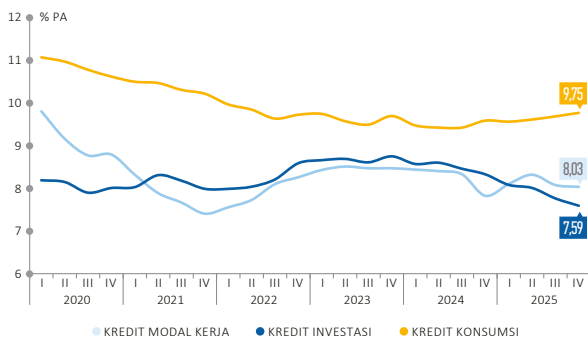
*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



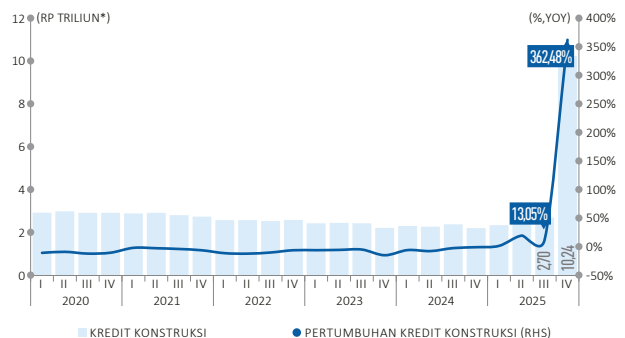
*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.9 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.10 Kredit Konstruksi

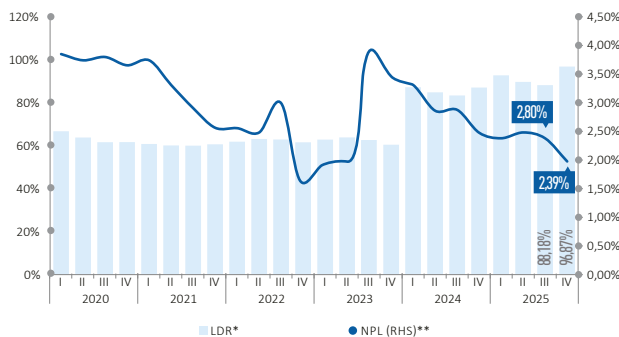
Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

Kabupaten/Kota	Triwulan IV 2025	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Kota Batam	79,63	79,72%
Kota Tanjungpinang	7,83	7,84%
Kab. Karimun	4,70	4,71%
Kab. Lingga	0,84	0,84%
Kab. Natuna	1,84	1,84%
Kab. Bintan	4,67	4,67%
Kab. Kep. Anambas	0,38	0,38%
Total	99,89	100,00%

Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan menjadi 96,87%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 88,18%. Peningkatan LDR tersebut diikuti dengan perbaikan kualitas kredit atau NPL yang mencatatkan angka 2,39%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,80%. Tingkat NPL tersebut masih berada dalam batas risiko yang relatif aman dan masih berada di bawah ambang batas (threshold) 5%



*) berdasarkan lokasi ** berdasarkan lokasi bank proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.11 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri

4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

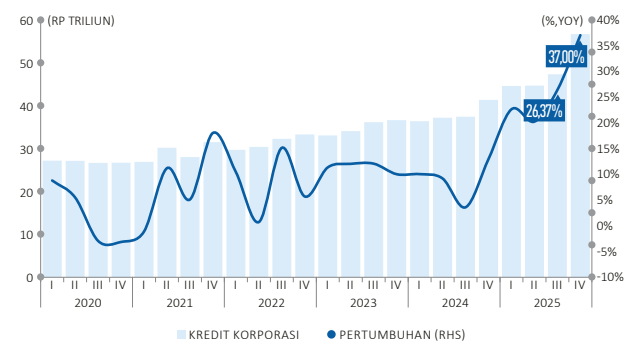
Pembiayaan pada sektor korporasi, rumah tangga, dan UMKM mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Perkembangan ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan yang tetap terjaga seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp56,64 triliun atau tumbuh 37,00% (yoy), lebih tinggi

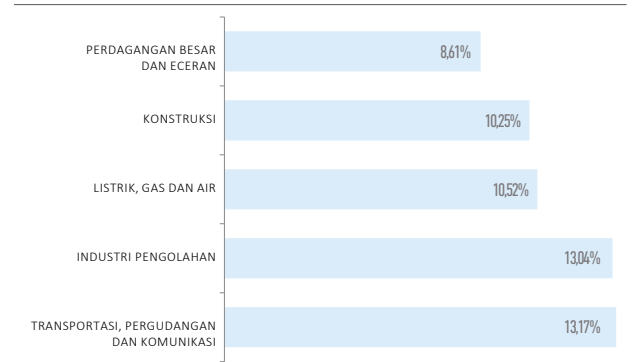
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,37% (yoy). Sejalan dengan penguatan kredit, risiko kredit korporasi juga mengalami perbaikan ditandai dengan NPL kredit korporasi yang menurun menjadi 3,01%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 3,70%.

Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan pangsa sebesar 13,17% dari total kredit. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Industri Pengolahan (13,04%), LU Listrik, Gas, dan Air (10,52%) LU Konstruksi (10,25%), serta LU Perdagangan Besar dan Eceran (8,61%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan IV 2025 masih < 8%.



*) berdasarkan lokasi Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi

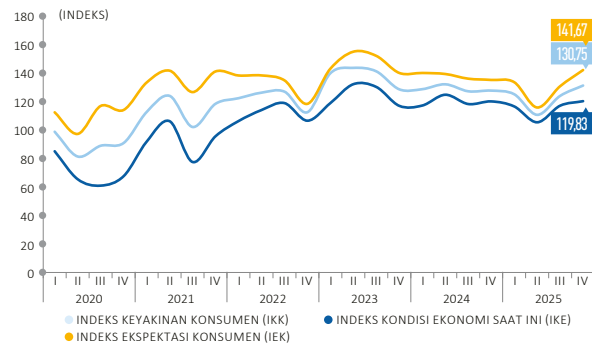


Sumber : Bank Indonesia

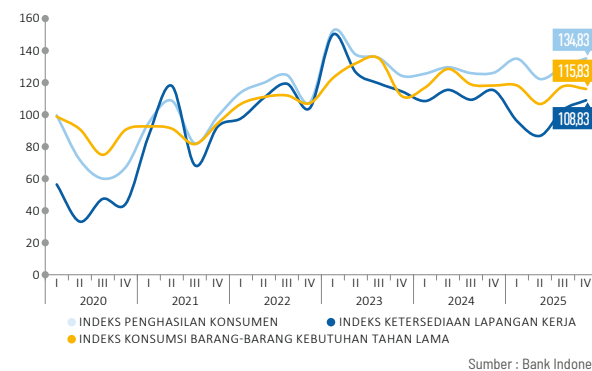
Grafik 4.13 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Ketahanan sektor rumah tangga mengalami peningkatan sejalan dengan terakselerasinya penyaluran kredit rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei triwulanan menunjukkan peningkatan pada rata-rata indeks pada triwulan IV 2025. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) menunjukkan peningkatan dari yang sebelumnya tercatat sebesar 123,50; 116,67; dan 130,33 menjadi 130,75; 119,83; dan 141,67 pada triwulan IV 2025.



Grafik 4.14 Survei Ekspektasi Konsumen

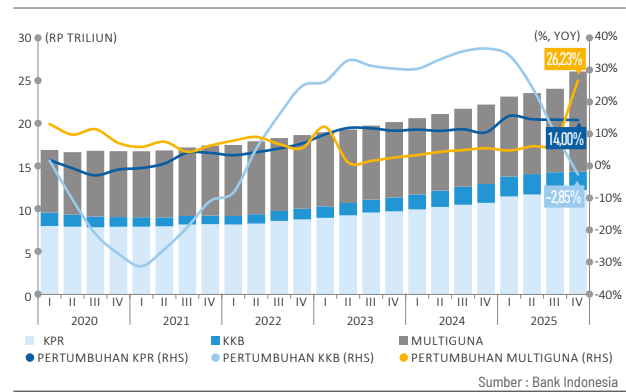


Grafik 4.15 Survei Indeks Penghasilan Konsumen

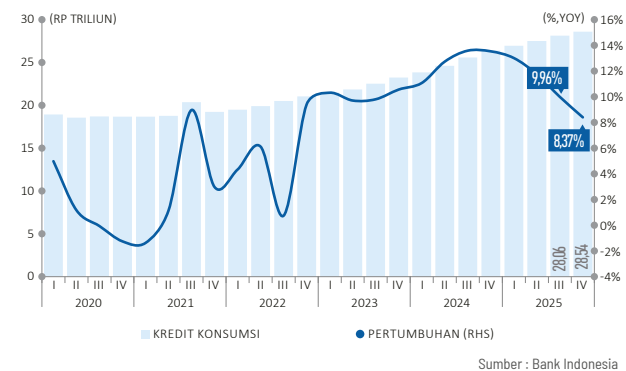
Lebih lanjut, Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025 menjadi sebesar 134,83 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 129,67. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan keyakinan konsumen terjaga pada level optimis (>100), yang mencerminkan persepsi kondisi ekonomi yang membaik sekaligus ekspektasi yang lebih kuat kedepan

Di tengah penguatan keyakinan konsumen, penyaluran kredit rumah tangga juga meningkat. Kredit Rumah Tangga tumbuh sebesar 14,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,00% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh kredit multiguna yang pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 26,23% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,99% (yoy). Sementara itu, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami deselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,12% (yoy) dan 10,04% (yoy) menjadi 14,00% (yoy) dan berkontraksi 2,85% (yoy) pada triwulan IV 2025.

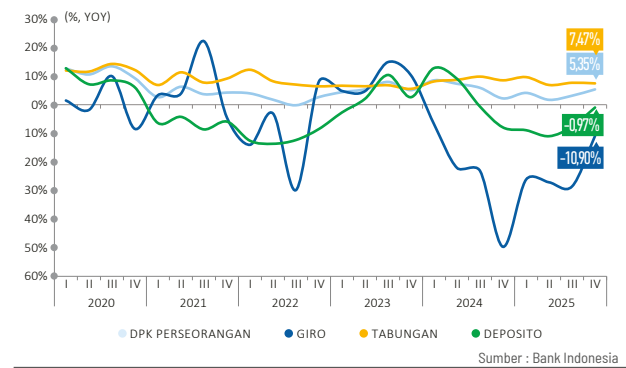
Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,35% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,14% (yoy). Akselerasi tersebut didorong oleh membaiknya kinerja giro dan deposito yang masing-masing berkontraksi sebesar 10,90% (yoy) dan 0,97% (yoy), lebih dangkal dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi masing-masing 28,57% (yoy), dan 7,70% (yoy) pada triwulan III 2025.



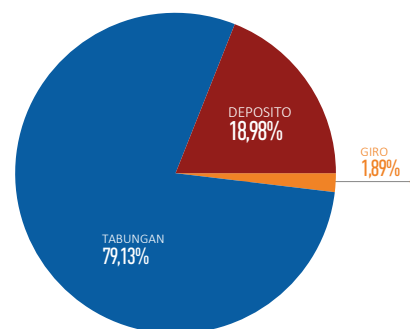
Grafik 4.16 Kredit Rumah Tangga



Grafik 4.17 Kredit Konsumsi



Grafik 4.18 DPK Perseorangan



Grafik 4.19 Pangsa DPK Perseorangan

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Kategori	2022				2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit Rumah Tangga	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%	1,95%	1,69%	1,78%	1,66%	1,60%	1,67%	1,84%	1,97%	2,00%	1,80%
Kredit Pemilikan Rumah	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%	2,32%	2,33%	2,11%	2,08%	2,11%	2,38%	2,41%	2,32%	2,03%
Kredit Kendaraan Bermotor	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%	0,51%	0,58%	0,63%	0,75%	0,89%	0,90%	1,14%	1,10%	1,14%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%	1,13%	1,22%	1,15%	1,34%	1,77%	2,20%	2,83%	3,35%	3,43%
Kredit Multiguna	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%	1,39%	1,43%	1,42%	1,37%	1,41%	1,46%	1,56%	1,63%	1,38%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%	1,24%	1,72%	1,20%	1,28%	1,40%	1,20%	1,37%	1,55%	1,53%

Sumber: Bank Indonesia
) berdasarkan lokasi proyek

Secara umum, pertumbuhan DPK yang meningkat turut ditopang oleh tabungan yang tetap tumbuh 7,47% (yoy) dimana struktur tabungan masih mendominasi pangsa DPK perseorangan dengan pangsa 79,13%, diikuti deposito 18,98% dan giro 1,89%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan IV 2025 tercatat menurun dan masih berada di bawah threshold 5%.

NPL kredit rumah tangga tersebut menurun menjadi 1,80% dari sebelumnya sebesar 2,00% pada triwulan III 2025. Penurunan NPL terjadi pada kategori KPR dari 2,32% menjadi 2,03%, kredit multiguna dari 1,63% menjadi 1,38%, serta kredit lainnya dari 1,55% menjadi 1,53%. Sementara NPL KKB dan kredit peralatan rumah tangga tercatat mengalami peningkatan dengan nilai 1,14% dan 3,43%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 1,10% dan 3,35%.

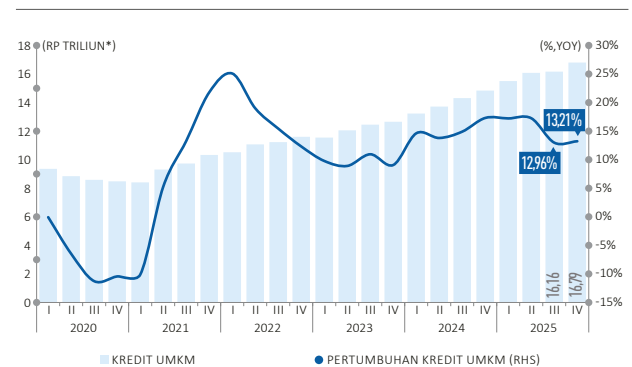
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan IV 2025 terakselerasi disertai penurunan risiko kredit. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,21% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,96% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami penurunan, tecermin dari rasio NPL kredit UMKM yang pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 3,37% menjadi 3,04%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 16,81%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 18,02%. Meski demikian, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Kepri tersebut masih mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM masih ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, serta LU Industri Pengolahan dengan pangsa masing-masing sebesar 35,80%, 20,66%, dan 7,93%.

Penyaluran kredit UMKM yang terakselerasi didorong oleh meningkatnya kredit pada LU Perantara Keuangan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing tumbuh 55,00% (yoy), 21,44% (yoy), dan 4,91% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh -2,72% (yoy), -2,11% (yoy), dan 4,24% (yoy).

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.



Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Inflow Uang Kartal



Tw IV
2025

Rp 507 M



Tw III
2025

Rp 502 M

Outflow Uang Kartal



Tw IV
2025

Rp 3,54 T



Tw III
2025

Rp 2,71 T

Net Flow Uang Kartal



Tw IV
2025

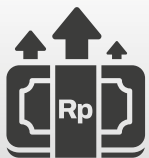
Rp 3,03 T
Net Outflow



Tw III
2025

Rp 2,21 T
Net Outflow

Transaksi RTGS



Tw IV
2025

Rp 64,17 T
24,92% (yoy)



Tw III
2025

Rp 56,85 T
8,83% (yoy)

Transaksi SKNBI



Tw IV
2025

Rp 6,67 T
-2,67% (yoy)



Tw III
2025

Rp 6,36 T
-5,83% (yoy)

Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Selain itu, transaksi pembayaran non-tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.



Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2025 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp3,03 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp2,21 Triliun. Lebih lanjut, transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) juga meningkat. Kondisi ini mencerminkan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap transaksi nontunai yang semakin menguat, didukung kemudahan akses layanan pembayaran nontunai. Peningkatan aktivitas sistem pembayaran tersebut sejalan dengan pertumbuhan positif pada kinerja ekonomi Kepri yang tumbuh 7,89% (yoy) pada triwulan IV 2025, terakselerasi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,48% (yoy).

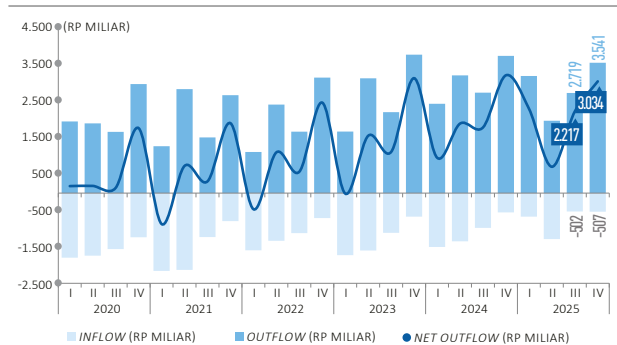
5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow*¹/*Outflow*²)

Pada triwulan IV 2025, pergerakan aliran uang kartal di Kepri tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp3,03 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat *net outflow* sebesar Rp2,21 triliun. Secara rinci, jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan IV 2025 mencapai Rp3,54 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar Rp2,71 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp507 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp502 miliar. Peningkatan *net outflow* mengindikasikan kebutuhan uang tunai masyarakat yang meningkat sejalan dengan kinerja perekonomian Kepri yang tetap tumbuh positif dan mendukung perputaran aktivitas ekonomi. Adapun kondisi tersebut turut mencerminkan perekonomian daerah yang masih kuat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Faktor pendorong tetap kuatnya perekonomian di Kepri antara lain kinerja lapangan usaha utama di Kepri yaitu industri pengolahan yang tumbuh 8,89% (yoy), pertambangan dan penggalan yang tumbuh 18,67% (yoy), konstruksi yang tumbuh 4,11% (yoy), serta perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 7,57% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan juga didukung oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi rumah tangga, serta konsumsi pemerintah yang tetap terjaga.

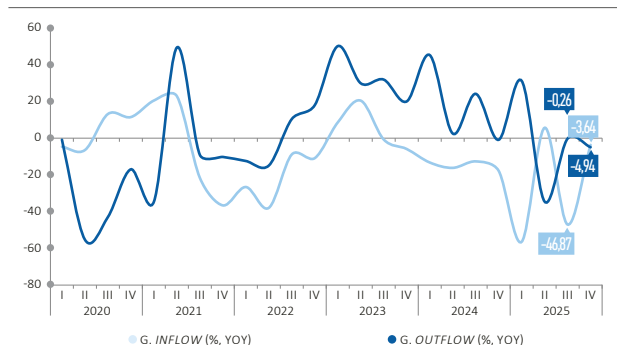
Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat mengoperasikan kas titipan di tiga lokasi, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Selain itu, layanan kas keliling dilakukan di wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) guna menjamin distribusi Rupiah yang layak edar. Pada 2025, Bank Indonesia juga mengadakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke beberapa pulau antara lain Pulau Singkep, Pulau Tambelan, Pulau Subi Besar, Pulau Midai, dan Pulau Tarempa.

1 *Inflow* : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank,
2 *Outflow* : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



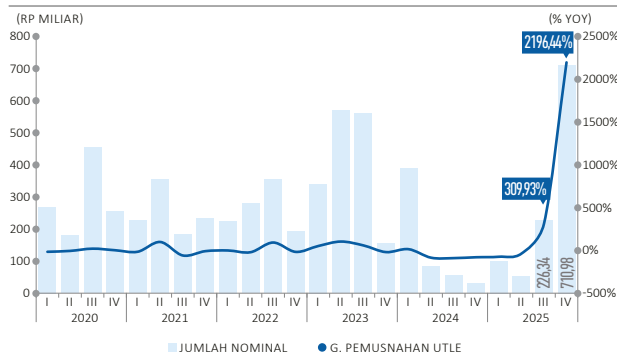
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang dalam peredaran. Proses penyediaannya mencakup penerbitan uang yang berkualitas, pengelolaan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah, layanan kas keliling, serta pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* melalui pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah UTLE yang dimusnahkan pada triwulan IV 2025 tercatat sebanyak Rp710 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp226 miliar. Pemusnahan mencakup uang yang rusak atau tidak memenuhi standar kelayakan edar. Peningkatan pemusnahan UTLE terutama didorong oleh meningkatnya *outflow* atau kebutuhan uang tunai pada periode HBKN Nataru yang jatuh pada triwulan IV 2025. Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga kualitas peredaran uang sejalan dengan masifnya kampanye nasional CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di Kepri. Selain itu, edukasi tentang uang Rupiah kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak tahun 2024.

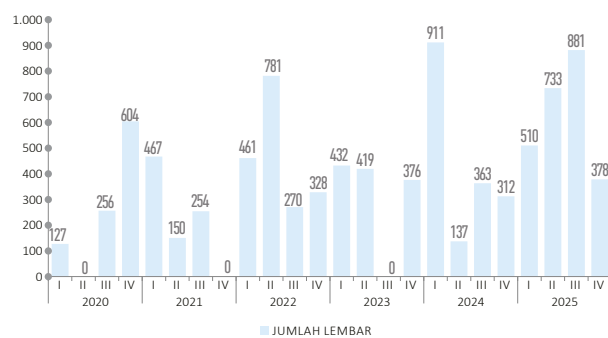


Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE

5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap Rupiah, berbagai kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan kepada masyarakat melalui sosialisasi di beragam kanal. Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah, pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah diharapkan semakin meningkat sehingga dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan IV 2025 terdapat 378 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 881 lembar. Bank Indonesia secara konsisten mendorong edukasi CBP Rupiah termasuk diseminasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum bagi pelaku peredaran uang palsu. Apabila masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi ke kantor Bank Indonesia terdekat dan dihibau untuk melaporkan temuan tersebut dengan menyertakan fisik uang melalui bank atau kepada kepolisian. Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, baik secara langsung atau melalui perbankan, akan diteliti lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia uang tersebut dinyatakan tidak asli, masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

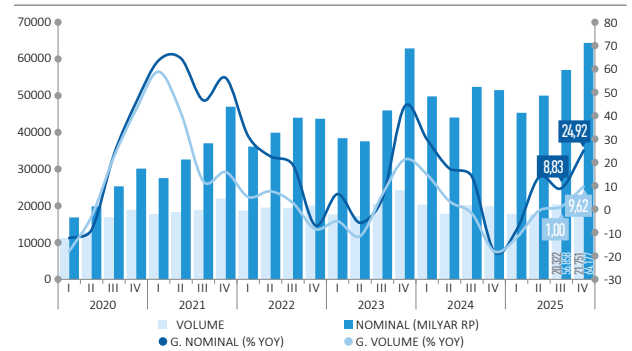


Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu

5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

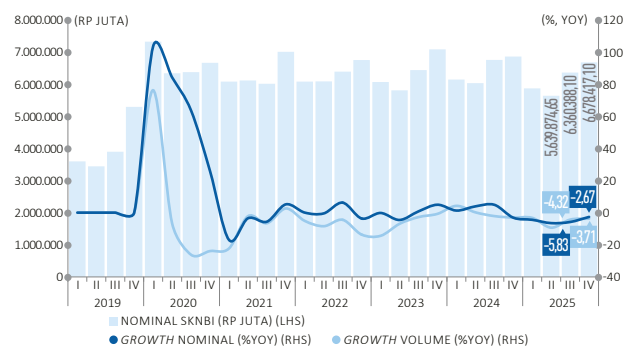
Nominal transaksi sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (RTGS) tumbuh meningkat pada triwulan IV 2025. Nominal transaksi BI-RTGS di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat mencapai Rp64,17 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp56,85 triliun. Secara tahunan, nominal transaksi RTGS pada triwulan IV tumbuh sebesar 24,92% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,83% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 1,00% (yoy). Tren peningkatan transaksi RTGS mengindikasikan menguatnya aktivitas ekonomi dan transaksi bernilai besar pada triwulan berjalan.



Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp6,67 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp6,36 triliun. Namun secara tahunan, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI pada triwulan IV 2025 masih terkontraksi sebesar 2,67% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi 5,83% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan volume transaksi terkontraksi 3,71% (yoy) pada triwulan IV 2025, juga lebih baik



Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

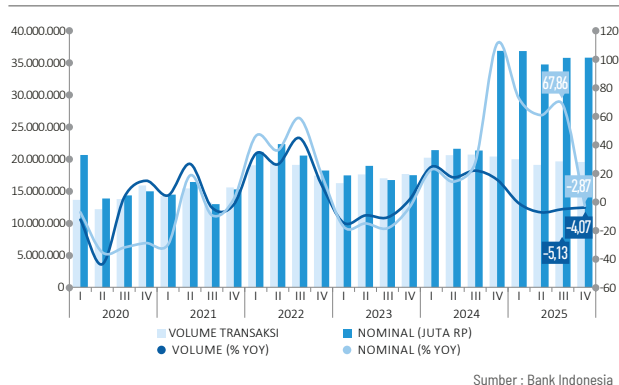
dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 4,32% (yoy). Kontraksi ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat memilih menggunakan layanan SKNBI untuk transaksi cenderung menurun di tengah semakin beragamnya pilihan layanan jasa transfer untuk bertransaksi. Saat ini, selain BI RTGS dan SKNBI, tersedia BI-FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7 dan QRIS dengan lebih banyak kemudahan akses untuk berbagai transaksi.

5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

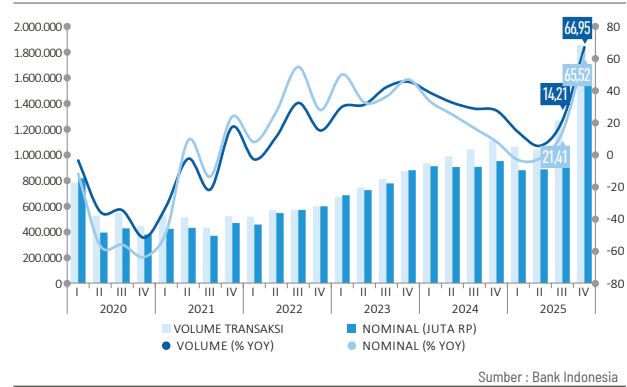
Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan dari sisi volume. Volume transaksi terkontraksi sebesar 4,07% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,13% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi mengalami perlambatan dengan terkontraksi sebesar 2,87% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 67,86% (yoy).

Di sisi lain, transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan IV 2025 mengalami akselerasi. Volume transaksi tumbuh 66,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 21,41% (yoy). Nominal transaksi juga menguat dari 14,21% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 62,52% (yoy) pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan volume dan nominal kartu kredit yang tinggi masih mengindikasikan bahwa konsumsi tetap tumbuh didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.

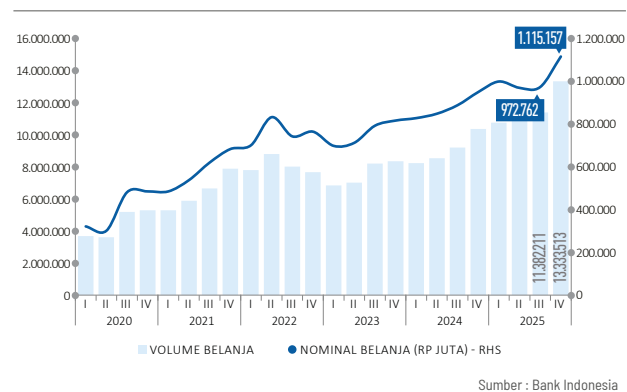
Nilai transaksi UE di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat Rp1,11 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar Rp972,76 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan volume belanja yang mengalami peningkatan dari 11,38 juta transaksi menjadi 13,33 juta transaksi pada triwulan IV 2025. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pembayaran digital seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Untuk terus mendorong transaksi nontunai, Bank Indonesia memperkuat perluasan akseptasi pembayaran digital, khususnya melalui QRIS.



Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit



Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

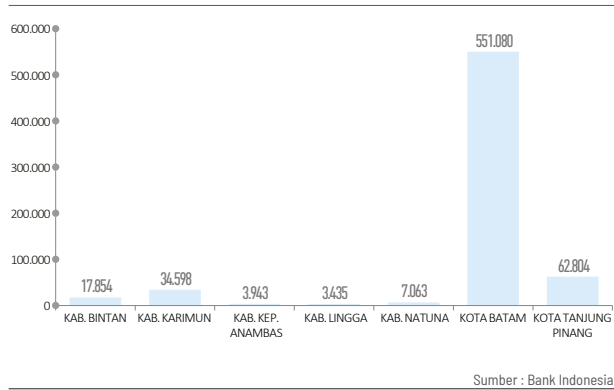


Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

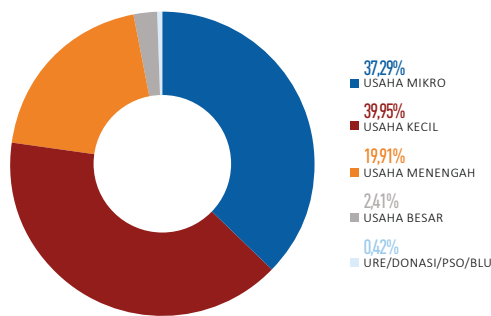
5.2.4 Perkembangan QRIS

Implementasi QRIS di Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan IV 2025 tercatat penambahan sebanyak 11.308 pengguna baru atau tumbuh sebesar 2,05% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 1,51% (qtq). Dengan demikian, total pengguna QRIS di Kepri hingga triwulan IV 2025 telah mencapai 564.088 pengguna. Dari sisi transaksi, pada triwulan IV 2025 tercatat 34.506.027 transaksi, atau terkontraksi sebesar 3,20% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 118,97% (qtq). Nominal transaksi QRIS di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp3,83 triliun atau tumbuh sebesar 6,49% (qtq).

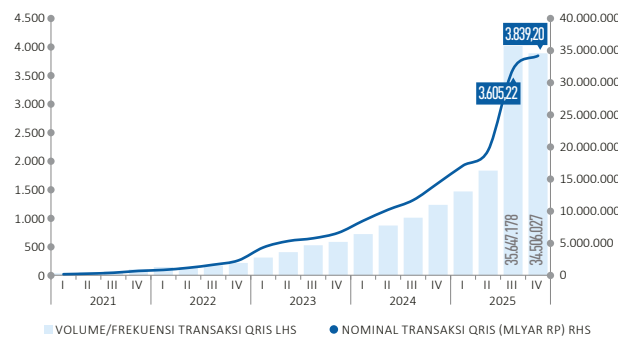
Hingga triwulan IV 2025, jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 680.777 merchant, atau tumbuh 17,53% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,14% (yoy). Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (80,95%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (9,23%) dan Kab. Karimun (5,08%). Merchant QRIS di Kepri didominasi oleh kategori Usaha Kecil dengan pangsa sebesar 39,95%, kategori Usaha Mikro dengan pangsa sebesar 37,29%, dan Usaha Menengah sebesar 19,91%. Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 97,16% merchant QRIS di Kepri termasuk dalam kategori UMKM.



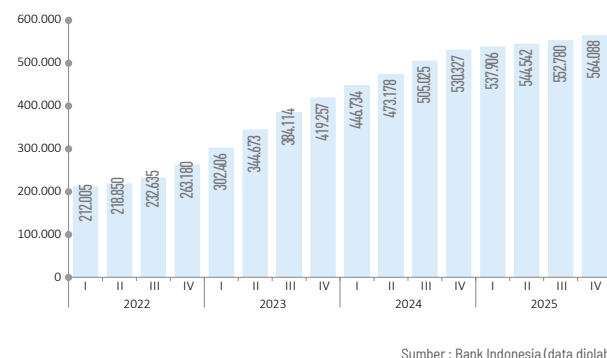
Grafik 5.10 Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri triwulan IV 2025



Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kelompok Usaha triwulan IV 2025



Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Mempertimbangkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan pusat akulturasi dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, Bank Indonesia Kepri memperkuat strategi dalam peningkatan pengguna QRIS melalui sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, *showcasing*, dan *onboarding* QRIS. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan hingga triwulan IV 2025 antara lain:

1. Sinergi dan Kolaborasi bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
2. Perluasan komunikasi QRIS Cross-Border khususnya pada kawasan wisata dan transportasi internasional seperti Kapal Ferry.
3. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.
4. Pemberian *Reward* bagi *merchant* dan *user* bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.
5. Edukasi/ sosialisasi/ *onboarding*/ hiburan/ perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya:
 - a. QRIS Goes to School/Campus;
 - b. Kolaborasi pada kegiatan/event strategis di Kepri;
 - c. Sinergi event strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia.
6. Sinergi QRIS dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).
7. *On boarding* sektor pariwisata seperti hotel, *travel agent*, dan objek wisata.
8. *Showcase* dan QRIS Experience pada event strategis untuk memperluas transaksi QRIS.

Bank Indonesia Kepri konsisten mendorong pelaku usaha di sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk mengimplementasikan QRIS sekaligus mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi. Sepanjang periode laporan, Bank Indonesia Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi event yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para *stakeholders* terkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bersama Rayakan Festival Digital Masyarakat Kepulauan Riau (BERLAYAR) 2025 yang merupakan gerakan inklusi digital di wilayah perbatasan melalui festival kreatif yang mengintegrasikan budaya lokal dengan teknologi pembayaran digital.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan memperkuat perluasan QRIS, khususnya QRIS *Cross-Border* sejalan dengan letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Selain itu, Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan pintu keluar masuk turis mancanegara.

5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

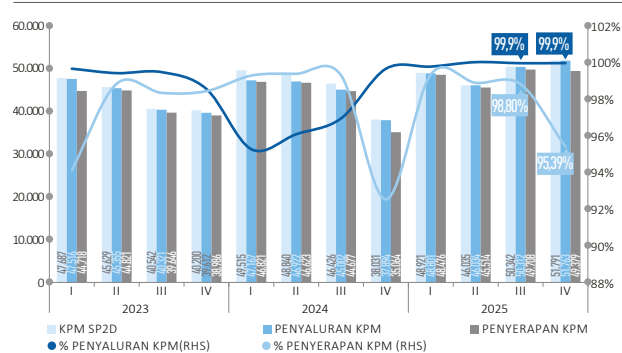
Pengembangan ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan kanal pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri mendorong dari aspek implementasi, realisasi, maupun lingkungan strategis, antara lain melalui perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan *Teller* untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan hingga triwulan IV 2025 antara lain:

- Rapat koordinasi dan *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.
- Memfasilitasi koordinasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & Integrasi *Cash Management System* (CMS).
- Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.
- Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.
- Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu dan strategi TP2DD.
- High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk eskalasi isu strategis dan mendorong *political will* kepala daerah.
- Benchmarking* dan Studi Banding dengan daerah lain.

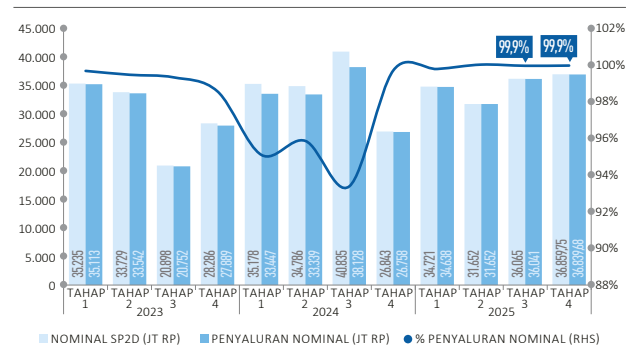
5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

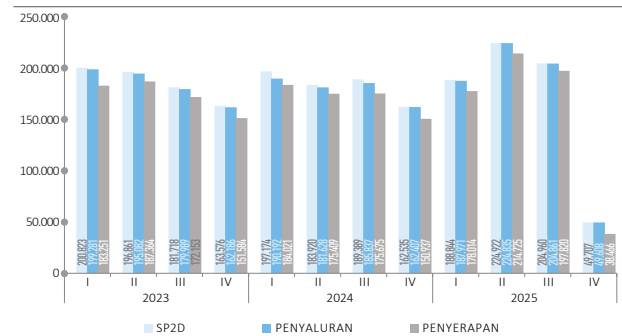
Realisasi penyaluran bantuan PKH pada tahap 4 yang mencakup periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 secara nominal telah mencapai sebesar Rp36,83 miliar, atau 99,95% dari pagu sebesar



Grafik 5.14 Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 5.15 Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Sumber: Bank Indonesia, diolah (data per Agustus 2025)

Grafik 5.16 Penyaluran Program Sembako Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri

Rp36,85 miliar dengan target penyaluran sebanyak 51.791 KPM. Penyerapan bantuan PKH telah diserap oleh 51.763 KPM atau sebesar 99,95% dari target. Sementara itu, penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM pada triwulan IV 2025 adalah sebesar 49.707 penerima dengan tingkat penyerapan 77,54% dari target penyaluran.

5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

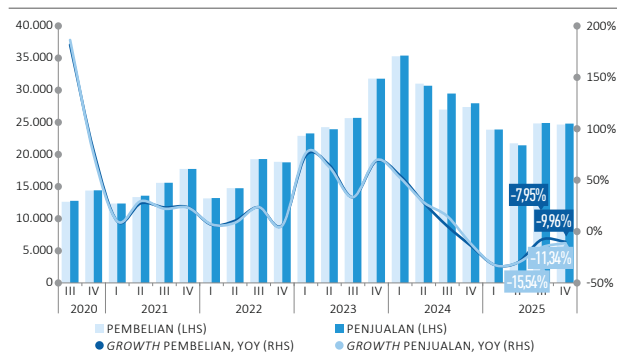
Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan *monitoring*

perizinan dan pengawasan terhadap operasional 120 KUPVA BB dan 70 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan IV 2025.

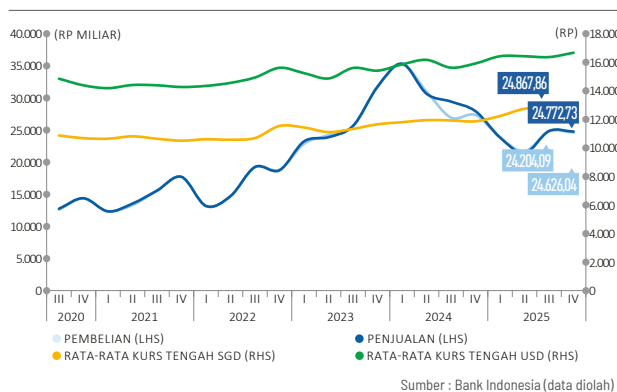
5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Perkembangan KUPVA BB di Kepri pada Triwulan IV 2025 menunjukkan perubahan jumlah jaringan kantor jika dibandingkan dengan triwulan III 2025. Jumlah Kantor Pusat (KP) KUPVA BB meningkat dari 118 menjadi 120 kantor di triwulan IV 2025. Sementara itu, jumlah Kantor Cabang (KC) tidak berubah yakni tetap sebanyak 72 kantor.

Pada triwulan IV 2025, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 69,77% atau sejumlah Rp34,46 triliun, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 20,68% atau sejumlah Rp10,21 triliun, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 4,96% atau sejumlah Rp2,45 triliun, Renminbi Tiongkok (CNY) sebesar 1,94% atau sejumlah Rp956,81 miliar, dan mata uang lainnya sebesar 2,65% atau sejumlah Rp1,30 triliun. Secara keseluruhan, total transaksi UKA pada Triwulan IV 2025 setara dengan Rp49,39 triliun, mengalami penurunan sebesar 0,55% (qoq) atau turun setara dengan Rp273,64 miliar dibandingkan triwulan III 2025.



Grafik 5.17 Perkembangan Transaksi KUPVA

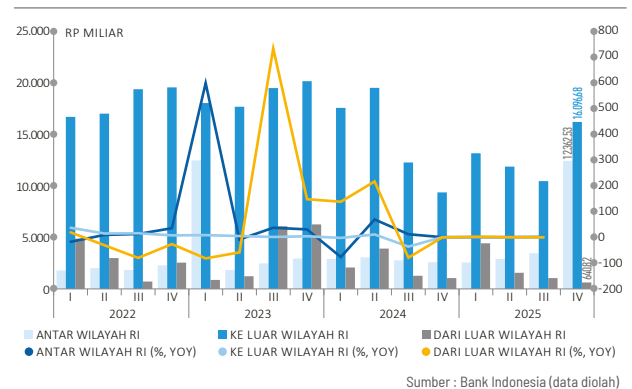


Grafik 5.18 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

5.3.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia atau transaksi *outgoing* sebesar 55,31%, diikuti transaksi antar wilayah Indonesia atau transaksi domestik dengan pangsa sebesar 42,48% dan transaksi dari luar wilayah Indonesia atau transaksi *incoming* sebesar 2,20%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pada triwulan IV 2025, PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana dari wilayah Indonesia ke luar negeri antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya.

Jumlah PJP LR di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 meningkat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dari 68 menjadi 70 PJP LR. Dari nominal transaksi, transaksi domestik dan *outgoing* mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi domestik tumbuh 380,17% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 24,62% (yoy). Transaksi *outgoing* juga tumbuh pada triwulan IV sebesar 72,94% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 14,66% (yoy). Adapun transaksi *incoming* mengalami kontraksi sebesar 39,07% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 16,13% (yoy). Secara umum, pada triwulan IV 2025 total pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri meningkat dari yang sebelumnya terkontraksi sebesar 8,08% (yoy) menjadi tumbuh 124,99% (yoy) atau dari sebesar Rp14,91 triliun pada triwulan III 2025 menjadi sebesar Rp29,10 triliun pada triwulan IV 2025.



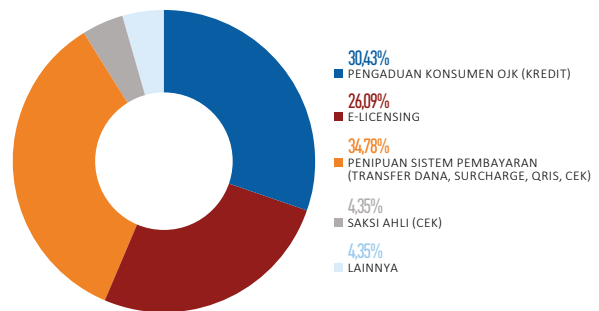
Grafik 5.19 Perkembangan Transaksi Pada PJP LR

5.3.3 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara aktif melakukan fungsi edukasi perlindungan konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial. Hingga triwulan IV 2025 telah dilaksanakan berbagai edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan di dunia digital. Kegiatan ini meliputi seminar, sosialisasi, dan kuis yang berfokus pada edukasi

hak dan kewajiban konsumen antara lain perlindungan data pribadi, tips dan trik aman bertransaksi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai modus penipuan digital. Pemanfaatan media sosial juga dioptimalkan untuk mensosialisasikan informasi penting terkait perlindungan konsumen. Edukasi perlindungan konsumen turut dilakukan melalui kunjungan sekolah serta sosialisasi pada event Gebyar Melayu Pesisir dan Bersama Rayakan Festival Digital Masyarakat Kepulauan Riau (BERLAYAR). Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi luring dan bazaar, serta diperkuat melalui edukasi di stasiun radio berupa siaran langsung dan himbauan kepada masyarakat di Kota Batam.

Sepanjang tahun 2025, KPwBI Kepri telah menerima 23 (dua puluh tiga) pengaduan konsumen dan seluruhnya telah diselesaikan, meliputi pengaduan konsumen pembiayaan, *e-licensing*, penipuan sistem pembayaran, saksi ahli, serta lainnya.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.20 Jumlah Pengaduan Pelindungan Konsumen Sepanjang Tahun 2025



BOKS 3

Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri

Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan Idulfitri 1447 H, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BI Kepri) bersama perbankan menggelar program **SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri) 2026**. *Kick Off* kegiatan berlangsung pada Jumat, 13 Februari 2026 di Gedung BI Kepri, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Kepri, Sekda Provinsi Kepri, Kepala OJK Kepri, pimpinan perbankan, serta media lokal dan nasional. Program ini hadir sebagai upaya Bank Indonesia untuk memastikan ketersediaan uang layak edar bagi masyarakat selama Ramadhan dan Idulfitri, sekaligus mengedukasi pentingnya **Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah**.

Kebutuhan uang kartal masyarakat Kepri diperkirakan mencapai **Rp2,9 triliun** sepanjang Ramadhan dan Idulfitri 2026. Angka tersebut meningkat **38%** dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,1 triliun. Peningkatan kebutuhan uang ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin membaik, meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode mudik, serta kenaikan aktivitas belanja menjelang hari raya.

SEMARAK KAMPANYE CBP RUPIAH

Untuk melayani kebutuhan tersebut, BI Kepri menyiapkan **Layanan Penukaran Uang secara ritel, terpadu, tematik, dan loket perbankan dengan jumlah titik layanan menggunakan aplikasi Pintar sebanyak 54 titik, mencakup 16 loket perbankan (16 Bank), layanan terpadu 2 hari, dan layanan tematik 7 hari. Optimalisasi layanan dilakukan melalui berbagai kanal, antara lain:**

- **Kas keliling** di rumah ibadah, instansi pemerintahan, dan mall perbelanjaan.
- **Penukaran bersama BI dan perbankan** pada 9-10 Maret 2026 di One Batam Mall dengan kuota 1.000 orang.

- Penukaran di **16 loket perbankan** melalui aplikasi PINTAR dan seluruh perbankan yang berada di Kepri.
- Perluasan layanan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) melalui layanan kas keliling di Pulau Senayang (Kabupaten Lingga) serta dukungan kas titipan di Karimun, Tanjungpinang, dan Natuna.

Kegiatan SERAMBI 2026 juga diwarnai dengan kampanye **"Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah"**. Pesan ini mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak, mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan, serta mendukung produk UMKM lokal. Edukasi CBP Rupiah dilakukan bersamaan dengan layanan kas keliling dan penukaran uang, menyasar masyarakat di berbagai titik, mulai dari masjid, mall, instansi pemerintahan, hingga bazar Ramadhan seperti **Kepri Ramadhan Fair (Kurma)** di Batam dan Tanjungpinang.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap semangat cinta, bangga, dan paham Rupiah semakin meningkat. Hal ini penting terutama untuk mendukung kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan. Puncak kegiatan SERAMBI disemarakkan dengan kegiatan penukaran uang jelang Idulfitri di pusat perbelanjaan agar masyarakat bisa menukar uang dengan nyaman.

Melalui SERAMBI 2026, BI Kepri tidak hanya memastikan ketersediaan uang layak edar, tetapi juga mengajak masyarakat Kepri untuk bijak mengelola Rupiah, mendukung UMKM lokal, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah di momen penuh berkah ini.



Gambar B3.1 Rangkaian Kegiatan Kick Off SERAMBI 2026 di KPw BI Provinsi Kepulauan Riau



Gambar B3.2 Sambutan Kepala Perwakilan Acara Kick Off SERAMBI 2026



Gambar B3.3 Pelepasan Mobil Kas Keliling BI, BNI, BRI, BTN, Mandiri, BRK Syariah, BSI, Maybank, CIMB NIAGA dan Bank BJB



BAB VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja



Agustus
2025

1.124.530
Orang



Agustus
2024

1.120.660
Orang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Agustus
2025

68,23%



Agustus
2024

69,17%

Tingkat Pengangguran Terbuka



Agustus
2025

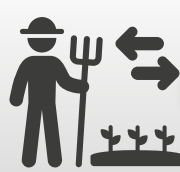
6,45%



Agustus
2024

6,39%

Nilai Tukar Petani



Tw IV
2025

105,61



Tw III
2025

103,03

Tingkat Kemiskinan



September
2025

4,26%



September
2024

4,78%

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun
2025

80,53



Tahun
2024

79,89

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.



6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 Ketenagakerjaan¹

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri yang tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)² relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis secara tahunan. TPT pada Agustus 2025 berada pada level 6,45%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat 6,39%. Secara spasial, perubahan TPT tersebut terjadi karena perbedaan kondisi antar wilayah. TPT perdesaan meningkat dari 2,50% pada Agustus 2024 menjadi 3,56% pada Agustus 2025, sementara TPT perkotaan mengalami perbaikan dari 6,74% pada Agustus 2024 menjadi 6,70% pada Agustus 2025.

Pada Sakernas 2025, terdapat penyesuaian pola rilis sehingga publikasi data dilakukan secara triwulanan. Pada November 2025, TPT Kepri tercatat 6,35%, turun 0,10 persen poin dibanding Agustus 2025. Pada periode yang sama, TPT perdesaan tercatat sebesar 3,89%, naik 0,33 persen poin, sedangkan TPT perkotaan sebesar 6,55%, menurun 0,15 persen poin dibanding periode sebelumnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan menurun pada kelompok pendidikan SMP ke bawah dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas) masing-masing dari rata-rata sebesar 5,87% dan 4,84% pada Agustus 2024 menjadi 3,17% dan 4,69% pada Agustus 2025. Perkembangan ini mengindikasikan perbaikan serapan tenaga kerja pada kedua kelompok pendidikan tersebut. Sementara itu, pada kelompok SMA/SMK TPT meningkat dari rata-rata

sebesar 7,32% pada Agustus 2024 menjadi 8,95% pada Agustus 2025.

Pada November 2025, TPT pada kelompok pendidikan SMP kebawah dan Perguruan Tinggi tercatat masing-masing sebesar 3,35% dan 10,80%, meningkat 0,18 persen poin dan 6,11 persen poin dibanding Agustus 2025. Adapun TPT kelompok SMA/SMK tercatat 6,58%, membaik 2,37 persen poin dibandingkan periode sebelumnya.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 25,14% dari jumlah tenaga kerja pada November 2025. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (17,56%), LU Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan (13,77%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,57%), dan LU Konstruksi (8,18%).

Secara tahunan, pangsa kelompok berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, dan pekerja bebas mengalami penurunan masing-masing 0,92 persen poin, 0,41 persen poin, 2,29 persen poin dan 0,47 persen poin pada bulan Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap dan

Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	2023		2024		2025			Perubahan Ags - Nov2025	
	Feb'23	Ags'23	Feb'24	Ags'24	Feb'25	Ags'25	Nov '25	Orang	% Perubahan*
Angkatan Kerja (orang)	1.107.353	1.093.686	1.078.170	1.120.660	1.097.750	1.124.530	1.131.690	7.160	0,64%
Bekerja	1.023.125	1.019.356	1.003.390	1.049.090	1.016.540	1.051.980	1.059.850	7.870	0,75%
Pengangguran	84.228	74.330	74.780	71.570	75.210	72.560	71.840	(720)	-0,99%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,61%	6,80%	6,94%	6,39%	6,89%	6,45%	6,35%		-0,10%
- Perdesaan	4,71%	7,00%	5,73%	2,50%	5,89%	3,56%	3,89%		0,33%
- Perkotaan	7,90%	6,77%	7,06%	6,74%	6,99%	6,70%	6,55%		-0,15%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,29%	68,68%	67,14%	69,17%	66,84%	68,23%	68,39%		0,16%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran										
		Feb'21	Agt'21	Feb'22	Aug'22	Feb'23	Agt'23	Feb'24	Aug'24	Feb'25**	Agt'25	Nov'25
1	≤SD	5,37%	7,76%	4,05%	3,31%	4,78%	5,44%	3,97%	5,48%			
2	SMP	8,61%	11,72%	8,69%	10,38%	6,45%	5,87%	10,47%	6,26%	5,76%	3,17%	3,35%
3	SMA	11,18%	11,75%	10,83%	11,03%	10,33%	7,85%	6,14%	7,80%			
4	SMK	13,39%	9,96%	8,24%	11,34%	9,41%	9,99%	10,17%	6,83%	7,85%	8,95%	6,58%
5	Diploma I/II/III	15,23%	8,82%	10,00%	3,51%	8,16%	2,93%		5,32%			
6	Universitas	9,59%	7,09%	5,30%	2,50%	5,12%	3,53%	7,86*	4,36%	6,33%	4,69%	10,80%

*Terdapat perubahan pola rilis di TPT Diploma dan Universitas. Rilis sebelumnya angkanya dipisah, namun per Feb 24 digabung

**Terdapat perubahan pola rilis berdasarkan pendidikan yang dibagi pada 3 kategori saja yaitu SMP ke Bawah, SMA/SMK, Perguruan Tinggi

Sumber: BPS (diolah)

- 1 Pada sakernas 2025, indikator ketenagakerjaan dirilis pada periode Februari, Agustus, dan November 2025.
- 2 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Feb'21	Agt'21	Feb'22	Aug'22	Feb'23	Agt'23	Feb'24	Agt'24	Feb'25	Aug'25	Nov'25
1	Industri Pengolahan	26,14%	25,01%	24,54%	25,77%	27,42%	25,23%	21,73%	23,65%	20,81%	24,16%	25,14%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	20,16%	17,67%	20,09%	17,41%	17,24%	16,45%	15,94%	16,59%	14,96%	16,58%	17,56%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	13,94%	6,02%	12,95%	5,15%	13,92%	5,55%	17,78%	5,76%	17,17%	14,38%	13,77%
4	Konstruksi	8,49%	6,64%	9,46%	7,14%	8,02%	7,74%	8,32%	8,03%	6,85%	7,37%	8,18%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,98%	9,00%	7,17%	7,80%	5,59%	8,36%	7,77%	7,08%	8,77%	7,49%	8,16%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,82%	7,54%	6,16%	10,19%	9,63%	9,01%	11,16%	10,82%	11,58%	10,87%	11,57%
7	Transportasi dan Pergudangan (pengangkutan)	5,79%	6,05%	6,15%	6,34%	5,39%	6,22%	5,98%	6,46%	5,96%	6,34%	5,51%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	4,78%	1,48%	6,06%	2,07%	5,87%	1,72%	4,86%	1,36%	6,19%	5,74%	3,97%
9	Jasa Lainnya	4,63%	5,08%	5,80%	6,43%	5,62%	6,24%	4,99%	5,26%	5,58%	5,15%	5,36%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	1,27%	1,83%	1,62%	1,32%	1,30%	2,11%	1,46%	2,15%	2,13%	1,92%	0,78%

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2021		2022		2023		2024		2025		
		Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Nov
1	Berusaha Sendiri	19,06	20,90	15,46	19,80	15,75	20,17	16,86	17,42	16,82	16,50	16,38
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	6,34	6,10	7,55	5,77	6,59	5,63	7,05	6,06	6,02	8,12	5,20
3	Berusaha dibantu buruh tetap	3,60	3,15	3,93	3,23	3,86	3,77	3,42	4,29	3,60	3,87	4,06
4	Buruh/karyawan	61,04	64,79	62,57	60,45	67,78	62,56	63,38	64,16	63,98	61,87	63,32
5	Pekerja Bebas	4,22	4,02	3,41	4,12	1,06	1,71	3,61	2,30	4,26	1,83	3,18
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	5,74	5,90	7,08	6,63	4,96	6,17	5,68	5,77	5,36	7,78	5,86
TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (diolah)

pekerja keluarga yang masing-masing meningkat sebesar 2,06 persen poin dan 2,01 persen poin pada bulan Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada November 2025, Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 65,32%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 16,38%, dan pekerja keluarga / tak dibayar dengan porsi sebesar 5,86%.

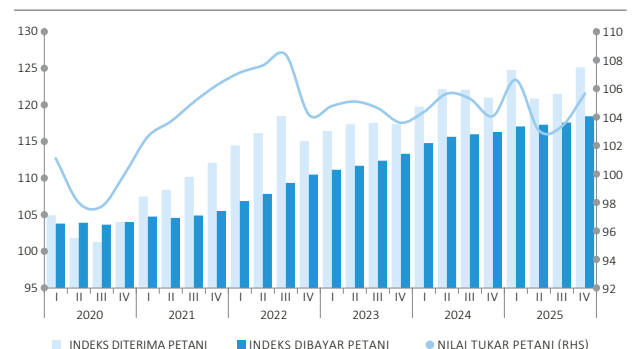
6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan IV 2025 yang merupakan rata-rata bulan Oktober - Desember 2025 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya (rata - rata bulan Juli - September 2025). Rata-rata NTP pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 105,61, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,33. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya NTP pada sub-kelompok Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Rakyat, dan Perikanan.

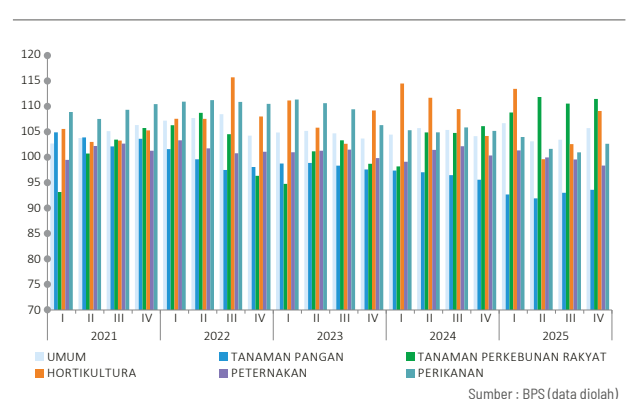
Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 111,31, sementara NTP terendah tercatat pada sub-kelompok Peternakan sebesar 98,28. Sub kelompok Hortikultura mencatatkan kenaikan dari 102,48

pada triwulan III 2025 menjadi 108,96 pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, penurunan turut terjadi pada sub-kelompok Peternakan yang tercatat 99,47 pada triwulan III 2025 menjadi 98,28 pada triwulan IV 2025.



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.1 Perkembangan NTP



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor

Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok																
	2022				2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Tanaman Pangan																
a. Indeks yang Diterima (It)	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	111,16	112,62	113,22	112,92	112,18	109,48	108,71	110,36	111,94
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	113,99	115,74	116,75	117,14	117,46	118,21	118,35	118,72	119,69
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	97,52	97,31	96,97	96,40	95,51	92,62	91,86	92,96	93,53
2. Hortikultura																
a. Indeks yang Diterima (It)	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	123,46	131,29	129,21	126,97	121,16	132,47	116,58	120,35	129,11
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25	113,18	115,12	115,82	116,13	116,42	116,94	117,13	117,43	118,44
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	109,07	114,34	111,56	109,34	104,07	113,29	99,53	102,48	108,96
3. Tanaman Perkebunan Rakyat																
a. Indeks yang Diterima (It)	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	112,52	113,59	122,35	123,23	124,58	128,65	132,43	131,27	133,52
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	114,08	115,77	116,78	117,24	117,53	118,39	118,57	118,90	119,96
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	98,63	98,12	104,77	104,67	106,00	108,66	111,69	110,40	111,31
4. Peternakan																
a. Indeks yang Diterima (It)	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	111,37	111,82	115,15	115,10	114,56	116,77	115,48	115,38	114,75
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	112,03	112,93	113,62	80,59	114,27	115,34	115,63	116,00	116,76
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	99,73	99,02	101,35	102,06	100,26	101,25	99,87	99,47	98,28
5. Perikanan																
a. Indeks yang Diterima (It)	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	119,86	120,08	120,26	121,10	121,23	120,67	117,72	117,68	120,24
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	112,88	114,16	114,77	115,05	115,39	116,17	116,46	116,67	117,25
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	106,20	105,19	104,78	105,74	105,06	103,88	101,54	100,86	102,55
Umum																
a. Indeks yang Diterima (It)	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,49	117,31	119,70	122,08	122,03	120,94	124,69	120,79	121,45	125,05
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	112,34	113,27	114,73	115,59	115,94	116,25	117,01	117,24	117,53	118,39
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,59	103,57	104,33	105,61	105,25	104,04	106,57	103,03	103,33	105,61

Sumber: BPS (data diolah)

6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2025 tercatat sebanyak 114.550 orang, menurun dibanding Maret 2025 sebesar 117.280 orang. Sejalan dengan itu, garis kemiskinan pada September 2025 meningkat dari Rp832.410/kapita/bulan pada Maret 2025 menjadi Rp870.738/kapita/bulan pada September 2025. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode September 2025 tercatat sebesar 0,601%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2025 yang sebesar 0,688%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2025 turut mengalami penurunan dari 0,179% pada Maret 2025 menjadi sebesar 0,145% pada September 2025.

Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

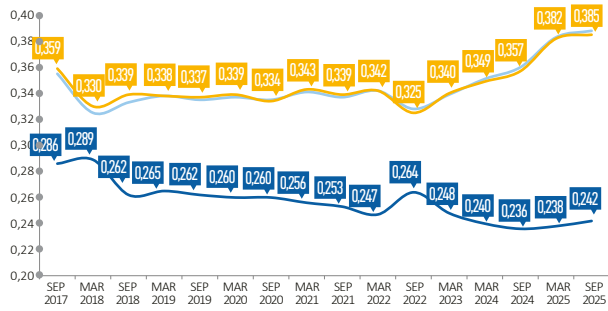
	2021		2022		2023	2024		2025	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Mar	Sept	Mar	Sept
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500	138.300	124.960	117.280	114.550
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	5,37	4,78	4,44	4,26
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	787.211	807.602	832.410	870.738
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823	0,704	0,635	0,688	0,601
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181	0,146	0,143	0,179	0,145
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%	-7,11%	-12,31%	-15,20%	-8,33%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%	7,77%	8,76%	5,74%	7,82%

Sumber: BPS (data diolah)

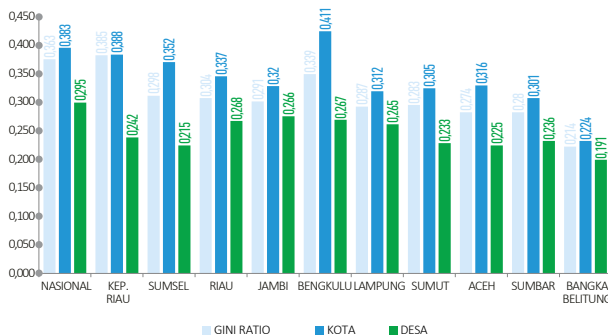
6.2.3 Gini Ratio (GR)

Gini Ratio³ Provinsi Kepri pada September 2025 tercatat sebesar 0,385, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,382. Kenaikan *Gini Ratio* mengindikasikan bahwa adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri pada periode Maret – September 2025. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan. *Gini Ratio* perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,388, meningkat dari Maret 2025 sebesar 0,383. Sementara itu, *Gini Ratio* di perdesaan tercatat sebesar 0,242, meningkat dari Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,238. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks *Gini Ratio* di Provinsi Kepri adalah yang

3 *Gini Ratio* merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. *Gini Ratio* yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.



Grafik 6.3 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

tertinggi, serta lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 0,363.

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,53, meningkat 0,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 79,89. Peningkatan IPM Kepri pada 2025 didukung oleh perbaikan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang

Table 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

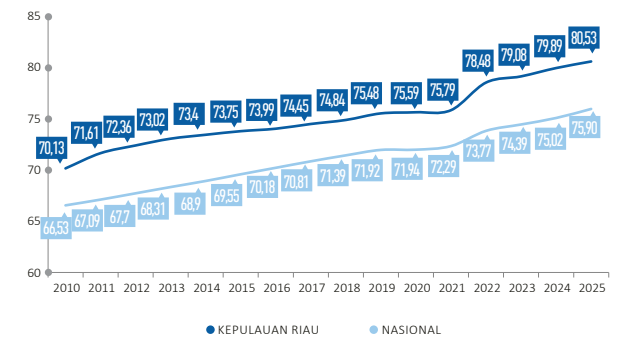
Komponen	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12	75,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27	13,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50	10,72
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573	15.881
IPM		71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89	80,53

Sumber: BPS (data diolah)

Table 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65	74,70	75,49	76,08
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99	77,50	77,96	78,65
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47	78,23	78,60	78,94
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57	72,23	73,05	73,82
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61	72,80	73,47	74,07
Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67	82,64	83,32	83,80
Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64	81,14	81,58	82,02
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	78,48	79,08	79,89	80,53

Sumber: BPS (data diolah)



Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

disesuaikan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,46, artinya bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,46 tahun, lebih lama 0,34 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2024. Angka UHH ini turut menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.

Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,28 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,72 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.881.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.573.000,-.

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM. IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masing-masing 83,80 dan 82,02. Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII

Prospek Perekonomian Daerah



Prospek perekonomian global diperkirakan cenderung stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini diperkirakan didorong oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik. Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, serta membaiknya ekspektasi masyarakat. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh melambat didorong oleh normalisasi pasca realisasi yang tinggi pada 2025 (base effect)..

Inflasi Kepri pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target $2,5\pm 1\%$ (yoy). Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

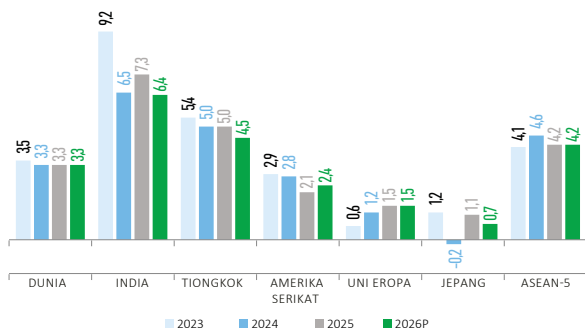


7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian global 2026 diperkirakan cenderung stagnan dibanding estimasi tahun 2025. Berdasarkan proyeksi dari *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 3,3% (yoy), atau meningkat 0,2 persen poin dibandingkan prakiraan pada bulan Oktober 2025, serta sama dengan estimasi pertumbuhan tahun 2025 yang sebesar 3,3% (yoy). Perbaikan proyeksi tersebut didukung oleh revisi ke atas pada pertumbuhan negara maju (*advanced economies*) khususnya AS dan pada negara *emerging market and developing economies* khususnya di wilayah Asia. Pertumbuhan ekonomi AS mengalami revisi atas menjadi 2,4% (yoy) seiring meningkatnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2026 diproyeksikan sebesar 4,2% (yoy), stagnan dibandingkan estimasi pertumbuhan pada 2025 yang juga sebesar 4,2% namun mengalami revisi atas dari proyeksi sebelumnya.

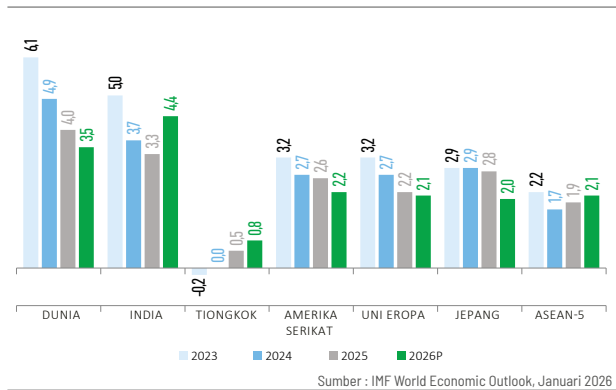
Tekanan inflasi global diperkirakan terus menurun, dari estimasi 4,1% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 3,8% (yoy) pada tahun 2026. Penurunan ini terutama didorong oleh berlanjutnya penurunan harga komoditas energi dunia. Meski demikian, potensi berlanjutnya konflik geopolitik global tetap menjadi risiko yang dapat mendorong kembali tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih berlangsung diperkirakan akan membuka ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,9% - 5,7% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi



Sumber : IMF World Economic Outlook, Januari 2026

Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)

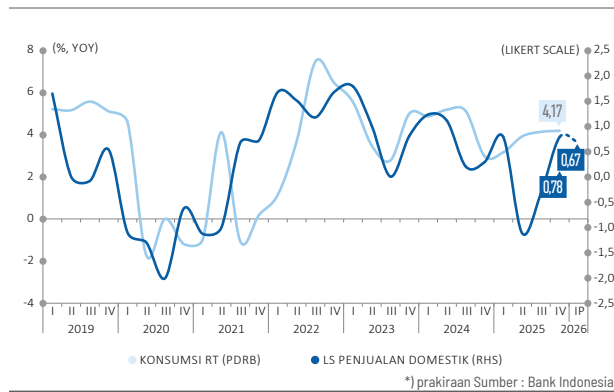


Sumber : IMF World Economic Outlook, Januari 2026

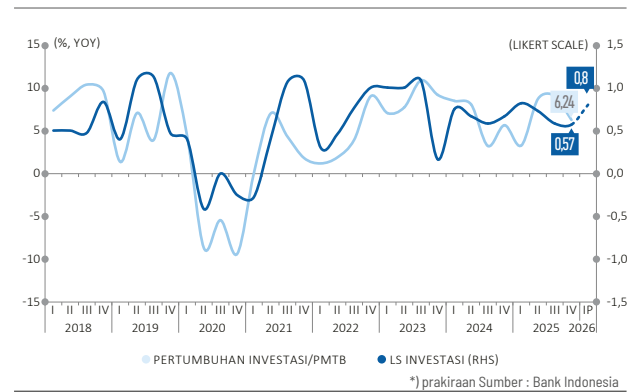
Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)

diprakirakan tetap baik didukung oleh berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang terus membaik dan peningkatan investasi pemerintah utamanya terkait hilirisasi SDA. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2026 juga didorong oleh berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kepri didukung oleh konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang terakselerasi dibanding 2025. Hal ini sejalan dengan kenaikan UMR dan *multiplier effect* peningkatan jumlah wisatawan di 2025 yang kembali ke level pra-pandemi dan diprakirakan terus meningkat pada 2026. Hal ini didukung oleh hasil Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan *likert scale* (LS) penjualan domestik yang mengalami peningkatan. Sementara itu, net ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap tumbuh positif namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat normalisasi pasca kenaikan yang masif di 2025. Adapun dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Kepri terutama LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, LU Industri pengolahan juga diprakirakan tumbuh namun sedikit mengalami perlambatan dibanding 2025. Pertumbuhan yang tetap positif ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik. **Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2026 di prakirakan tumbuh pada kisaran 6,38% - 7,18% (yoy).**



Grafik 7.3 Likert Scale Perkiraan Penjualan Domestik



Grafik 7.4 Likert Scale Perkiraan Investasi

Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Kebijakan Moneter Akomodatif	Kebijakan moneter yang lebih akomodatif seiring dengan tren inflasi yang melandai diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat.	▲
Kunjungan Wisatawan	Implementasi kebijakan <i>short term visa</i> serta kebijakan pendorong pariwisata lainnya dapat mendukung kunjungan wisman. Kunjungan wisman mancanegara yang mencapai 2.027.037 kunjungan pada 2025, tumbuh 21,59% dari 2024 dan mencatatkan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah wisatawan ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2026.	▲
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Berlanjutnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri.	▲
Investasi	Pengenaan tarif dumping oleh AS untuk produk solar panel Indonesia dan <i>refocusing</i> anggaran subsidi <i>green energy</i> oleh AS sebagai importir utama solar panel di Kepri sehingga investor cenderung <i>wait and see</i>	▼
Pertambangan	<i>Natural declining</i> sumur tua di Kepri, kesepakatan OPEC+ menghentikan sementara kenaikan produksi minyak untuk kuartal pertama tahun 2026 sehingga dapat menahan kinerja ekspor migas Kepri dan potensi dampak tidak langsung pembatasan impor BBM oleh Kementerian ESDM.	▼
Persaingan Daerah Industri	Peresmian kerja sama <i>Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ)</i> dan <i>Eastern Economic Corridor (EEC)</i> Thailand yang meningkatkan persaingan investasi dengan KEK yang ada di Kepri	▼
Risiko Geopolitik	Ketidakpastian global meningkat sejalan dengan ketegangan geopolitik yang melibatkan banyak negara besar dalam dinamika perdagangan internasional seperti AS, China, Rusia, Iran, Ukraina.	▼

7.2 PROSPEK INFLASI

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui program GPIPS diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat terjaga dalam kisaran sasaran. Selanjutnya, moderasi tarif angkutan udara sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan diperkirakan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut turut didukung oleh konsistensi kebijakan moneterserta eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan sebagai dampak berlanjutnya ketegangan geopolitik, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
- Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan pasokan domestik agar tidak menimbulkan tekanan harga.
- Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih tinggi.
- Risiko cuaca ekstrem atau anomali iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga meningkatkan volatilitas dan harga komoditas pangan.
- Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat namun berpotensi memberikan tekanan dari sisi permintaan (*demand pull*) apabila ketersediaan pasokan tidak seimbang.
- Normalisasi tarif listrik serta potensi dampak kenaikan tarif PDAM di Kota Tanjungpinang

Tabel 7.2 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
<i>Upside Risk</i>	- Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk. - Potensi kenaikan harga pangan karena peningkatan permintaan. - Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik. - Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. - Risiko cuaca ekstrim atau anomali iklim - Kenaikan UMR yang berpotensi mendorong <i>m</i> apabila tidak didukung ketersediaan pasokan yang memadai - Normalisasi tarif listrik setelah mengalami diskon 50% pada 2025 dan kenaikan tarif PDAM di Kota Tanjungpinang
<i>Downside Risk</i>	- Berlanjutnya normalisasi harga minyak dunia diperkirakan dapat menurunkan tingkat harga komoditas energi. - Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan dan perluasan frekuensi penerbangan dan kebijakan diskon tarif angkutan udara. - Inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi. - Upaya GPIPS yang terus digencarkan melalui program GERNAS PANGAN yang dimulai pada Februari 2026.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

- Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui:
 - Penyediaan insentif dan penguatan regulasi, termasuk perluasan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
 - Meningkatkan promosi investasi dengan menjadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai daya tarik utama, didukung oleh lokasi strategis serta kepastian iklim investasi.
 - Mendukung peningkatan keunggulan komparatif daya saing investasi di Kepri di tengah persaingan regional yang semakin ketat (termasuk dengan berdirinya *Johor-Singapore Special Economic Zone* dan *Eastern Economic Corridor*) melalui penguatan insentif bagi investor dan perbaikan infrastruktur.
- Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui:
 - Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain melalui penambahan *event*, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta pengembangan *quality tourism*.
 - Mendukung penerapan kebijakan *short term visa* guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
 - Mendorong normalisasi frekuensi penerbangan dan pembukaan rute baru di wilayah Kepri untuk memperkuat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menjaga stabilitas harga pada komoditas angkutan udara.

- Mengoptimalkan realisasi belanja pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, untuk menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian.
- Mendorong proses hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
- Memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal, termasuk peningkatan akseptansi QRIS oleh *merchant* dan *user*, serta promosi QRIS *cross-border* untuk mendukung konsumsi masyarakat.
- Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sehingga dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah.
- Memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, dan pendampingan agar mampu menghasilkan produk unggulan berorientasi ekspor.
- Mendorong capaian target dalam sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED)

Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat, antara lain:

- Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GPIPS dengan fokus pada 3 (tiga) periode waktu, yaitu:
 - jangka pendek: prioritas Penguatan Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN,
 - jangka menengah-panjang: Antisipasi terhadap potensi risiko hidrometeorologi untuk memperkuat ketahanan pangan
 - Jangka Menengah-Panjang: Penguatan sinergi Satgas untuk percepatan pemulihan bencana pada lahan pertanian terdampak sebagai salah satu pemasok utama komoditas pangan di Kepri

2. Mendorong peningkatan produksi pangan di tengah keterbatasan lahan subur, antara lain melalui budidaya cabai merah oleh koperasi dan kelompok tani serta pembangunan *greenhouse* untuk mengatasi kendala cuaca. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat dioptimalkan dalam pengembangan komoditas pangan strategis.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar anggota TPID melalui rapat koordinasi, rapat teknis, dan *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi masyarakat perlu dilakukan dengan penyebaran informasi terkait pasokan, kewajaran harga, serta kampanye belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
4. Meningkatkan sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyalarsan program pendukung GPIPS.
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya yang berasal dari luar daerah dengan dukungan dan kerja sama bersama asosiasi distributor.
6. Memperkuat koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam pelaksanaan program stabilisasi harga pangan strategis.

Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif
Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
MAKRO																
Laju Inflasi (yoy)*	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,84	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32	2,70	3,47
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	115,17	122,59	121,07	122,34	122,64	124,07	124,85	128,95	109,16	110,36	107,94	110,31	111,68	109,83	113,19	115,90
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,72	107,03	106,50	107,10	109,05	109,92	110,68	111,24	105,34	106,15	106,23	106,32	106,59	106,59	107,42	107,61
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,49	101,81	102,39	103,04	103,89	104,11	104,52	104,59	102,89	103,00	104,93	105,23	104,55	105,93	106,02	106,27
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	108,04	109,30	109,77	109,94	110,89	111,22	110,62	110,70	102,11	101,79	101,79	101,60	101,85	101,76	101,61	101,81
IHK KESEHATAN	103,27	103,10	103,23	103,41	103,52	103,66	103,69	103,77	103,72	103,82	103,91	104,11	104,26	104,93	105,64	105,97
IHK TRANSPORTASI	101,79	106,04	117,08	119,05	114,25	116,10	116,87	120,09	110,79	111,56	111,86	112,86	112,69	112,95	111,12	115,24
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,05	99,15	99,03	99,03	99,18	99,17	99,25	99,30	100,06	100,03	100,03	99,97	99,96	99,91	99,94	99,96
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	105,33	107,17	107,46	107,52	107,73	107,82	108,27	108,31	101,25	101,28	101,45	102,08	101,99	101,83	101,99	102,42
IHK PENDIDIKAN	114,18	114,18	117,34	117,34	117,40	117,40	120,63	120,63	104,19	104,19	102,15	102,23	102,24	102,27	103,58	103,63
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	108,03	109,77	110,07	110,18	110,22	110,25	110,76	110,91	101,68	102,70	102,87	103,02	104,80	105,22	105,51	105,89
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	116,65	117,73	117,85	120,28	122,36	122,72	123,31	125,72	108,30	111,06	112,53	114,87	119,16	123,34	126,48	134,03
Pertumbuhan PDRB (yoy)**	2,83	5,01	6,03	6,40	6,51	5,04	4,88	4,45	5,20	4,90	5,02	5,14	5,16	7,14	7,48	7,89
Ekspor Non Migas (Juta USD**)	3,38	3,92	4,28	3,82	4,13	3,56	3,65	3,66	3,62	3,88	4,15	4,47	5,01	5,23	5,11	5,37
Impor Non Migas(Juta USD**)	3,23	3,25	3,75	3,55	3,95	3,71	3,66	3,20	3,20	3,00	3,78	4,03	4,38	5,31	4,94	4,95
PERBANKAN																
Giro (Rp miliar)	20.975	22.098	23.498	25.467	25.220	24.908	27.355	29.153	30.605	32.530	33.876	34.257	32.041	35.284	38.505	40.417
Tabungan (Rp miliar)	29.538	30.479	30.451	31.850	32.820	32.626	32.832	34.340	35.705	37.881	38.225	38.865	40.734	41.022	43.333	43.694
Deposito (Rp miliar)	14.022	15.037	12.097	15.554	13.803	14.571	17.086	16.305	15.888	16.433	17.040	17.950	18.373	19.443	19.835	19.003
Total DPK (Rp miliar)	64.535	67.613	66.046	72.871	71.843	72.106	77.273	79.799	82.197	83.798	89.141	91.072	91.148	95.749	101.674	103.114
Total Asset (Rp miliar)	75.924	77.367	78.314	83.142	83.291	85.971	90.402	92.850	100.684	100.447	103.479	105.336	106.380	111.55	117.07	119.95
Total Kredit (Rp miliar)	59.354	61.920	63.127	64.861	65.810	67.327	70.132	71.507	71.717	73.688	74.336	79.322	84.564	85.910	89.653	99.885
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,48%	8,50%	8,62	8,82	8,92	8,90%	8,83%	8,83%	8,83%	8,80%	8,74%	8,59%	8,55%	8,59%	8,44%	8,34%
Suku Bunga Dep 3 bin tertimbang kredit	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%	3,55%	3,67%	3,91%	4,30%	4,30%	4,24%	4,32%	4,49%	4,46%	4,66%	4,24%	3,90%
LDR (%) - Lokasi Proyek	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%	93,50%	93,37%	90,76%	89,61%	87,25%	87,94%	83,39%	87,10%	92,78%	89,72%	88,18%	96,87%
NPL (%)	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%	2,18%	2,42%	3,66%	3,78%	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%	2,80%	2,39%
SISTEM PEMBAYARAN																
Inflow (miliar Rp)	1.540	1.297	1.088	680	1.686	1.561	1.080	1.200	1.239	1.309	944	526	884	1.250	502	507
Outflow (miliar Rp)	1.114	2.401	1.668	3.133	1.671	3.117	2.198	2.962	1.780	3.195	2.726	3.725	3.179	1.964	2.719	3.541
Volume Kliring (lembar)	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0	50.215	66.535	67.249	82.833	61.532	69.283	69.262	82.216	63.052	60.483	65.973	79.098
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536	3.278.058	3.225.906	3.614.866	4.167.192	3.366.996	3.374.095	3.731.188	3.987.954	3.240.296	3.095.976	3.538.216	3.897.998

Sumber: BPS dan BI
Ket: *) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100
**) Data Sangat Sementara
***) data Perbankan dari Bank Umum

Tabel 2 **Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)**
Provinsi Kepulauan Riau
Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018 dan mulai Januari 2024 menggunakan Tahun Dasar 2022

No	KELOMPOK	Jun 2024		Sep 2024		Des 2024		Mar 2025		Jun 2025		Sep 2025		Des 2025	
		Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	% mtm	Indeks	% mtm	Indeks	% mtm
	UMUM	106,69	0,28	106,32	0,14	107,35	0,68	108,07	0,38	108,10	-0,12	109,19	0,64	111,08	1,14
I.	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	110,36	0,56	107,94	0,10	110,31	2,05	111,68	-0,21	109,83	-0,55	113,19	1,74	115,90	2,91
a.	MAKANAN	109,50	0,54	106,33	(0,05)	108,85	2,40	110,29	-0,31	107,83	-0,69	111,50	2,01	114,58	3,46
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	107,58	0,49	108,11	0,75	109,27	0,28	110,06	0,18	110,48	0,00	110,78	0,06	110,96	0,15
c.	MINUMAN BERALKOHOL	102,32	0,00	103,06	0,02	103,06	0,00	103,69	0,00	104,14	0,00	103,07	0,00	104,74	0,00
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	120,64	0,68	122,93	0,86	124,90	0,57	126,07	0,31	128,17	0,27	131,04	0,75	132,23	0,40
II.	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,15	(0,08)	106,23	0,00	106,32	-0,14	106,59	0,57	106,59	0,41	107,42	0,31	107,61	0,18
a.	PAKAIAN	106,01	0,04	106,07	0,01	106,15	-0,16	106,57	0,72	107,11	0,71	108,09	0,28	108,23	0,12
B.	ALAS KAKI	106,71	(0,54)	106,87	0,00	106,98	-0,07	106,69	0,00	104,61	-0,73	104,83	0,42	105,20	0,41
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	103,00	0,01	104,93	0,18	105,23	0,03	104,55	2,33	105,93	0,09	106,02	0,00	106,27	0,01
a.	SEWA RUMAH	105,51	0,00	106,28	0,36	106,56	0,00	107,66	0,00	108,23	0,21	108,36	0,00	108,95	0,00
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	102,30	0,12	102,57	0,03	103,43	0,02	103,45	0,00	103,54	0,04	103,62	0,06	103,81	0,06
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,57	0,00	105,55	0,09	105,78	0,08	103,05	6,11	105,91	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00
IV.	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	101,79	0,00	101,79	0,08	101,60	-0,05	101,85	0,02	101,76	-0,12	101,61	-0,16	101,81	-0,02
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	102,10	0,00	102,16	0,05	102,25	0,09	102,62	0,00	102,62	0,00	102,65	0,03	102,58	-0,07
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	103,17	0,00	102,92	0,00	102,92	0,00	102,92	0,01	102,92	0,00	103,06	0,00	103,26	0,00
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	100,88	0,56	101,03	0,01	101,16	0,02	101,26	0,01	101,20	0,01	101,30	-0,02	101,36	-0,01
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,64	0,15	100,64	0,00	100,64	0,00	100,88	0,24
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	103,04	(0,09)	104,25	0,14	104,27	0,02	104,63	0,29	104,72	-0,02	104,86	0,00	104,89	-0,01
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	101,95	(0,18)	101,82	0,11	101,41	-0,12	101,71	-0,01	101,56	-0,22	101,21	-0,31	101,52	-0,05
V.	KESEHATAN	103,82	0,03	103,91	(0,01)	104,11	0,12	104,26	0,00	104,93	0,08	105,64	0,63	105,97	-0,07
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	102,06	0,05	102,23	(0,02)	102,49	0,23	102,53	0,00	103,83	0,14	105,21	1,22	105,86	-0,12
b.	JASA RAWAT JALAN	101,83	0,00	101,83	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00
VI.	TRANSPORTASI	111,56	0,71	111,86	0,11	112,86	0,53	112,69	-0,14	112,95	-0,25	111,12	-0,96	115,24	1,13
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	102,94	0,14	104,60	0,02	104,81	0,05	105,39	0,00	105,88	0,00	105,74	0,34	105,82	0,00
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	113,71	0,01	113,73	(0,25)	113,33	0,04	113,68	-0,02	113,69	-0,11	113,89	0,01	114,24	0,26
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	114,25	2,94	113,55	0,61	118,19	1,68	116,07	-0,53	116,72	-0,80	108,47	-4,43	125,38	4,05
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	107,43	0,00	116,04	8,01	122,90	6,44	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00
VII.	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	100,03	0,00	100,03	0,00	99,97	0,00	99,96	-0,03	99,91	0,00	99,94	0,02	99,96	0,00
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	99,85	0,00	99,85	0,00	99,57	-0,02	99,55	-0,12	99,31	0,00	99,34	0,00	99,42	-0,01
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
c.	JASA KEUANGAN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,34	0,34	100,34	0,00
VIII	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	101,28	(0,01)	101,45	(0,06)	102,08	0,00	101,99	0,00	101,83	0,00	101,99	0,03	102,42	-0,02
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	100,22	0,07	100,33	0,01	100,37	0,00	100,37	0,00	100,26	-0,11	100,17	0,07	101,59	-0,07
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,23	0,21
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	101,75	(0,09)	102,07	(0,16)	103,60	-0,01	103,39	0,00	103,07	0,09	103,55	0,03	103,34	-0,09
IX	PENDIDIKAN	104,19	0,00	102,15	0,85	102,23	0,00	102,24	0,00	102,27	0,03	103,58	1,15	103,63	0,00
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	103,27	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,67	0,00	104,67	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	101,59	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	108,44	0,00	111,10	2,45	111,10	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00	114,74	3,28	114,74	0,00
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	101,57	0,00	102,40	0,00	102,87	0,00	102,94	0,00	103,12	0,17	103,12	0,00	103,43	0,00
X	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	102,70	0,11	102,87	0,02	103,02	0,02	104,80	0,02	105,22	0,01	105,51	0,21	105,89	0,02
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	102,70	0,11	102,87	0,02	103,02	0,02	104,80	0,02	105,22	0,01	105,51	0,21	105,89	0,02
XI	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	111,06	0,13	112,53	0,07	114,87	0,11	119,16	1,16	123,34	0,51	126,48	2,02	134,03	1,63
a.	PERAWATAN PRIBADI	105,58	0,17	105,61	0,12	106,15	0,09	106,29	0,08	106,87	-0,07	107,68	0,07	107,72	-0,15
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	124,65	0,06	129,45	(0,02)	135,60	-0,35	150,01	3,11	163,07	1,44	171,92	5,15	197,74	4,07
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	107,40	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	109,75	0,00	109,75	0,00
d.	JASA LAINNYA	100,00	0,00	100,00	0,00	108,79	8,79	108,79	0,00	108,79	0,00	108,79	0,00	108,79	0,00

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (% , mtm)

KOTA	2022				2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Batam	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%	-0,32%	0,52%	0,12%	0,48%	0,45%	0,29%	0,18%	0,68%	0,11%	-0,06%	0,62%	1,14%
2. Tanjungpinang	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%	-0,04%	0,29%	0,42%	0,17%	0,04%	0,16%	-0,05%	0,70%	1,40%	-0,13%	0,54%	1,28%
3. Karimun									0,53%	0,30%	0,02%	0,64%	1,43%	-0,71%	0,99%	0,92%
4. Kepulauan Riau	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%	0,44%	0,49%	0,16%	0,44%	0,46%	0,28%	0,14%	0,68%	0,38%	-0,12%	0,64%	1,14%
5. Nasional	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%	4,97%	0,14%	0,19%	0,41%	0,52%	-0,08%	-0,12%	0,44%	1,65%	0,19%	0,21%	0,64%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN	2024						2025											
	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	101.001	101.656	103.479	105.054	105.646	105.336	106.916	109.630	106.380	108.171	107.696	111.552	113.299	114.075	117.071	116.920	120.371	118.944
DANA PIHAK KETIGA	86.701	87.575	89.141	90.745	90.467	91.072	93.135	94.947	91.148	92.681	92.165	95.749	97.432	98.033	101.674	100.779	103.342	103.114
a. Giro	32.555	32.770	33.876	34.262	34.009	34.257	35.969	36.836	32.041	33.574	33.064	35.284	35.423	36.091	38.505	38.296	40.413	40.417
b. Tabungan	37.951	37.773	38.225	38.805	38.930	38.865	39.451	40.133	40.734	40.540	39.493	41.022	42.091	41.560	43.333	42.742	43.960	43.694
c. Deposito	16.195	17.032	17.040	17.677	17.529	17.950	17.715	17.978	18.373	18.568	19.608	19.443	19.919	20.383	19.835	19.742	18.969	19.003
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653	89.759	92.386	99.885
Modal Kerja	20.329	20.169	20.254	20.185	20.875	22.687	23.312	22.718	22.748	23.648	22.972	23.158	22.840	23.465	23.591	23.038	24.172	30.663
Investasi	28.566	28.198	28.563	30.148	29.929	30.300	30.900	31.457	34.922	34.506	34.802	35.306	36.856	37.921	38.001	38.488	39.873	40.682
Konsumsi	24.905	25.220	25.519	25.893	26.097	26.335	26.436	26.698	26.895	26.964	27.231	27.446	27.721	27.905	28.062	28.233	28.341	28.540
b. Jenis Kredit	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653	89.759	92.386	99.885
UMKM	13.848	13.902	14.302	14.504	14.447	14.832	14.727	14.978	15.499	15.757	15.783	16.074	15.770	16.151	16.156	16.126	16.372	16.791
Non UMKM	59.952	59.685	60.034	61.722	62.454	64.490	65.922	65.895	69.066	69.362	69.222	69.836	71.647	73.139	73.497	73.633	76.014	83.095
c. Kolektibilitas	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653	89.759	92.386	99.885
Lancar	65.624	66.169	67.510	69.439	70.179	73.015	73.977	74.065	78.073	78.469	78.454	79.499	80.536	81.415	82.629	82.865	85.543	93.418
D.P.Khusus	5.718	4.977	4.377	4.306	4.355	4.010	4.328	4.427	4.125	4.251	4.145	3.920	4.375	5.341	4.517	4.391	4.365	4.076
Kurang Lancar	163	217	201	161	155	107	154	134	132	165	182	210	172	180	162	150	141	127
Diragukan	150	144	216	256	207	139	134	198	199	176	508	526	576	570	515	479	458	457
Macet	2.144	2.079	2.033	2.065	2.004	2.051	2.056	2.049	2.035	2.057	1.716	1.755	1.758	1.785	1.830	1.875	1.879	1.808
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,12%	84,03%	83,39%	84,00%	85,00%	87,10%	86,59%	85,18%	92,78%	91,84%	92,23%	89,72%	89,72%	91,08%	88,18%	89,07%	89,40%	96,87%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,33%	3,32%	3,29%	3,26%	3,08%	2,90%	2,91%	2,94%	2,80%	2,82%	2,83%	2,90%	2,87%	2,84%	2,80%	2,79%	2,68%	2,39%

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Wilayah Kepulauan Riau **)

KETERANGAN	2024						2025											
	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	21.799	21.535	22.594	24.080	23.989	24.362	24.507	25.787	22.135	22.408	21.071	22.473	21.789	22.178	22.542	22.858	23.940	23.842
DANA PIHAK KETIGA	22.114	22.112	23.210	23.715	23.297	23.554	24.402	25.189	21.528	21.669	20.348	21.731	20.827	21.368	22.081	22.237	22.788	22.509
a. Giro	8.696	8.472	9.513	9.931	9.447	9.738	10.506	11.313	7.230	7.912	5.989	7.013	6.096	6.417	6.964	7.063	7.762	7.633
b. Tabungan	10.378	10.292	10.355	10.429	10.542	10.638	10.624	10.584	10.892	10.810	10.722	11.109	10.993	10.890	11.061	11.125	11.291	11.410
c. Deposito	3.041	3.348	3.342	3.356	3.308	3.178	3.273	3.292	3.406	2.947	3.637	3.609	3.738	4.061	4.057	4.048	3.735	3.466
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574	20.464	21.097	20.259
Modal Kerja	3.793	3.864	3.922	4.115	4.806	4.810	4.837	4.181	4.467	4.571	4.521	4.391	4.554	4.330	4.328	4.147	5.074	4.228
Investasi	5.627	5.926	6.233	7.274	7.131	7.170	7.152	7.148	7.230	6.762	6.721	7.266	7.457	7.603	7.049	7.051	6.717	6.660
Konsumsi	8.445	8.487	8.576	8.658	8.707	8.760	8.777	8.837	8.872	8.877	8.916	8.968	9.063	9.142	9.196	9.266	9.307	9.372
b. Jenis Kredit	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574	20.464	21.097	20.259
UMKM	4.252	4.251	4.447	4.489	4.454	4.558	4.480	4.505	4.580	4.648	4.647	4.702	4.664	4.676	4.736	4.741	4.798	4.903
Non UMKM	13.614	14.026	14.284	15.557	16.191	16.182	16.286	15.661	15.989	15.561	15.511	15.923	16.410	16.399	15.838	15.722	16.299	15.357
c. Kolektibilitas	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574	20.464	21.097	20.259
Lancar	16.573	16.960	17.410	18.739	19.333	19.555	19.338	18.689	19.187	18.738	18.704	19.194	19.032	19.055	19.267	19.193	19.844	19.133
D.P.Khusus	604	586	600	591	602	494	720	762	671	711	689	667	1.295	1.258	548	514	505	422
Kurang Lancar	41	77	29	42	37	39	56	47	42	90	57	46	61	63	55	50	41	30
Diragukan	66	53	92	83	48	42	43	56	52	46	430	435	396	397	401	400	382	380
Macet	582	599	600	592	623	609	610	613	617	624	277	282	291	302	303	306	325	293
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	80,79%	82,66%	80,70%	84,53%	88,61%	88,05%	85,10%	80,06%	95,55%	93,26%	99,07%	94,91%	101,19%	98,63%	93,17%	92,03%	92,58%	90,01%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,86%	4,00%	3,85%	3,58%	3,43%	3,33%	3,41%	3,55%	3,46%	3,76%	3,79%	3,70%	3,55%	3,62%	3,69%	3,69%	3,55%	3,48%

Sumber: Bank Indonesia
**) meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.) Kota Batam

KETERANGAN	2024						2025											
	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	78.540	79.201	80.121	80.885	81.657	80.974	82.409	83.843	84.245	85.763	86.625	89.079	91.510	91.897	94.529	94.062	96.430	95.102
DANA PIHAK KETIGA	64.587	65.463	65.932	67.029	67.170	67.518	68.733	69.758	69.620	71.012	71.817	74.018	76.605	76.665	79.592	78.542	80.554	80.605
a. Giro	23.859	24.298	24.364	24.332	24.562	24.519	25.463	25.523	24.811	25.662	27.075	28.271	29.326	29.674	31.541	31.232	32.651	32.785
b. Tabungan	27.573	27.481	27.870	28.376	28.387	28.227	28.827	29.549	29.842	29.730	28.772	29.913	31.098	30.670	32.272	31.617	32.669	32.284
c. Deposito	13.155	13.684	13.698	14.322	14.221	14.772	14.442	14.686	14.967	15.620	15.970	15.834	16.181	16.321	15.779	15.693	15.234	15.537
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286	66.342	68.215	69.079	69.296	71.289	79.626
Modal Kerja	16.535	16.306	16.332	16.070	16.069	17.877	18.475	18.537	18.281	19.077	18.451	18.767	18.286	19.135	19.262	18.891	19.098	26.434
Investasi	22.939	22.272	22.330	22.874	22.798	23.130	23.749	24.308	27.691	27.744	28.081	28.040	29.399	30.317	30.952	31.437	33.156	34.023
Konsumsi	16.460	16.733	16.943	17.235	17.390	17.575	17.659	17.861	18.023	18.087	18.314	18.478	18.658	18.763	18.866	18.967	19.035	19.169
b. Jenis Kredit	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286	66.342	68.215	69.079	69.296	71.289	79.626
UMKM	9.596	9.651	9.856	10.014	9.993	10.274	10.247	10.473	10.918	11.108	11.136	11.372	11.106	11.475	11.420	11.385	11.574	11.888
Non UMKM	46.338	45.659	45.749	46.165	46.263	48.308	49.636	50.234	53.077	53.801	53.711	53.914	55.236	56.740	57.659	57.911	59.715	67.738
c. Kolektibilitas	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286	66.342	68.215	69.079	69.296	71.289	79.626
Lancar	49.051	49.209	50.100	50.700	50.845	53.460	54.639	55.377	58.886	59.731	59.750	60.305	61.504	62.360	63.362	63.672	65.699	74.284
D.P.Khusus	5.115	4.391	3.777	3.715	3.752	3.516	3.608	3.666	3.454	3.540	3.456	3.253	3.080	4.083	3.969	3.877	3.859	3.654
Kurang Lancar	122	140	172	118	118	68	98	86	90	75	125	163	111	117	107	99	99	96
Diragukan	85	91	124	173	159	97	91	142	147	130	78	91	180	173	114	79	77	76
Macet	1.562	1.480	1.432	1.473	1.381	1.442	1.447	1.436	1.418	1.433	1.439	1.474	1.467	1.483	1.528	1.569	1.554	1.515
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,60%	84,49%	84,34%	83,81%	83,75%	86,77%	87,12%	87,02%	91,92%	91,41%	90,29%	88,20%	86,60%	88,98%	86,79%	88,23%	88,50%	98,79%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,16%	3,09%	3,11%	3,14%	2,95%	2,74%	2,73%	2,74%	2,59%	2,52%	2,53%	2,65%	2,65%	2,60%	2,53%	2,52%	2,43%	2,12%

Sumber: Bank Indonesia
Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun

JENIS	2024								2025							
	I		II		III		IV		I		II		III		IV	
	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari
A. WARKAT KLIRING																
1. WARKAT(Lbr)	61.532	992	69.283	1.117	69.262	1.117	82.216	1.326	63.052	1.017	60.493	976	65.973	1.064	79.098	1.276
2. NOMINAL(Jt.Rp)	3.366.996	54.306	3.374.095	54.421	3.731.188	60.180	3.987.954	64.322	3.240.296	52.263	3.095.976	49.935	3.538.216	57.068	3.897.998	62.871

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output <i>gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile food</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered prices</i>).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (<i>persistent</i>).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kualitas kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Istilah	Arti
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Netflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebit maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/ subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.
yoy (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Kering Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

